

SIDANG TAHUNAN MPR 2020: PRESIDEN JOKOWI AKAN HADIR SECARA FISIK

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR RUMAH KEBANGSAAN



MAJELIS



EDISI NO.08/TH.XIV/AGUSTUS 2020

Proses Belajar Mengajar di Masa **PANDEMI COVID-19**



ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Perspektif
New Normal adalah
Sebuah Keniscayaan

25 Nasional
Pancasila Sudah Final Sebagai
Dasar dan Ideologi Negara

39 Selingan
Sejarah Sepeda, Kini
Menjadi Gaya Hidup

58 Sosialisasi
Generasi Milenial Jangan
Abai Nilai Luhur Pancasila



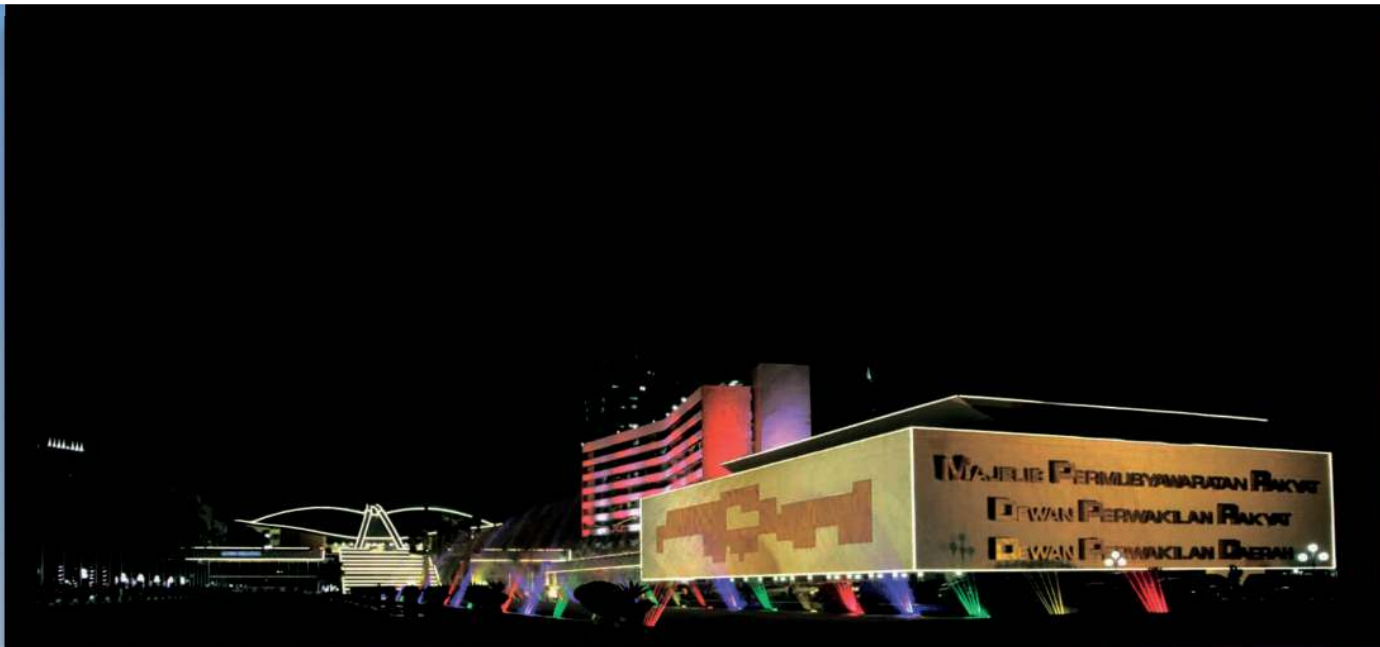
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Dirgahayu
REPUBLIK INDONESIA



**INDONESIA
MAJU**

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2020



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

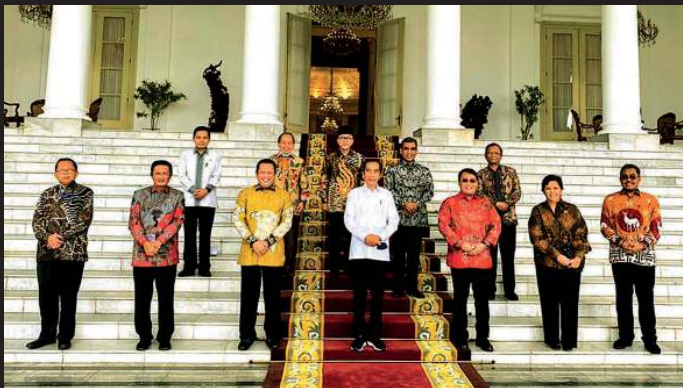
EDISI NO.08/TH.XIV/AGUSTUS 2020



08 BERITA UTAMA

Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19

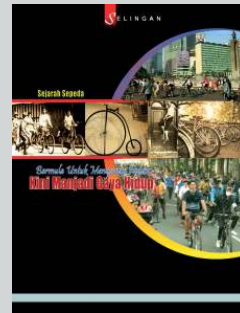
Di Indonesia pandemi Covid-19 membawa dampak pada jutaan siswa dan mahasiswa. Peserta didik dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan belajar dari rumah (BDR). Namun, PJJ menghadapi banyak kendala.



16 Nasional
Sidang Tahunan MPR RI 2020: Presiden Jokowi Akan Hadir Secara Fisik



56 Sosialisasi
MPR RI dan APKASI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

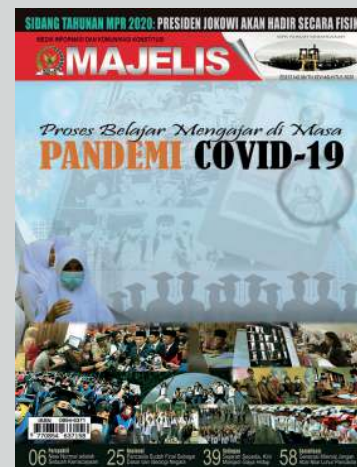


39 SELINGAN
Sejarah Sepeda



76 Profil
Arsul Sani

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	34
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	54
Varia MPR	69
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER
Edisi No.08/TH.XIV/Agustus 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,
Heri Herawan, Mafrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Budi Muliawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,
Tengku Novan Muda Mulya,
Yenita Revi, Ikhwani Bimo F,
Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,
A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB

DISTRIBUSI

Elen Magdalena

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,
Anggun Permana, Armansyah,
Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

Sekolah di Masa Pandemi Covid-19

PANDEMI Corona Virus Diseases-19 (Covid-19) belum memperlihatkan tanda-tanda mereda. Berawal dari Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019, secara global jumlah kasus positif Covid-19 terus menunjukkan kenaikan. Data pada akhir Juli 2020, secara global jumlah kasus positif Covid-19 telah melampaui angka 16 juta dengan korban meninggal lebih dari 600 jiwa. Di Indonesia, sejak pemerintah mengumumkan kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020, kini (data akhir Juli 2020) jumlah kasus positif Covid-19 nyaris mendekati 100.000 dengan korban meninggal melampaui 4.500 orang.

Pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan karena penyebarannya yang begitu cepat dan masif. Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi dampak pandemi Covid-19 begitu luas. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan dan imbauan, mulai dari anjuran atau imbauan agar sering mencuci tangan, diam di rumah (*stay at home*), bekerja dari rumah (*work from home*), belajar dan beribadah di rumah, menjaga jarak (*physical and social distancing*), dan menghindari kerumunan.

Tak cukup dengan imbauan, pemerintah juga mengeluarkan ketentuan yang tertuang dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan sekarang mulai memasuki masa adaptasi gaya hidup baru (*new normal*). Kebijakan dan imbauan ini mengurangi intensitas interaksi antar manusia dan pada gilirannya berdampak pada semua aspek kehidupan manusia termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pembatasan interaksi itu tentu berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akibatnya, semua pembelajaran tatap muka atau konvensional mulai diliburkan sementara waktu. Ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan pada 9 Maret 2020, Surat Edaran Menteri Kesehatan No HK.02.01/MENKES/199/

2020 pada 12 Maret 2020, dan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud No. 36603/A.A5/OT/2020 pada 15 Maret 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliburkan sekolah mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (*daring*). Kemendikbud mengeluarkan kebijakan itu sebagai tindakan pencegahan dan mitigasi yang efektif terhadap wabah Covid-19. Kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai tanggal 16 Maret 2020.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kembali mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Dalam surat edaran itu, pendidikan dapat dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan demikian, sistem pembelajaran tatap muka atau konvensional tergantikan dengan berbagai aplikasi pembelajaran *daring* sebagai ruang interaksi langsung antara guru dan siswa tanpa harus bertemu langsung. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain aplikasi *zoom*, *google classroom*, *youtube*, hingga media sosial *whatsapp*.

Namun, tak semudah dibayangkan. Mungkin tak ada yang menyangka wajah pendidikan kita berubah secara drastis akibat pandemi Covid-19. Konsep pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Maka, tak heran, bila muncul berbagai kendala dihadapi para siswa, guru, dan orangtua. Di antara kendala itu adalah akses internet bagi guru dan siswa yang tinggal di daerah pedesaan, *gaptek* (*gagap teknologi*), persoalan sinyal dan kuota (*gadget dan laptop*), persiapan bahan pembelajaran secara digital, disiplin pribadi siswa, dan sebagainya.

Majelis edisi ini mengulas tentang sekolah di masa pandemi Covid-19. Sebuah wajah pendidikan kita yang mengalami perubahan akibat pandemi Covid-19. □

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Biro Humas, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238
Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO

New Normal adalah Sebuah Keniscayaan

KEHIDUPAN manusia di bumi akan mencatat satu sejarah, yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). World Health Organization (WHO) sudah mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Virus yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, akhir Desember 2019 ini dengan sangat cepat dan masif menyebar ke berbagai negara di belahan dunia, mulai dari Asia, Eropa, Amerika, Amerika Latin, hingga Afrika. Di Indonesia, pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Penyebaran virus Corona tidak bisa diremehkan. Sampai akhir Juni 2020 tercatat secara global jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 10 juta lebih, dengan jumlah orang meninggal sebanyak 500 ribu lebih. Di Indonesia, pada waktu yang sama, tercatat sedikitnya 55 ribu kasus positif Covid-19 dan jumlah korban meninggal dunia mencapai 2.800 orang lebih. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir. Pandemi ini akan dicatat dalam sejarah perjalanan umat manusia di dunia.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat serius dalam semua aspek kehidupan manusia di muka bumi. Sebab, virus Corona membawa dampak terhadap aspek fundamental dari seluruh aktivitas manusia, yaitu interaksi fisik antarmanusia. Lantaran itu, cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan mengendalikan interaksi fisik manusia, seperti diam di rumah (*stay at home*), bekerja di rumah (*work from home*), menjaga jarak (*social and physical distancing*), dan menghindari kerumunan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang begitu cepat dan masif. Pada April 2020, pemerintah mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengiringi imbauan untuk *stay at home*, *work from home*, menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak (*physical distancing* dan *social distancing*). Wilayah yang memberlakukan PSBB pun mulai lengang. Aktivitas sosial dan bisnis berkurang. Di Jakarta, misalnya, hampir 60% penduduk memilih diam di rumah saat PSBB.

Namun, kebijakan PSBB sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 sekaligus mengurangi jumlah orang yang terinfeksi virus

Corona telah menimbulkan efek samping, yaitu lumpuhnya perekonomian. Hampir semua kegiatan di sektor ekonomi berhenti sementara. Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan kegiatan ekonomi di sektor riil, mulai dari warung makan, pedagang kaki lima, pabrik, pusat perbelanjaan, destinasi wisata, transportasi darat, laut, dan udara. Banyak orang kehilangan penghasilan dan pekerjaan.

Secara makro, pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan 2,3%. Bahkan skenario terberat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 0,4%. Bila keadaan tidak ada perubahan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan minus. Dengan skenario sangat berat tersebut kemiskinan bisa bertambah 4,86 juta jiwa dan pengangguran bertambah 5,23 juta orang. Pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai keresahan, kesulitan hidup, dan kemiskinan baru.

New Normal

Kita tidak bisa memperkirakan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Vaksin untuk Covid-19 diprediksi baru tersedia pada akhir 2020. Inilah dilema yang kita hadapi: apakah harus menunggu vaksin Covid-19 atau bersiasat menghadapi Covid-19. Kita menyiasati pandemi Covid-19 dengan cara memilih 'berdamai' dan 'berdampingan' dengan virus Corona. Sebab, virus Corona tidak akan hilang dari muka bumi. Virus ini bakal tetap ada di tengah kehidupan masyarakat. Memilih 'berdamai' dan 'berdampingan' dengan virus Corona bukan berarti kita 'menyerah', tetapi kita 'menyesuaikan' diri.

Bagaimana menyiasati pandemi Covid-19? Yaitu, dengan menerapkan pola atau tatanan hidup baru. Pola atau tatanan hidup baru berdampingan dengan virus Corona. Kita tetap melawan penyebaran virus Corona sambil beraktivitas seperti sedia kala. Pola atau tatanan kehidupan baru inilah yang disebut sebagai new normal, yaitu menerapkan pola hidup baru yang berbeda dengan pola hidup sebelum pandemi Covid-19. Pola atau tatanan hidup baru itu diatur dengan protokol kesehatan di semua ruang publik: menggunakan masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.

Sekretaris Jenderal MPR RI -
Direktur The Cahyono Institute -



Intinya, new normal mensyaratkan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sosial ekonomi secara normal, tetapi ditambah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. New normal menjadi skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan sekaligus sosial-ekonomi. New normal bukan berarti mengorbankan faktor kesehatan, melainkan untuk menggerakkan ekonomi sekaligus mencegah penyebaran Covid-19.

New normal adalah sebuah pilihan yang harus diambil. Kita tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan pola, tatanan, atau 'gaya' hidup baru. Kebiasaan baru untuk berperilaku bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan menghadapi Covid-19. Oleh karena itu, setiap orang harus melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan di era new normal. Kepatuhan pada protokol kesehatan di era new normal adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Prinsipnya, new normal adalah adaptasi dengan pola, tatanan, dan gaya hidup baru. Kita harus membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus menyesuaikan diri dengan pola, tatanan, dan gaya hidup baru itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan budaya perilaku bersih dan sehat: memakai masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan menghindari kerumunan.

Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah memasuki era kehidupan new normal. Beberapa Negara, seperti Australia, Singapura, Tiongkok, dan negara-negara lain yang sudah bisa mengendalikan virus Corona mulai menerapkan pola, tatanan, dan gaya hidup baru ini. Di Indonesia, sejumlah daerah sudah melonggarkan PSBB dan bersiap melakukan

transisi menuju new normal. Masyarakat mulai menjalankan aktivitas ekonomi - sosial seperti biasa, namun dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai sebuah norma baru. Pemandangan orang-orang yang memakai masker ini menjadi hal yang biasa.

Sebagai siasat untuk menghadapi pandemi Covid-19, pola, tatanan, dan gaya hidup pada era new normal adalah sebuah keniscayaan. Di sinilah keniscayaan bagi setiap manusia untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan alam.

Ilmuwan biologi yang terkenal dengan teori Evolusi, Charles Darwin, dalam bukunya *The Origin of Species* sudah menyatakan, "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change," yang artinya "bukan yang terkuat yang mampu bertahan, bukan pula yang paling cerdas, melainkan mereka yang paling adaptif menghadapi perubahan."

Manusia yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu merespon dengan cepat dan tepat perubahan situasi dan kondisi. Mau tidak mau, setiap individu mesti beradaptasi dengan keadaan. Saatnya kita beradaptasi tanpa menyalahkan keadaan yang terjadi. Kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi apapun, termasuk kehidupan new normal, tergantung pada diri kita sendiri. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu penentu utama keberlanjutan kehidupan.

Kita bisa belajar untuk beradaptasi menghadapi segala bentuk perubahan. Jika kita tidak melakukan adaptasi, kita bisa tertinggal jauh. Seyogyanya kita menjadi barisan yang paling mudah untuk beradaptasi di tengah era new normal sekarang ini. □

Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Di Indonesia pandemi Covid-19 membawa dampak pada jutaan siswa dan mahasiswa. Peserta didik dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan belajar dari rumah (BDR). Namun, PJJ menghadapi banyak kendala.

MENJELANG dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 pada 13 Juli 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menggelar telekonferensi. Wawancara telekonferensi itu terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru yang berbeda dengan tahun ajaran baru sebelumnya. Tahun ajaran baru 2020/2021 berada di tengah pandemi Covid-19. “Sekolah-sekolah kalau mau membuka kembali pembelajaran tatap muka harus benar-benar meyakinkan semua orangtua bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan,” kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (11/7/2020).

Dalam wawancara telekonferensi itu, Nadiem menyebutkan, terdapat beberapa kabupaten/kota yang merupakan zona hijau dalam penilaian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional. Pada zona hijau pembelajaran dimungkinkan dengan tatap muka mengikuti persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap, mulai dari jenjang yang lebih tinggi, yakni dimulai dari jenjang SMP dan SMA/SMK terlebih dahulu. “Tetapi apabila ada orangtua yang merasa tidak siap jika anaknya



harus kembali bersekolah maka ia berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah,” katanya.

Sebelumnya, Kemendikbud bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Baru dan Tahun Akademi Baru di Masa Pandemi



Covid-19. Dalam SKB itu, kebijakan membuka sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka berada di tangan kepala daerah. Selain kepala daerah, kepala sekolah dan orangtua juga punya hak untuk menentukan apakah sekolah tersebut sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Memang, hingga saat ini negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, masih menghadapi pandemi Covid-19. Berawal dari Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) pada akhir 2019 dengan cepat dan masif menyebar ke segala penjuru. Secara global, kasus positif Covid-19 sudah melampaui 16,5 juta dengan korban meninggal melebihi 650 ribu jiwa. Di Indonesia, sejak pengumuman kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, kasus positif Covid-19 terus bertambah dan kini sudah mencapai 100.000 kasus dengan jumlah korban meninggal mendekati 5.000

orang (data akhir Juli 2020).

Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, pemerintah mengeluarkan imbauan dan kebijakan, seperti sering mencuci tangan, belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya pembatasan interaksi, pandemi Covid-19 membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan pada 9 Maret 2020, Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/

MENKES/199/2020 pada 12 Maret 2020, dan Surat Edaran Sekjen Kemendikbud No. 36603/A.A5/OT/2020 pada 15 Maret 2020.

Berdasarkan surat edaran tersebut, semua kegiatan pembelajaran tatap muka atau konvensional mulai diliburkan sementara waktu, mulai pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi di lingkungan kampus. Sistem pembelajaran tatap muka atau konvensional digantikan dengan berbagai aplikasi pembelajaran daring yang memberi ruang interaksi langsung antara guru dan siswa tanpa harus bertemu langsung, antara lain e-learning, aplikasi zoom, google classroom, youtube, whatsapp. Bahkan pemerintah juga meniadakan ujian nasional (UN) mulai dari tingkat sekolah dasar hingga setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Langkah ini sebagai mitigasi terhadap pandemi Covid-19 dan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan para siswa.

Anggota MPR dari Fraksi PKB, Syaiful



Syaiful Huda

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Huda, mengakui, pandemi Covid-19 memberi dampak pada semua sektor kehidupan, tidak terkecuali pendidikan. Di Indonesia pandemi Covid-19 membawa dampak pada jutaan siswa dan mahasiswa. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) pada Maret 2020 setidaknya terdapat 45.540.669 juta peserta didik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 140.234 peserta didik penyandang disabilitas. Jumlah itu belum termasuk 7,3 juta mahasiswa. “Peserta didik dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah (BDR),” katanya kepada *Majelis*.

“Dengan mengeluarkan kebijakan BDR pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, harus memastikan bahwa jutaan peserta didik mendapatkan akses pendidikan yang layak selama masa pandemi,” imbuh Ketua Komisi X DPR RI ini. Pasalnya, masyarakat dan pemangku kepentingan menganggap kebijakan terkait pelaksanaan BDR yang dikeluarkan Kemendikbud selama masa pandemi sepanjang bulan Maret hingga Mei 2020 cukup lambat.

Tak jauh berbeda, anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H. Pareira, menyebutkan, perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 sangat kontras dan dramatis. “Pandemi Covid-19 sangat menguras energi kita. Kita harus segera beradaptasi dengan situasi hidup selama masa pandemi yang berbahaya dan mengancam kehidupan kita semua,” katanya

kepada *Majelis*.

Tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Andreas melihat, pemerintah dan masyarakat tidak siap menghadapi keadaan seperti ini. “Jujur saja, dalam dunia pendidikan kita semua sangat terkejut. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, sekolah, guru, atau dosen, dan peserta didik, serta orang tua, tidak semua siap menghadapi keadaan seperti ini,” ujarnya.

Meski demikian, Andreas menyebutkan, tidak ada pilihan menghadapi keadaan seperti itu, karena proses pendidikan harus tetap berjalan. “Kesehatan tetap harus diutamakan, terutama menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Metode dan pola pendidikan pun diubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tuturnya.



Andreas H. Pareira

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, juga setuju bila pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan di seluruh dunia, baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya, termasuk dunia pendidikan. “Karena pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka atau bertemu satu sama lain maka para siswa tidak bisa berkumpul atau memiliki kegiatan sosial ekstrakurikuler di sekolah. Anak-anak terkurung di rumah selama empat bulan lebih,” katanya kepada *Majelis*.

Dunia pendidikan terjadi perubahan besar, yaitu dari pembelajaran konvensional beralih ke dunia digital. Apalagi industri 4.0 yang sudah mengarah pada digital. “Ini perubahan yang terjadi di dunia. Maka, Indonesia juga harus mengikuti irama dunia, yakni harus menyiapkan infrastruktur, pendanaan, dan lain sebagainya. Meski sarana dan prasarana terbatas, Indonesia harus memberlakukan digitalisasi atau online,” katanya.

Sejumlah Persoalan

Namun pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah dengan sistem dalam jaringan (daring) tak selalu berjalan mulus. Banyak ditemui kendala dalam PJJ. Menurut Andreas, untuk melaksanakan PJJ harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian. “Kita dipaksa untuk bermigrasi menggunakan IT digital sebagai alat yang mempertemukan tenaga pendidik dan peserta didik. Namun, justru di sinilah letak persoalannya,” kata anggota Komisi X DPR ini.

Andreas menambahkan, pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan IT digital membawa sejumlah persoalan lain. Misalnya, persoalan sinyal. Sinyal tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Ada daerah yang sulit mendapatkan sinyal, ada daerah yang mudah mendapatkan sinyal. Lalu, kesulitan alat smartphone (gadget). Tidak semua guru ataupun peserta didik memiliki alat smartphone yang memadai. Begitu juga, kemampuan guru dan siswa tidak sama dalam menggunakan gadget. Ditambah lagi persoalan pulsa dan kuota. “Singkatnya, kita dipaksa bermigrasi ke digitalisasi dalam

proses pendidikan, tetapi tingkat kesiapan sistem pendidikan kita masih sangat terbatas,” paparnya.

Dede Yusuf juga mengakui, pembelajaran jarak jauh menghadapi banyak kendala. Selama ini, pembelajaran jarak jauh belum dilaksanakan secara efektif. “Ini juga akan berpengaruh pada ujian kelulusan atau kenaikan kelas para siswa dan mahasiswa. Bisa jadi kenaikan kelas dan kelulusan hanya menjadi formalitas di masa pandemi Covid-19 ini. Pada gilirannya berpengaruh pada mutu pendidikan,” imbuhnya.

Melihat berbagai kendala itu, Syaiful Huda meminta Kemendikbud berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga serta Pemda, terutama terkait fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh. “Kemendikbud harus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga serta Pemda untuk memastikan fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh, seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan perangkat belajar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Syaiful Huda, Kemendikbud juga harus menerbitkan kurikulum adaptif pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19. Kurikulum adaptif ini harus mempertimbangkan kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh.

“Karena itu, materi atau konten belajar yang dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan



Dede Yusuf

peserta didik harus menyajikan konten kreatif, efektif, efisien, aktif, menyenangkan, ramah anak, dan mudah digunakan untuk semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, dengan pendekatan ilmu desain dan memerhatikan nilai budaya lokal,” jelasnya.

Selain itu, tambah Syaiful Huda, materi atau konten belajar juga harus mampu mencapai sasaran pembentukan karakter peserta didik. “Dalam hal ini materi konten harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan peserta didik dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Sama seperti Syaiful Huda, Andreas juga mengatakan, beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk pembelajaran jarak jauh. PJJ bisa dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh infrastruktur alat komunikasi

dan ketersediaan sinyal yang memadai. “Artinya, program Merdeka Belajar yang didorong Kemendikbud harus diselaraskan dengan Program Indonesia Merdeka Sinyal dari Kemenkominfo,” katanya.

Selain itu, tenaga pendidik dan siswa atau mahasiswa juga harus disiapkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan. Kurikulum dan metode PJJ dengan teknologi digital harus disesuaikan sehingga tenaga pendidik dan peserta didik bisa melaksanakan PJJ secara lebih efektif. “Biaya penggunaan IT harus ditekan serendah mungkin. Untuk itu, negara harus memberikan subsidi,” kata Andreas.

Syaiful mengungkapkan, untuk memantau pelaksanaan PJJ, Komisi X telah membentuk Panja. “Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh selama Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019 – 2020. Pada masa sidang I yang akan datang kami akan memberikan laporan hasil Panja beserta rekomendasinya,” tegasnya.

Mendikbud Nadiem Makarim mengakui, efektivitas pelaksanaan PJJ selama masa pandemi Covid-19 sangat variatif. Ada beberapa daerah yang dinilai cukup efektif, tetapi tidak sedikit pula dinilai tidak cukup efektif. Sama seperti diungkapkan anggota dewan, Mendikbud mengakui sejumlah kendala dan persoalan yang ditemukan, antara lain akses internet di beberapa daerah memang sangat sulit, terutama di daerah terluar dan tertinggal. Kemudian persoalan dana untuk membeli kuota internet.

“Hal inilah yang membuat Kemendikbud mengizinkan penggunaan dana BOS untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru,” ujar Nadiem dalam wawancara telekonferensi. Kemendikbud telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. “BOS yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan. Kita berikan kebebasan anggaran kepada kepala sekolah,” ucapnya. □



Nadiem Makarim

DER/EFP/BSC

Dampak Pandemi Covid-19

Sekolah Diliburkan, Belajar Lewat Daring

Peserta didik, tenaga pendidik, dan orangtua siswa di seluruh dunia merasakan betul dampak yang luar biasa dari wabah virus Corona ini. Banyak negara mengambil kebijakan untuk menutup atau meliburkan sekolah-sekolah.

PANDEMI Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) membawa dampak ke seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Jagad pendidikan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi dampak pandemi Covid-19. Salah satu dampaknya adalah seluruh lembaga pendidikan diliburkan, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Pokoknya, pelaksanaan aktivitas belajar-mengajar tak lagi seperti biasanya. Ini adalah cara untuk mencegah penyebaran atau penularan Covid-19.

Jadi, sejumlah negara yang terpapar Covid-19 telah menerapkan kebijakan menutup lembaga pendidikan. Akibatnya, peserta didik, tenaga pendidik, dan orangtua siswa di seluruh dunia merasakan betul dampak yang luar biasa dari wabah virus Corona ini. Virus yang pertama kali dideteksi di Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019, dengan cepat sudah menyebar ke-156 negara di dunia. Akibatnya, negara-negara itu mengambil kebijakan untuk menutup atau meliburkan sekolah-sekolah.

Laporan *ABC News* pada 7 Maret 2020 menyebutkan, sedikitnya ada 22 negara di tiga benua yang meliburkan sekolah selama masa pandemi Covid-19. Sekolah-sekolah itu menampung ratusan juta siswa. Dalam laporannya, *ABC News* juga melaporkan, ada 13 negara yang menutup sekolah di seluruh penjuru negeri.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun ikut gusar dengan adanya fakta tersebut. Organisasi internasional yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, itu menangkap bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang begitu terdampak virus Corona. Lebih parah lagi, dampak itu hanya terjadi dalam tempo singkat dengan skala yang sangat luas.

Sesuai data yang diperoleh dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), seperti tertuang dalam situsnya menyebutkan, pandemi Covid-19

mengancam kurang lebih 577.305.660 pelajar di dunia, mulai dari pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, hingga menengah atas. Sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi kurang lebih 86.034.287 mahasiswa terancam pandemi Covid-19.

UNESCO juga mencatat, sudah ada 39 negara yang menerapkan kebijakan penutupan sekolah. Dari 39 negara itu, total jumlah pelajar yang terpengaruh mencapai

belajaran bagi semuanya, terutama anak-anak dan remaja yang kurang beruntung dan cenderung paling terpukul oleh penutupan sekolah,” ujarnya.

Azoulay mengakui, pandemi Covid-19 berdampak sangat luas terhadap pendidikan. Bahkan, pandemi Covid-19 ini bisa mengancam hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. “Penutupan sekolah untuk sementara waktu dengan



Audrey Azoulay

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

421.388.462 anak. Sejauh ini negara Tiongkok memiliki jumlah pelajar yang paling banyak terpengaruh karena pandemi Covid-19, yaitu lebih dari 233 juta siswa.

Hingga 13 Maret 2020, sudah ada 62 negara di Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara, dan Amerika Selatan yang mengumumkan atau menerapkan pembatasan pembelajaran sekolah, termasuk universitas. Dalam hal ini UNESCO memberikan dukungan langsung ke negara-negara tersebut, termasuk memberikan solusi untuk pembelajaran jarak jauh yang inklusif.

Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay memberi perhatian besar pada sistem pembelajaran jarak jauh ini. “Kami bekerjasama dengan negara-negara di dunia demi memastikan kesinambungan pem-

alasan kesehatan dan krisis lainnya bukanlah hal pertama kalinya terjadi. Namun, kali ini dampak yang ditimbulkannya memang tak tertandingi, karena berlangsung sangat cepat dan berdampak secara global. Jika ini terus berlanjut maka bukan tidak mungkin akan mengancam hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan,” imbuhnya.

Sejumlah negara memang mengeluarkan kebijakan untuk menutup atau meliburkan sekolah guna mencegah penyebaran virus Corona. Ketika di awal pandemi Covid-19 merebak, beberapa negara masih berupaya untuk membuka sekolah seperti biasa. Namun, pada akhirnya, karena pandemi Covid-19 kian mengganas, mau tidak mau, negara-negara itu menutup sekolah untuk menyelamatkan para peserta didik.

Australia, Jerman, dan Singapura termasuk di antara negara yang awalnya masih berupaya untuk membuka sekolah seperti biasa. Namun, karena pandemi Covid-19 semakin meluas dan tidak dapat lagi dicegah maka negara-negara itu mengambil langkah menutup dan meliburkan sekolah.

Berikut contoh dampak Covid-19 terhadap pendidikan di beberapa negara.

Tiongkok

Tiongkok menjadi tempat awal mula virus Corona muncul. Virus Corona ARS-CoV-2, penyebab Covid-19, muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, pada penghujung tahun 2019. Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang paling awal mengambil langkah

murid di Wuhan, Tiongkok, sudah berangsur-angsur kembali ke sekolah. Sedikit demi sedikit, pemerintah membuka kembali lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sedikitnya 39% murid telah kembali melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Italia

Italia merupakan negara di Eropa dengan tingkat kematian yang sangat tinggi akibat pandemi Covid-19. Jumlah kasus positif Covid-19 di Italia mencapai lebih dari 200 ribu dengan jumlah kematian cukup tinggi, mencapai 35 ribu orang. Sebagai negara dengan angka kematian tertinggi, pemerintah Italia telah menerapkan kebijakan lockdown sejak 9 Maret 2020. Semua fasilitas umum

Wakil Presiden AS, Mike Pence, yang memimpin gugus tugas virus Corona Gedung Putih mengatakan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) akan mengeluarkan pedoman baru tentang pembukaan sekolah. "CDC akan mengeluarkan seperangkat pedoman baru, lima dokumen berbeda tentang panduan," katanya di Departemen Pendidikan AS, Rabu (8/7/2020).

Sekolah-sekolah di AS biasanya mulai tahun ajaran baru pada Agustus atau awal September. Pedoman CDC ini menyarankan siswa dan staf di sekolah memakai penutup wajah dan tinggal di rumah jika perlu. CDC juga menyarankan sekolah-sekolah harus menerapkan jadwal dan pengaturan tempat duduk yang mendukung jaga jarak sosial dan



Mike Pence



menutup dan meliburkan sekolah. Sejak merebak akhir 2019, Tiongkok telah memberlakukan lockdown dan mengumumkan penutupan sekolah.

Saat itu China Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyalurkan bantuan dengan membagikan panduan tentang bagaimana menghadapi Covid-19. CDC menyarankan pihak sekolah untuk bekerjasama dengan departemen kesehatan setempat. Tujuannya agar diseminasi informasi terkait Covid-19 tersampaikan dengan baik kepada para siswa. Selain itu, CDC juga ingin memastikan agar tenaga dan peserta didik mampu menghadapi situasi darurat ketika pandemi. CDC juga meminta sekolah tetap memantau aktivitas siswa meski sekolah ditutup.

Tetapi, setelah 76 hari lockdown, dan tidak ditemukan kasus positif baru, sejak Mei lalu,

ditutup, tak terkecuali sekolah.

Namun, jauh sebelum berbagai penjuror negeri di-lockdown, Menteri Pendidikan Italia Lucia Azzolina lebih dulu bergerak. Sejak 2 Maret 2020, ia mengumumkan bahwa semua sekolah akan ditutup secara nasional.

Amerika Serikat

Sampai saat ini Amerika Serikat masih menduduki peringkat pertama jumlah kasus positif Covid-19. Jumlah kasus positif di AS mencapai 4,31 juta dengan korban meninggal mencapai 149 ribu orang (data 21 Juli 2020). Meski kasus baru terus terjadi, Gedung Putih ingin melanjutkan rencana pembukaan sejumlah sektor, termasuk sekolah. Sebelumnya, seperti negara-negara lain, Amerika Serikat pun mengeluarkan kebijakan untuk menutup sekolah.

menutup ruang-ruang berkumpul.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada mahasiswa asing yang belajar di perguruan tinggi Amerika Serikat. Presiden Trump mengeluarkan kebijakan larangan bagi mahasiswa dari negara lain untuk tinggal di AS jika perguruan tinggi mereka tidak mengadakan kuliah di kelas. Karena itu, banyak aktivitas kuliah bergeser secara online selama pandemi.

Namun, dua universitas ternama di AS, yaitu Universitas Harvard dan Massachusetts Institute of Technology (MIT), dua universitas dengan peringkat tertinggi di dunia, meminta pencabutan larangan itu.

"Kami ingin siswa internasional dapat melanjutkan studi mereka tanpa ancaman deportasi," kata Presiden Harvard, Lawrence Bacow. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI

Sektor Pendidikan Sedang Beradaptasi dengan Kondisi Pandemi Covid-19

TAHUN ajaran baru dan akademik baru 2020/2021 sudah dimulai pada 13 Juli 2020. Namun, berbeda dengan tahun ajaran baru sebelumnya, para siswa tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah secara tatap muka. Kegiatan belajar mengajar di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam sistem jaringan (*daring*) atau pembelajaran jarak jauh (*PJJ*), dan belajar dari rumah (*BDR*). Sejak 16 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*Kemendikbud*) memberlakukan kebijakan itu sebagai langkah pencegahan dan mitigasi terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia yang merebak sejak awal Maret 2020.

Untuk membahas tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR **Lestari Moerdijat**. Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem ini. *Petikannya.*

Ada perbedaan tahun ajaran baru 2020-2021 dibanding tahun ajaran se-

belumnya, sebagai akibat pandemi Covid-19. Bagaimana ibu melihat secara umum pengaruh pandemi Covid-19 pada pendidikan di Indonesia?

Tahun ajaran baru 2020-2021 memang sangat dipengaruhi kebijakan pendidikan yang dibuat berhadapan dengan wabah Covid-19 di Indonesia. Pola belajar tatap muka harus dihentikan dan diganti dengan pola belajar jarak jauh. Pendidikan jarak jauh sejak awal tahun 2020 dengan berbagai catatan sudah membuat tahun ajaran baru sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum pandemi Covid-19 ini memaksa kita melakukan penyesuaian atau adaptasi di banyak sektor, termasuk sektor pendidikan. Salah satu urgensi adalah pemerataan layanan pendidikan. Karena proses pendidikan harus tetap berjalan, perlu ada langkah konkret, seperti adaptasi kurikulum, metode belajar, dan akses jaringan yang memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung lancar. Apalagi pandemi Covid-19 diperkirakan akan berlangsung lama.

Baik Pemerintah maupun swasta tak menyangka akan terjadi krisis global saat ini. Kurikulum pendidikan belum siap untuk diaplikasikan dalam situasi darurat. Yang perlu diupayakan saat ini adalah menemukan tindakan solutif dan efektif agar dampak wabah Covid-19 dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian tidak mengganggu proses belajar mengajar sehingga hasil yang dicapai pada akhir tahun ajaran masih sesuai dengan standar kompetensi pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19 semua lembaga pendidikan diliburkan. Apa komentar Ibu?

Naradidik boleh diliburkan tetapi anggapan bahwa lembaga pendidikan diliburkan saat merebaknya wabah Covid-19 tentu kurang tepat. Sebagian besar lembaga pendidikan saat ini sedang berusaha tetap melaksanakan fungsinya di masa pandemi. Yang sedang dilakukan sektor pendidikan saat ini adalah sedang berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi.

Daerah yang memiliki sarana dan pra-

sarana untuk menjalankan proses belajar jarak jauh memang diharapkan bisa survive dalam mengisi tahun ajaran 2020/2021. Kita tahu pendidikan merupakan sektor yang sangat penting dalam mencetak SDM yang berdaya saing.

Mencetak SDM mesti didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan adaptasi peserta didik dan pengajar atau guru dan orang tua dengan cara belajar dalam situasi krisis. Pendidikan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi memang tak berjalan ideal, namun tetap sangat menentukan dalam keberhasilan proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 ini.

Lembaga pendidikan yang berpotensi diliburkan diperkirakan lembaga pendidikan yang berlokasi di daerah yang belum memiliki sarana dan prasarana untuk belajar jarak jauh, serta berada di zona penyebaran Covid-19 di luar zona hijau.

Di daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan ini seharusnya pemerintah segera mengintervensi agar persyaratan untuk menjalankan pendidikan jarak jauh (PJJ) bisa dipenuhi.

Kondisi itu tentu berpengaruh pada kenaikan kelas dan ujian kelulusan para siswa dan mahasiswa. Tampaknya kenaikan kelas dan kelulusan untuk tahun ini dirasakan hanya formalitas. Bagaimana menurut Ibu?

Dalam pendidikan tidak ada yang namanya formalitas. Covid-19 menuntut setiap sektor menyesuaikan cara belajar. Jika kenaikan kelas dan kelulusan hanya formalitas berarti seluruh proses belajar sebelum pandemi tak dianggap. Pola pikir kita pada pendidikan mesti diubah. Belajar bukan hanya di sekolah, sebab seluruh dinamika kehidupan adalah proses belajar. Artinya, kita mesti menyadari dampak Covid-19 terhadap kesehatan. Seremonial kenaikan kelas dan kelulusan adalah momen berharga, tetapi perlu ditiadakan atau diganti sesuai tuntutan kondisi.

Oleh karena itu, di awal tahun ajaran baru ini, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan bisa memformulasikan strategi agar *output-outcome* dari proses belajar di masa pandemi Covid-19 tidak jauh berbeda dengan hasil kelulusan di masa normal.

Ini juga berpengaruh pada mutu pendidikan. Bagaimana dengan mutu



pendidikan selama pandemi Covid-19 ini?

Sejauh ini memang belum ada hasil kajian tentang pengaruh pandemi Covid-19 terhadap mutu pendidikan nasional, karena pandeminya juga baru berlangsung lima bulan.

Tetapi sejumlah pihak memperkirakan proses adaptasi terhadap norma baru di masa pandemi sangat menentukan dalam menghasilkan mutu pendidikan nasional. Di masa normal saja perlu ada reformasi pendidikan nasional terkait kurikulum pendidikan harus bisa menjadi rujukan pedagogis yang mudah diimplementasikan oleh para guru di perkotaan hingga pelosok desa, kompetensi guru, infrastruktur pendidikan, termasuk akses jaringan. Mengapa? Sistem pendidikan nasional saat ini belum sepenuhnya mampu diakses semua siswa dari Sabang sampai Marauke.

Bila biasanya para orang tua menyerahkan



sempuhnya pendidikan anaknya kepada guru di sekolah, di masa pandemi Covid-19 ini peran orang tua akan sangat besar, karena kegiatan belajar dan mengajar dilakukan di rumah.

Peran baru orang tua, ketrampilan guru yang masih perlu ditingkatkan dalam beradaptasi dengan pola belajar jarak jauh ini bisa memengaruhi mutu pendidikan saat ini. Diperkirakan akan turun mutu pendidikan di masa pandemi, karena ada tahapan adaptasi dalam pola belajar dan mengajar.

Sekarang daerah zona hijau boleh melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Apa pendapat Ibu?

Keselamatan dan keamanan peserta didik dan guru adalah yang utama dalam berkegiatan di masa pandemi ini. Kegiatan tatap muka dalam proses belajar mengajar di zona hijau, menurut saya, tetap saja berisiko terhadap keselamatan peserta didik dan guru.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mesti mengevaluasi setiap keputusan. Jangan mengambil kebijakan beresiko. Kita berhadapan dengan virus yang belum ada penangkalnya. Ini mesti dipikirkan. Situasi belajar mesti aman, nyaman dan menyenangkan.

Apa saran dan masukan Ibu tentang dunia pendidikan nasional saat pandemi Covid-19 ini?

Berhadapan dengan wabah virus itu melawan ketidakpastian. Sejauh ini ketaatan dan disiplin pada protokol kesehatan adalah solusi untuk tetap berkegiatan. Terkait pendidikan, ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, metode belajar dalam kurikulum adaptif, kompetensi guru dan infrastruktur jaringan. Kedua, kesiapan psikologis naradidik, orang tua dan guru. Ketiga, kepemilikan fasilitas belajar dan akses jaringan.

Mungkin beberapa wilayah akan menerapkan kebijakan mulai belajar secara konvensional, yakni tatap muka walaupun beresiko. Namun, pendidikan jarak jauh masih pilihan beralasan dengan kekurangan yang harus segera diatasi agar kita tidak mengorbankan anak-anak kita. Setiap kebijakan dan keputusan kita hari ini berdampak pada masa depan kita. Kita mesti terbiasa dengan membangun pola pikir bahwa pendidikan/belajar bukan untuk sekolah saja tetapi untuk kehidupan. □

Sidang Tahunan MPR RI 2020

Presiden Jokowi Akan **Hadir Secara Fisik**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR RI sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat. Mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo memastikan Presiden Joko Widodo akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2020. Semula direncanakan penyampaian laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR RI. Namun, karena masih suasana pandemi maka format acara kembali seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus Kepala Negara, Presiden Joko Widodo nanti akan menyampaikan laporan tahunan lembaga-lembaga negara.

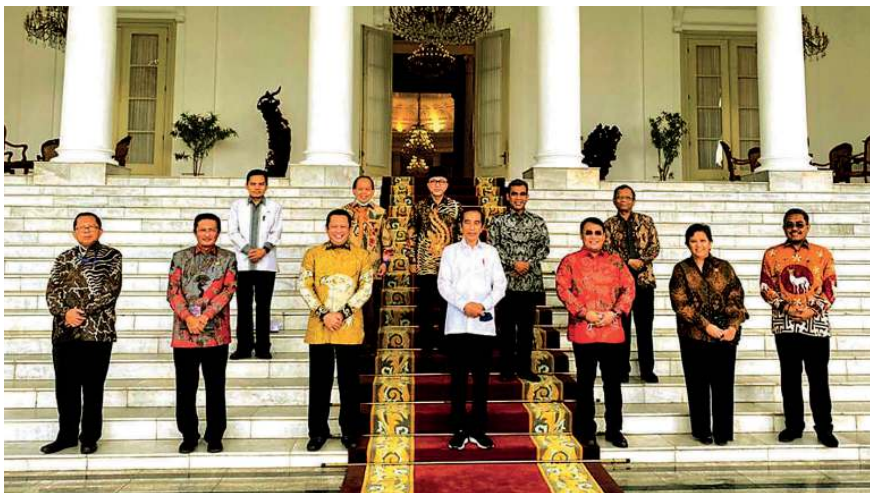
Protokol kesehatan akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI. Salah satunya dengan membatasi kehadiran fisik para anggota MPR RI dan tamu undangan. Anggota MPR RI yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual.

Kehadiran fisik Presiden Joko Widodo, menurut Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, sebagai wujud penghormatan terhadap

kedaulatan rakyat yang ditiptkan melalui MPR RI. Mengingat MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktifitas agenda kenegaraan. "Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," ujar Bamsuet usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).

Para Wakil Ketua MPR RI yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Mahfud, MD., Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Mantan Ketua DPR RI ini menyampaikan, MPR RI sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI di kala pandemi Covid-19 bisa berlangsung khidmat. Dari mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.



“Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran TV nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi

informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan

MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir. Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip *clean and good governance*. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.

“Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara,” pungkas Bamsoet. □

Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI

Format Sidang Tahunan MPR RI Disederhanakan

Karena suasana pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan maka Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Kelompok DPD menyepakati format Sidang Tahunan MPR RI 2020 disederhanakan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, jika situasi pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah, tahun ini akan digabung menjadi satu kesatuan dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Dengan demikian penyelenggaraan sidang akan lebih singkat, sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Sebenarnya ada keinginan kuat agar pasal 152 ayat (2) Tata Tertib MPR RI dilaksanakan dengan mendengarkan para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR tanpa diwakilkan oleh Presiden. Namun karena suasana pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan maka Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD untuk sementara menyepakati format sidang disederhanakan.

Sidang dibuka oleh Ketua MPR RI dan ditutup oleh Ketua DPR RI. Presiden Joko Widodo cukup satu kali pidato dan tak perlu naik turun podium seperti tahun-tahun

sebelumnya. Pidato presiden akan langsung mengupas tentang laporan tahunan lembaga-lembaga negara dan kepresidenan sekaligus penyampaian progres pembangunan daerah, dan pidato HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia. “Kita buat singkat,” ujar Bamsuet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI di MPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Rapat gabungan dihadiri para Wakil Ketua MPR RI: Ahmad Basarah, Arsul Sani, dan

Fadel Muhammad. Sedangkan Wakil Ketua MPR RI lainnya, yaitu: Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan hadir secara virtual. Hadir pula para pimpinan Fraksi MPR RI, antara lain TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Soepriyatno (Gerindra), Neng Eem Marhamah (PKB), Taufik Basari (Nasdem), Benny K. Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Ali Taher (PAN), Moh. Iqbal (PPP), Intsiawati Ayus (Kelompok DPD), serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.



Bambang Soesatyo



Lebih lanjut mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, mengingat situasi masih pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI akan membatasi kehadiran fisik anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, maupun para undangan. Bagi yang tak hadir secara fisik bisa hadir secara virtual.

“Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, Fraksi MPR RI, Fraksi DPR RI, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil

Presiden, Menteri Koordinator, Panglima TNI, dan Kapolri, serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden dan ketua partai politik. Sehingga ruang sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya akan terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak,” papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPP dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI juga akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020 di Gedung

Nusantara IV MPR RI. Jumlah undangan dibatasi tak sampai seratus orang, dari sebelumnya ribuan orang. “Undangan hanya untuk Ketua Lembaga Negara, pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Pimpinan Badan/Komisi, Menteri, Ketua BPIP, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Partai Politik, dan Ormas Lintas Agama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI juga memutuskan, peringatan HUT ke-75 MPR RI pada 29 Agustus 2020 akan dilakukan secara sederhana. Jika di tahun sebelumnya ada acara Jalan Sehat dan puncaknya kegiatan MPR Berdo’a Bersama di lapangan terbuka halaman gedung Parlemen, tahun ini ditiadakan mengingat pandemi Covid-19.

“Sebagai gantinya, MPR RI mengadakan Seminar Internasional yang bisa diikuti secara virtual oleh siapapun dari manapun. Seminar membahas tentang pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI. Sebagai bentuk menguatkan diplomasi internasional Indonesia di kancah dunia. MPR RI akan menghimpun parlemen dengan sistem yang sama dari berbagai negara untuk saling meningkatkan kerjasama,” pungkas Bamsoet. □



Majelis Syuro Dunia

Presiden Joko Widodo Mendukung Pembentukan Majelis Syuro Dunia

Majelis Syuro Dunia akan menjadi wadah berhimpun MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama, khususnya negara-negara berpenduduk muslim di dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, Presiden Joko Widodo mendukung pembentukan Majelis Syuro Dunia atau *World Consultative Assembly* yang digagas MPR RI. Salah satu tujuan Majelis Syuro Dunia atau *World Consultative Assembly* adalah untuk mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam yang harmonis, damai, dan berkeadaban.

“Presiden Joko Widodo mendukung penuh upaya MPR RI membentuk Majelis Syuro Dunia atau *World Consultative Assembly*,” ungkap Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo. Majelis Syuro Dunia akan menjadi wadah berhimpun MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama, khususnya negara-negara berpenduduk muslim di dunia.

“Dukungan Presiden Joko Widodo akan lebih memacu semangat MPR RI agar dapat

mendeklarasikan berdirinya Majelis Syuro Dunia pada Agustus 2021,” ujar Bamsuet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).

Dalam pertemuan itu hadir pula, antara lain: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolkam Mahfud, MD., Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, Majelis Syuro Dunia juga akan menginisiasi terbentuknya Bursa Efek Syariah Dunia (*Global Syariah Stock Exchange*). Bursa Efek Syariah Dunia akan menjadi jawaban atas kondisi karut marut perekonomian global akibat terlalu lama dirundung kapitalisme dan liberalisme.

Dengan terwujudnya *Global Syariah Stock Exchange*, sekaligus akan mewujudkan *Islamic Capital Hub* di Industri pasar modal dunia. Sebagai awalan, Bursa Efek Syariah Dunia bisa melibatkan berbagai bursa ternama, seperti *Malaysian Islamic Capital Markets*, Bursa Istanbul, maupun *Dubai Financial Market*. “Gagasan ini perlu dikaji dan didalami lebih jauh oleh berbagai pakar ekonomi dari berbagai negara dunia yang difasilitasi oleh Majelis Syuro Dunia (*World Consultative Assembly*),” urai Bamsuet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini meyakini, parlemen dari masing-masing negara punya peran besar dalam mendorong pemerintahan di masing-masing negaranya agar melepaskan diri dari jerat kapitalisme yang mencekik. Dengan mengedepankan industri keuangan syariah, selain terhindar riba juga akan menjadikan para pelaku

ekonomi tak berspekulasi terhadap mata uang.

“Sederhananya, uang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sektor riil, bukan semata untuk kepentingan spekulasi yang akhirnya membuat ekonomi liberal rentan dengan krisis. Seperti yang kini sedang terjadi, perang dagang Tiongkok- Amerika, namun yang kena getahnya seluruh negara dunia. Hal ini lantaran tatanan ekonomi dunia

tak seimbang,” tandas Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, melalui Majelis Syuro Dunia diharapkan juga bisa mewujudkan pusat referensi produk halal dunia (World Hub of Halal). Sehingga penduduk muslim dunia tak perlu khawatir terhadap kepastian serta ketersediaan makanan dan minuman halal.

Memajukan penduduk muslim melalui berbagai produk maupun industri berbasis

syariah, jelas Bamsuet, bukanlah untuk memusuhi penduduk agama lain. Melainkan sebagai alternatif jalan keluar atas kondisi dunia yang sudah karut marut akibat terlalu lama dirundung kapitalisme dan liberalisme.

“Wajah dunia harus diubah menjadi saling tolong-menolong, solidaritas antarmanusia, yang memberikan kesempatan kepada siapapun menggapai kesejahteraan dan kemakmuran,” pungkash Bamsuet. □

Ekspor Benih Lobster

Upaya Menyejahterakan Nelayan

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendukung langkah pemerintah yang membuka keran ekspor benih lobster. Kebijakan itu akan membantu pendapatan para nelayan.

SEMUA kebijakan pemerintah itu harus pro dan menguntungkan masyarakat. Dan, keputusan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster itu bagus untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Apalagi ada kebutuhan pasarnya. Itu harus dilayani,” kata Fadel kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Indonesia Bersatu itu mengatakan, upaya pemerintah yang melegalkan kembali ekspor benih lobster itu merupakan keputusan berani. Meski terjadi perbedaan pendapat, tapi keputusan itu merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan.

Di sisi lain, lanjut mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini, kebijakan itu juga mendorong terciptanya budidaya lobster nasional, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia, terutama masyarakat di daerah pesisir.

“Lewat Permen KKP Nomor 12, KKP juga ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam budidaya lobster. Eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster,” katanya.

Tak hanya itu, kebijakan memperbolehkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ekspor benih lobster juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah pandemi Covid-19. Sebab, setiap ekspor ada pajaknya. “Tiap benih yang ditangkap ada nilai ekonomi. Tiap budidaya membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Sekalipun begitu, Fadel mengingatkan agar kebijakan itu harus tetap diawasi bersama. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir benih lobster adalah harus memiliki kegiatan budidaya lobster. Tidak hanya itu, eksportir juga disyaratkan sudah berhasil melakukan kegiatan budidaya lobster di dalam negeri, dan sudah panen

secara berkelanjutan.

Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melegalkan kembali ekspor benih lobster yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Selain tentang ekspor benih lobster, aturan itu juga mendorong adanya budidaya lobster.

Namun, kebijakan ini menuai pro-kontra. Salah satu yang mengeritikanya adalah bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menilai keputusan Edhy itu akan berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati. □

Masih RUU Haluan Ideologi Pancasila

Cabut dari Prolegnas 2020

Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai badai penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menuntut RUU itu dicabut dari prolegnas.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) membuat suhu politik Indonesia menghangat. Di mana-mana masyarakat menolak RUU usulan inisiatif DPR RI ini. Berbagai elemen masyarakat juga mendesak agar RUU HIP segera dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bukan hanya dicabut dari Prolegnas 2020, tapi juga dari Prolegnas Long List 2020-2024.

Puncak penolakan terhadap RUU HIP terjadi pada Kamis (16/7). Ribuan massa melakukan unjuk rasa di depan Gedung Parlemen, Jakarta. Aksi demonstrasi ini dilakukan bersamaan dengan digelarnya Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang, dan penyerahan RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) oleh pemerintah diwakili oleh Menkopolkum Mahfud, MD., kepada Pimpinan DPR.

Menyinggung, meningkatnya suhu politik akibat munculnya RUU HIP, Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mendesak Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang yang digelar Kamis (16/7/2020) itu

memutuskan, penghentian pembahasan RUU HIP. Karena penghentian pembahasan RUU HIP sejalan dengan komitmen Pimpinan DPR yang disampaikan saat menerima delegasi pimpinan pengunjung rasa tolak RUU HIP. Apalagi, sidang paripurna itu telah memiliki agenda merespons perkembangan penolakan publik terhadap RUU HIP.

“Semakin banyak penolakan dari masyarakat dan adanya kegaduhan akibat RUU HIP dengan sejumlah ketentuannya yang kontroversial ini seharusnya sudah bisa menjadi alasan bagi DPR – bersama dengan pemerintah – untuk bersikap resmi menghentikan pembahasan dan bahkan mencabut RUU HIP dari Prolegnas Prioritas 2020 maupun Prolegnas Long List 2020-2024,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (15/7).

Hidayat menyangkan hasil rapat Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah yang telah menarik 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, tetapi tidak ada RUU HIP dari daftar RUU yang ditarik tersebut. Padahal, penolakan terhadap RUU ini sudah

sangat masif dilakukan oleh berbagai elemen bangsa, mulai dari ormas keagamaan, Pemuda Pancasila hingga Legiun Veteran.

Sayangnya, aspirasi mereka belum didengarkan secara seksama oleh DPR RI.

Dan, suara dan aspirasi mereka juga sudah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah (diwakili Menkumham) serta DPD, agar tripartit ini menyepakati untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan menariknya dari Prolegnas” ujarnya.

Selain Pimpinan DPR sudah berkomitmen secara terbuka kepada pimpinan Ormas yang berdemonstrasi untuk menghentikan pembahasan RUU HIP, Menkopolkum juga secara lisan pernah menyatakan, pemerintah tidak setuju dengan RUU HIP bermasalah ini. “Jadi, apalagi yang mau ditunggu?” ungkap Hidayat Nur Wahid, seraya mengingatkan agar Pemerintah dan DPR tidak lagi jatuh pada lubang yang sama ketika RUU HIP ini diloloskan menjadi RUU usul Inisiatif DPR.

“Ketika RUU ini dibahas sudah diingatkan oleh FPKS di Baleg terkait beberapa konten yang bermasalah. Lalu, tidak dihiraukan sehingga dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Di Rapat Paripurna, penolakan dari Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat juga diabaikan, sehingga akhirnya menjadi kontroversi ketika isi dari RUU itu sampai ke masyarakat luas,” ujarnya.

Sebagai informasi, beberapa konten dalam RUU HIP yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, di antaranya tidak diakomodasikannya TAP MPRS XXV/1966 yang mengatur larangan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu konten lainnya, Pancasila diperas menjadi Trisila dan diperas lagi menjadi Ekasila, hingga banyak ketentuan (pasal) yang ada di RUU HIP tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya, soal “Ketuhanan” tidak sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila. Juga visi

dan ciri manusia Pancasila tak sesuai dengan Pancasila 18 Agustus 1945.

“Lebih baik apabila DPR dan Pemerintah sepakat merespon kritik serta masukan

publik yang begitu banyak untuk menghentikan pembahasan RUU HIP, bahkan mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas, agar kontroversi ini berhenti. Dengan begitu

kepercayaan rakyat serta marwah DPR dapat terselamatkan,” ujar Hidayat Nur Wahid. □

MBO

Iuran BPJS Kesehatan

Di Masa Pandemi Covid-19 Iuran Naik Lagi

Langkah menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan terkesan tidak menghormati putusan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang bersifat final dan mengikat.

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan keputusan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang nyaris dua kali lipat dari besaran iuran awalnya. Pasalnya, di tengah situasi krisis akibat Pandemi Covid-19, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin mempersulit dan membebani rakyat.

Iuran BPJS Kesehatan yang naik kembali tertanggal (1/7/2020) menyiratkan kurang matangnya langkah pemerintah dalam mengatasi masalah BPJS. Sebab, persoalan defisit BPJS Kesehatan bukan hanya menyangkut iuran, tetapi juga tata kelola. Puskesmas dan klinik sebagai faskes tingkat I tidak mampu menurunkan tingkat rujukan ke faskes tingkat selanjutnya, sehingga 85% pembiayaan BPJS Kesehatan lari ke rumah sakit.

“Hal inilah yang menyebabkan pembengkakan pembiayaan BPJS sehingga menimbulkan defisit. Menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak menjawab persoalan utama yang dialami oleh BPJS Kesehatan yakni tata kelola yang kurang baik. Kenaikan ini malah akan menimbulkan masalah baru di tengah situasi genting akibat Pandemi Covid-19,” ungkap Syarief Hasan.

Bukan hanya itu, langkah pemerintah menaikkan kembali BPJS Kesehatan menyiratkan kurangnya komitmen pemerintah dalam penghormatan hukum di Indonesia. Perlu diketahui, pada (9/3/2020), Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menggugat Perpres No.75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, berdasarkan putusan MA, iuran BPJS Ke-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sehatan kembali seperti semula.

Namun, pemerintah melalui Perpres No.64 Tahun 2020 kembali menaikkan iuran tersebut. Angka kenaikannya pun tidak jauh berbeda dengan kenaikan yang dibatalkan oleh MA. Sehingga, langkah yang diambil tersebut terkesan tidak menghormati putusan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang bersifat final dan mengikat. “Pemerintah harusnya memberikan keteladanan dengan menghormati putusan MA dan memerhatikan aspirasi dan harapan rakyat Indonesia”, ujarnya

Syarief Hasan mengingatkan kembali pemerintah terkait Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Saat ini, banyak warga masyarakat kehilangan pekerjaan dan kesulitan hidup. Negara berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah semakin membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” kata Syarief Hasan.

Ia mendorong pemerintah untuk mencabut Perpres No.64 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 5 Mei 2020 yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Pemerintah harus membuat kebijakan yang pro rakyat Indonesia, bukan kebijakan yang kontra-produktif. Terutama di masa pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan akhinya. Wujudkan amanat Pancasila dengan kehadiran negara untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tutup anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. □

Silaturahmi dengan Bupati Cianjur

Pimpinan MPR Minta Daerah Tingkatkan Potensi Wisata

Peningkatan pengelolaan wisata daerah akan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BANGSA Indonesia dianugerahi kekayaan berupa pesona keindahan alam yang sangat luar biasa dan diakui dunia. Sebut saja keindahan alam laut pantai Bali yang pamornya sudah sangat tersohor dan menjadi salah satu destinasi wisata paling favorit di dunia.

Tumbuh dan majunya pengelolaan wisata

di Bali berdampak baik, antara lain bertambahnya pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat. Usaha-usaha menengah dan kecil, seperti kerajinan tangan membuat souvenir untuk para wisatawan, produksi berbagai model pakaian, jasa *tour guide* atau penyewaan perahu, kapal, dan sebagainya tumbuh

subur bahkan menjadi tumpuan utama bagi kehidupan masyarakat Bali.

Selain Bali, banyak daerah lainnya juga memiliki potensi wisata luar biasa jika dikelola dengan serius dan baik. Untuk itu, Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mendorong dan meminta agar daerah lebih meningkatkan lagi potensi wisata daerahnya.



Hal tersebut sangat penting, sebab banyak sekali daerah-daerah memiliki potensi wisata, terutama wisata alam yang sangat bagus namun belum dikelola maksimal.

Syarief Hasan memberikan contoh, daerah wisata situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur yang memiliki potensi sangat luar biasa. Bahkan, banyak mendapatkan perhatian wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Dengan pengelolaan yang baik, sangat menguntungkan daerah.

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar pemerintah daerah melihat potensi wisata tersebut dengan lebih serius. "Sayang sekali potensi besar tapi minim pengelolaan," katanya usai melakukan kunjungan silaturahmi

dengan Plt.Bupati Cianjur, Herman Suherman, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (26/6/2020).

Syarief Hasan melihat, ada kendala yang mesti diperhatikan dalam pengelolaan obyek wisata seperti situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur tersebut. Yaitu, masalah koordinasi yang tumpang tindih, antara kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan kabupaten. "Saya berharap agar ada koordinasi yang baik antara pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga daerah Cianjur menjadi lebih terkenal. Semua itu kembali ke rakyat. Saya rasa, jika digarap serius maka obyek wisata Gunung Padang akan menyamai Borobudur, bahkan lebih," ujarnya.

Jika koordinasi sudah baik, lanjut Syarief Hasan, dan potensi wisata sudah berkembang, maka hal selanjutnya yang mesti dipikirkan dan dilakukan adalah membuat terobosan-terobosan berupa obyek wisata baru yang menarik wisatawan. Salah satunya adalah wisata balon udara, sehingga para wisatawan bisa menikmati view Cianjur dari udara.

"Saya berharap, daerah-daerah lain yang memiliki potensi wisata daerah yang bagus juga melakukan hal serupa. Jika ini terjadi maka rakyat seluruh wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan kesejahteraan," ucapnya. □

DER

Webinar online DPP Partai Demokrat

Pancasila Sudah Final Sebagai Dasar dan Ideologi Negara

Indonesia sudah sejak lama memiliki Pancasila yang mampu menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

INDONESIA adalah negara yang terdiri dari berbagai perbedaan, mulai dari perbedaan agama, kepercayaan, ras, kebudayaan, adat istiadat dan bahasa, namun meski berbeda semuanya sepakat bersatu di dalam sebuah negara bernama Republik Indonesia. Dan luar biasanya, negara Indonesia tetap bertahan terus hingga kini.

Bersatu dalam perbedaan tersebut tidak lain karena direkatkan oleh Pancasila sebagai ideologi yang menjadi kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, tanpa Pancasila tidak ada sebuah bangsa dan negara bernama Indonesia.

Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan sangat tegas mengatakan bahwa Pancasila bagi rakyat Indonesia sudah final sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai panduan rakyat Indonesia dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak.

"Jika didalami, isi tertuang dalam Pancasila merupakan jati diri dan karakter bangsa In-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

donesia. Seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna, setiap diri rakyat Indonesia adalah sosok yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun agama dan kepercayaan berbeda, namun saling menghormati dan bersatu dalam kebhinnekaan," ujarnya.

Pandangan tersebut disampaikan Syarief

Hasan di acara webinar virtual Silaturahmi Kebangsaan dengan tema: 'Agama dan Pancasila Dalam Merawat Kebhinnekaan' DPP Partai Demokrat, bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Cianjur, Jumat (26/6/2020).

Bagi Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini, Pancasila sudah final dan diterima seluruh



rakyat Indonesia, yang implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan perhatian. “Sudah saatnya kita fokus melakukan

upaya-upaya dalam pengamalan Pancasila, mulai dari diri masing-masing,” tegasnya.

MPR RI sendiri, lanjut Syarif Hasan, juga melakukan upaya-upaya pemahaman dan

implementasi Pancasila melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di berbagai daerah di Indonesia. “Upaya-upaya pemahaman dan upaya implementasi Pancasila sangat penting untuk membentengi bangsa ini dari upaya-upaya pelemahan Pancasila dan usaha-usaha untuk mengganti Pancasila,” tambahnya.

Pada intinya, Syarif Hasan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan panduan falsafah Pancasila yang sudah final. “Pancasila sudah terbukti selama ini mampu menjaga bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan berat, baik dari dalam maupun luar. Dengan Pancasila, insya Allah, kita seluruh rakyat Indonesia bisa membawa bangsa ini lebih bagus lagi ke depan,” tandasnya. □

DER

Kunker Cianjur

Serap Aspirasi di Universitas Suryakencana

Serap aspirasi masyarakat dengan sasaran kalangan akademisi pertama kali dilakukan Wakil Ketua MPR Syarif Hasan di era new normal.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan melakukan kunjungan silaturahmi ke Universitas Suryakencana (Unsur) Cianjur dengan maksud melakukan diskusi dengan Rektor dan para dekan tentang kebangsaan dan isu-isu nasional. Kunjungan yang dilakukan pada Sabtu, (27/6/2020), itu merupakan lokasi kedua setelah sebelumnya melakukan silaturahmi dengan Plt. Bupati

Cianjur di rumahnya dinasnya.

Rangkaian kunjungan kerja Syarif Hasan ke Cianjur, Jawa Barat, ini terkait dengan upaya serap aspirasi masyarakat. Di Unsur, Syarif Hasan melakukan di Aula Gedung Pertemuan Unsur, dihadiri Rektor Unsur, Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, dan para dekan dari berbagai fakultas. Dalam diskusi itu, Syarif Hasan menjelaskan bahwa kegiatan

serap aspirasi masyarakat dari kalangan akademisi kampus sangat penting. Sebab, kalangan akademisi memiliki pola pikir dengan intelektualitas tinggi dalam membahas berbagai persoalan, terutama tentang kenegaraan.

“Sebelum pandemi Covid-19 ada, saya sudah melakukan diskusi dan serap aspirasi, terutama soal Empat Pilar MPR, dengan para



akademisi dari sekitar 17 perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, hingga Kalimantan. Setelah Kalimantan tiba-tiba Covid-19 muncul, terpaksa kegiatan silaturahmi dan serap aspirasi ditunda. Hari ini, di Unsur, adalah hari pertama saya melakukan silaturahmi dan serap aspirasi langsung dengan kalangan akademisi,” ungkapnya.

Dalam pengantar diskusi, Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa ada beberapa isu kenegaraan yang menjadi sorotan di tengah masyarakat, salah satunya tentang perlu atau tidaknya amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ada beberapa pendapat berbeda dari elemen masyarakat terkait hal tersebut. Antara lain, satu sisi setuju dilakukan amandemen namun terbatas hanya untuk memasukan GBHN dalam UUD.

Alasannya adalah karena saat ini program-program pembangunan, baik daerah maupun nasional merupakan visi dan misi masing-masing para pemimpin daerah dan nasional yang terpilih melalui pilkada dan pilpres. Hal tersebut akan menghilangkan prinsip kesatuan program antara pusat dan daerah, serta tidak adanya kontinuitas arah pembangunan nasional, karena pergantian pemimpin akan mengubah arah pembangunan.

Sedangkan di sisi lainnya, ada elemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masyarakat yang menginginkan tidak ada lagi amandemen UUD, dengan berbagai argumentasi. “Terkait isu tersebut, MPR periode 2019-2024 menerima amanah dari MPR periode lalu untuk melakukan pendalaman. Kami kemudian melakukan pendalaman dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia dalam bentuk serap aspirasi. Hasil serap aspirasi tersebut akan menjadi catatan di MPR, yang kemudian menjadi bahan kajian agar wacana besar tersebut menjadi sebuah kebijakan yang diterima seluruh rakyat,” terangnya.

Apa yang disampaikan oleh Syarief Hasan mendapatkan respon luar biasa dari para akademisi Unsur. Salah satunya dari Prof. Dr. Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, Dekan Pascasarjana Ilmu Hukum, yang mengatakan bahwa mengamandemen kembali UUD tidak diperlukan. Menurut Prof. Ahmad Hunaeni, perlu dilakukan adalah menjalankan amandemen yang sudah dilakukan. “Amandemen UUD yang sudah dilakukan mesti dipastikan sudah dilaksanakan atau belum, itu yang mesti difokuskan sekarang ini,” katanya. □

DER

Kunjungan Dubes Qatar

Bamsoet Minta Investasi Qatar Ditingkatkan

Ketika menerima kunjungan Duta Besar untuk Indonesia Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti, Selasa (14/7/2020), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan tamunya berbicara masalah investasi, selain menyampaikan tentang gagasan MPR RI membentuk Majelis Syuro Parlemen Dunia.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, untuk lebih menarik investor dari berbagai negara, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan berbagai kemudahan. Baik dari segi perizinan maupun keringanan perpajakan. Kesemuanya akan terangkum dalam RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi akan disahkan.

“Melalui investasi, Indonesia ingin menjalin

kerjasama yang lebih erat dengan berbagai negara, termasuk Qatar,” ujar Bamsoet saat bertemu Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Sejak 2011, jelas Bamsoet lebih lanjut, Qatar tercatat menjadi negara berpenduduk muslim terkaya dunia dengan pendapatan

per kapita per tahun mencapai USD 93.965 dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai USD 210.002. Membuat ekspansi investasi Qatar ke berbagai negara juga sangat agresif. “Indonesia siap menampung investasi dari Qatar,” ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Untuk itu, Bamsoet mendorong peningkatan investasi Qatar di Indonesia. Pada 2019, melalui *Qatar Investment Authority* (QIA), Qatar sudah mengalokasikan USD 500 juta, antara lain untuk pengembangan investasi di Labuan Bajo yang mencapai USD 100 juta. Investasi lainnya dalam kerjasama PT PLN dan PT PJB dengan Nebras Power untuk pembangunan PLTGU 800 MW dengan nilai investasi mencapai USD 1 miliar.

“Selain masalah investasi, kita juga sampaikan MPR RI sedang menggagas pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia (*World Consultative Assembly*) sebagai wadah berhimpunnya parlemen negara berpenduduk mayoritas muslim menggalang kerjasama di berbagai bidang. Semangat ukhuwah Islamiyah selain harus diterapkan dalam hubungan kemanusiaan, juga harus diwujudkan dalam hubungan parlemen antarnegara,” urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga meminta agar jaringan stasiun TV Aljazeera yang berbasis di Doha, Qatar, bisa berimbang dalam meliput pemberitaan tentang Indonesia. Khususnya, mengenai kondisi di Papua dan Papua Barat. Adagium “bad news is good news” juga harus didasarkan pada objektivitas pemberitaan dan keseimbangan dalam menggali sumber pemberitaan.

“Hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Qatar sejak 1976 harus tetap terjaga. Dalam penandatanganan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) antara US dan Taliban di Doha, Qatar, Indonesia melalui Menlu RI diundang untuk menyaksikan penandatanganan CPA tersebut. Menunjuk-



kan bahwa antara Indonesia dan Qatar selalu bekerjasama menciptakan perdamaian,” tegas Bamsuet.

Diakhir pertemuan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menyempatkan diri nge-vlog bareng Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Ms. Fawziya Edrees Salman Al-Sulaiti. Memanfaatkan media sosial *youtube*, merupakan gaya baru Bamsuet dalam

diplomasi internasional menguatkan posisi Indonesia di kancah dunia. Termasuk mengenalkan Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat dunia.

“Duta Besar Qatar Ms. Fawziya yang baru satu bulan bertugas di Indonesia sangat terkesan dengan penduduk Indonesia yang ramah. Beliau merasa nyaman berada di sini. Sikap ramah tamah pen-

duduk Indonesia tentu tak lepas dari akar budaya dan kearifan lokal. Sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, mari kita jaga kondusifitas bangsa. Sebagai penduduk muslim terbesar dunia, mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah wujud nyata dari Islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin, kasih sayang bagi semesta alam,” pungkas Bamsuet. □

Program Food Estate

Kementerian Pertahanan Menjadi Leading Sector

Untuk melaksanakan program food estate, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan meminta pemerintah berhati-hati. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mendorong pemerintah untuk membuat kalkulasi dan pertimbangan matang terkait rencana pelaksanaan program food estate di Kalimantan Tengah. Peralpnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah beberapa kali melaksanakan program food estate tetapi hasilnya nihil.

Apalagi, pemerintah telah memastikan bahwa program food estate akan dilaksanakan di eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalimantan Tengah. Lahan ini pernah dikembangkan di masa Pemerintahan Soeharto akan tetapi gagal. Eks PLG ini hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan kerugian negara.

“Dulunya, di eks PLG Kalimantan Tengah tersebut dilakukan pembukaan lahan

sebanyak satu juta hektar. Lahan ini dibuka dengan mengubah lahan gambut dan rawa menjadi sawah yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Pemerintah harus belajar dari kejadian masa lalu agar tidak terulang kembali,” ungkap Syarif Hasan.

Berdasarkan ulasan dari Kaprodi S3 Ilmu Teknik Pertanian Universitas Gadjadara pun menyebutkan bahwa eks PLG yang dulunya rawa dan lahan gambut sangat rapu dan heterogen. Lahan ini termasuk lahan sub-optimal yang telah mengalami degradasi selama 25 tahun, sejak dibuka pertama kali yang membuat kesuburan tanah menurun dan tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal..

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini meminta pemerintah untuk lebih berhati-hati.

“Pemerintah harus melakukan kajian mendalam, berkoordinasi dengan pakar dan akademisi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama seperti terjadi pada Food Estate dan peretakan 1,2 juta hektar sawah di Merauke”, ungkapnya.

Anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan ini juga mempertanyakan langkah pemerintah menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai leading sector program food estate tersebut bukan tupoksinya Kementerian Pertahanan. “Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara. Apalagi, akhir-akhir ini, perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara,” ujar Syarif.

Ia juga berpandangan bahwa Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Menurut Syarif Hasan, Kementerian Pertanianlah yang seharusnya menjadi leading sector. Sebab, Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

“Bekerjasama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya,” kata Syarif Hasan. Namun, tambah Syarif Hasan, bila pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Leading sector-nya maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. □

Pembebasan PMI Eti Binti Toyib Anwar

Satu Nyawa WNI Sangat Berharga

Satu nyawa warga negara Indonesia sangat berharga. Menyelamatkan satu jiwa warga negara Indonesia sama seperti menyelamatkan kita semua.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid menyambut kedatangan Eti Binti Toyib Anwar, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka, yang dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan dan bebas dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Eti tiba di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Senin sore (6/7/2020).

“Alhamdulillah di masa pandemi Covid-19 yang memakan banyak korban meninggal dunia, tapi ada satu jiwa yang bisa kita selamatkan. Satu nyawa warga negara Indonesia sangat berharga. Menyelamatkan satu jiwa warga negara Indonesia sama seperti menyelamatkan kita semua. Itulah inti kemanusiaan,” kata Jazilul Fawaid usai bertemu dengan Eti Binti Toyib, di Ruang VIP Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore (6/7/2020). Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdani, juga ikut menyambut kedatangan Eti Binti Toyib.

Eti Binti Toyib bisa bebas dari hukuman mati setelah Pemerintah Indonesia dengan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dan PKB, membayarkan diyat (uang darah) yang diminta keluarga majikan. “Ini hukum di Arab Saudi. Qishash itu hukum nyawa dengan nyawa. Tapi bisa dilakukan dengan membayar diyat, pihak keluarga yang dibunuh memberikan pemaafan,” jelas Jazilul yang akrab disapa Gus Jazil.

Gus Jazil mengungkapkan, semula ahli waris majikanya meminta diyat yang tinggi sekali, sebesar 30 juta real atau Rp 107 miliar sebagai syarat pengampunan kepada Eti dan tidak dieksekusi hukuman mati. Tetapi dengan berbagai pendekatan akhirnya ahli waris bersedia menerima diyat sebesar Rp 15,2 miliar. Untuk membayar diyat guna membebaskan Eti Binti Toyib dari ancaman hukuman mati diinisiasi oleh teman-teman PKB bersama LAZISNU sejak dua tahun lalu. Kasus Eti sendiri terjadi sejak 2001 dan ia

pun sudah menjalani masa penahanan selama 19 tahun.

“Karena itu kami dari Pimpinan MPR selalu mengajak untuk mengedepankan kemanusiaan dan kegotongroyongan di semua situasi kepada siapapun. Apalagi ini adalah pejuang devisa yang bekerja di luar negeri. Ibu Eti bekerja hanya 1 tahun 8 bulan, tapi dipenjara 19 tahun. Ini tidak boleh terulang lagi kepada warga kita, saudara kita yang berjuang di luar negeri tapi kemudian terkena kasus,” kata Koordinator Nasional Nusantara Mengaji ini.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, masih ada PMI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. “Tapi pesannya adalah bahwa siapapun dan apapun atas nama kemanusiaan tidak boleh ada warga kita yang kemudian dihukum pancung atau dihukum mati untuk kasus yang memang belum clear seperti Ibu Eti ini,” katanya.

Sementara itu, Eti Binti Toyib mengucapkan rasa syukur setelah bebas dari hukuman dan kembali ke Tanah Air. “Alhamdulillah bisa bebas dari hukuman. Saya mengucapkan



terima kasih atas dukungan semuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk semua. Saya cuma bisa berdoa,” tuturnya.

Ia mengaku sangat senang dan bahagia bisa kembali ke Indonesia. “Yang paling dirindukan adalah kembali ke Tanah Air,” ucapnya. Itu terjadi setelah 19 tahun dipenjara. Dan, selama menjalani hukuman, Eti Binti Toyib mengaku, banyak melakukan kegiatan menghafal Al qurán, selain melakukan pekerjaan lainnya. Ia juga mengaku tidak ingin kembali lagi menjadi PMI. “Ya tidaklah, sudah tua begini. Sudah dipenjara. Kapok,” ujarnya.

Mengenai tuduhan meracuni majikannya, Eti mengaku, tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan itu. “Majikan saya itu pergi

ke Jeddah naik mobil sendiri. Paginya sarapan bersama istrinya. Malamnya makan di restoran. Saya nggak merasa bersalah. Sampai di pengadilan saya ditanya-tanya dan akhirnya dihukum mati. Saya tetap sabar aja. Biar nanti Allah yang menjawab itu semua,” ujarnya.

Gus Jazil menceritakan kronologis kasus yang dialami perempuan asal Desa Cidapad, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, itu. Eti Toyib Anwar divonis hukuman mati qishash berdasarkan Putusan Pengadilan Umum Thaif No. 75/17/8 pada 22/04/1424H (23/06/2003M) yang telah disahkan oleh Mahkamah Banding dengan Nomor 307/Kho/2/1 tanggal 17/07/1428 dan telah disetujui Mahkamah Agung dengan No: 1938/

4 tanggal 2/12/1429 H karena terbukti membunuh majikannya warga negara Arab Saudi, Faisal bin Said Abdullah Al Ghamdi, dengan cara diberi racun.

Tiga bulan setelah Faisal Bin Said Abdullah Al Ghamdi meninggal dunia, seorang WNI bernama EMA atau Aminah (pekerja rumah tangga di rumah sang majikan) memberikan keterangan bahwa Eti Toyib telah membunuh majikan dengan cara meracuni. Pembicaraan tersebut direkam oleh seorang keluarga majikan. Rekaman tersebut diperdengarkan oleh Penyidik saat menginterogasi Eti Toyib Anwar pada Tanggal 16/1/2002 malam silam, yang mengakibatkan adanya pengakuan Eti Toyib bahwa yang bersangkutan telah membunuh majikan.

Dalam proses pembebasannya, Pemerintah Indonesia dengan dukungan berbagai pihak akhirnya Eti bisa bebas dari hukuman mati dengan patungan membayar uang denda sebesar Rp15,2 miliar. Kasus Eti sendiri terjadi sejak 2001 dan ia pun sudah menjalani masa penahanan selama 19 tahun. “Jadi ini prosesnya sangat panjang,” kata Gus Jazil.

Sebelumnya, Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, dana sebesar Rp15,2 miliar tersebut dihimpun oleh LAZISNU selama 7 bulan dari para dermawan santri, dari kalangan pengusaha, birokrat, politisi, akademisi, dan komunitas filantropi, termasuk dari Pemprov Jawa Barat. □

BSC



MPR Peduli Lawan Covid-19

Bagikan Asuransi, Partisi Portable, dan Sembako

Bantuan partisi portable merupakan penyekat antara pengemudi dan penumpang yang fungsinya agar pengemudi Ojol (Ojek Online) tidak terkena droplet (titik air berisi virus dari batuk dan bersin) dari penumpang.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MPR sebagai Rumah Kebangsaan dalam program MPR Peduli Lawan Covid-19 bersama Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan Empat Pilar kembali melakukan gerakan sosial membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, salah satunya bantuan sosial kepada pengemudi Ojek Online (Ojol). Selain memberikan paket sembako untuk pengemudi Ojol, juga diberikan partisi portable dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan secara gratis.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyerahkan secara simbolik bantuan paket sembako, partisi portable, dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol di Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Sabtu (27/6/2020). Untuk tahap pertama diserahkan kepada 200 pengemudi Ojol yang hadir. Penyerahan

bantuan kerjasama dengan Gerak BS dan Garda (Gabungan Aksi Kendaraan Roda Dua), yaitu organisasi yang menghimpun para pengemudi Ojol, selain dihadiri Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dan Lestari Moerdijat, juga dihadiri Ketua Garda Igun Wicaksono, Ketua Umum dan Sekjen Gerak BS Aroem Alzier dan Ratu Dian.

Bantuan partisi portable merupakan penyekat antara pengemudi dan penumpang yang fungsinya agar pengemudi Ojol tidak terkena droplet (titik air berisi virus dari batuk dan bersin) dari penumpang. “Kepada para Ojol kita berikan partisi portable atau penyekat antara pengemudi dan penumpang. Ini merupakan upaya untuk memperkecil penularan Covid-19 dari penumpang ke pengemudi. Ini menjadi bagian dari sebuah adaptasi kebiasaan baru atau AKB yang harus dilaksanakan secara terukur dengan

tingkat disiplin yang tinggi,” kata Bamsuet.

Selain memberikan partisi portable, pada saat yang sama juga diluncurkan Garda Digital. “Ini adalah Ojol Digital yang bisa diakses publik. Jadi, ketika diantar Ojol, kita sudah mengetahui profil pengemudinya sehingga tidak perlu khawatir atau perlu dilacak. Ketika diantar Ojol, kemudian Anda sakit dan masuk rumah sakit maka bisa dilacak siapa yang mengantarkan dan kapan, karena datanya sudah cukup lengkap,” jelas Bamsuet.

Secara simbolis, Bamsuet juga menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi Ojol. Pada tahap pertama, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada 200 pengemudi Ojol. Nilai premi sebesar Rp 16.800 per bulan. Sedangkan tanggungan asuransi jiwa yang diberikan antara lain, jika meninggal dalam keadaan biasa (tidak bekerja) sebesar Rp



42 juta, meninggal ketika sedang bekerja mendapat tanggungan asuransi Rp 72 juta ditambah beasiswa sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak, biaya sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Sedangkan bila mengalami kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit maka biaya pengobatan dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Selama tiga bulan pengemudi Ojol gratis membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulan karena kami yang tanggung. Mudah-mudahan ini membuat pengemudi Ojol bisa bekerja dengan tenang,” ujar Bamsuet.

Menurut Bamsuet, pengemudi Ojol merupakan peserta potensial BPJS Ketenaga-

kerjaan. Sebab anggota Garda di Jabodetabek sekitar 900 ribu sampai 1 juta orang. Di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua ada sekitar 4 juta pengemudi Ojol. “Ini potensi menampung tenaga kerja yang luar biasa. Kita berharap Ojol hanya menjadi alternatif sementara bagi mereka untuk menyambung hidup keluarganya sambil menunggu pekerjaan baru,” katanya.

Bamsuet menambahkan, pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, termasuk sektor ekonomi. Ojek online menjadi alternatif sementara untuk menyambung kehidupan bagi masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Bamsuet mengungkapkan data, tercatat hampir 10 juta orang yang

terkena PHK dan dirumahkan karena dampak pandemi Covid-19. “Kegiatan-kegiatan individual mandiri seperti ojek online dan lain-lain perlu didorong agar tetap bisa mempertahankan perekonomian nasional,” imbuhnya.

Dalam program MPR Peduli Lawan Covid-19, MPR sebagai Rumah Bangsa telah melakukan kegiatan memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19, dari mulai gerakan sosial penggalangan dana membantu seniman, memberi bantuan kepada sopir bajaj, sopir taksi, dan kelompok komunitas lain, termasuk komunitas penggalai kubur. □

BSC



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Mengakhiri Ketidakberdayaan Akibat Perangkap Covid-19

DURASI pandemi Covid-19 yang berkepanjangan dengan segala eksisnya menjadi bukti ketidakberdayaan komunitas global. Dan, ketidakberdayaan itu semakin nyata ketika komunitas global mencapai kesepakatan tak tertulis untuk mematikan sementara semua motor penggerak ekonomi. Maka, resesi ekonomi 2020 pun menjadi konsekuensi logis yang harus diterima apa adanya.

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) nyata-nyata telah menjadi perangkap bagi semua orang. Dan, oleh perangkap itu, manusia era modern sekarang nyaris dibuat tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu tercermin dari ketiadaan langkah atau kebijakan antisipatif, ketidakmampuan mengendalikan atau melokalisir wabah ini, kegagalan menghentikan proses penularan, hingga keterpaksaan memilih jalan pintas sarat risiko untuk menyelamatkan semua orang. Hanya dalam hitungan bulan dan tanpa bisa dicegah, virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia.

Sisi lain ketidakberdayaan itu terlihat pada ketiadaan vaksin. Ketidakberdayaan ini menyebabkan para ahli medis mencari jalan pintas dengan rekomendasi membatasi aktivitas manusia, mulai dari rekomendasi penguncian (*lockdown*), pembatasan sosial hingga karantina mandiri atau bekerja dan belajar dari rumah saja. Karena ketidakberdayaan manusia pula, rekomendasi sarat risiko itu harus diterima dan dilaksanakan. Tak ada alternatif lain. Dengan proses penularan yang mudah, Virus Corona menyerang sistem pernapasan. Semua orang mengenal penyakit ini dengan sebutan Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*). Bisa menginfeksi siapa saja dari semua usia; dari kelompok lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak serta bayi, bahkan juga ibu hamil dan ibu menyusui. Karena belum ada vaksin-nya, gangguan pada sistem pernapasan akibat virus ini bisa menyebabkan

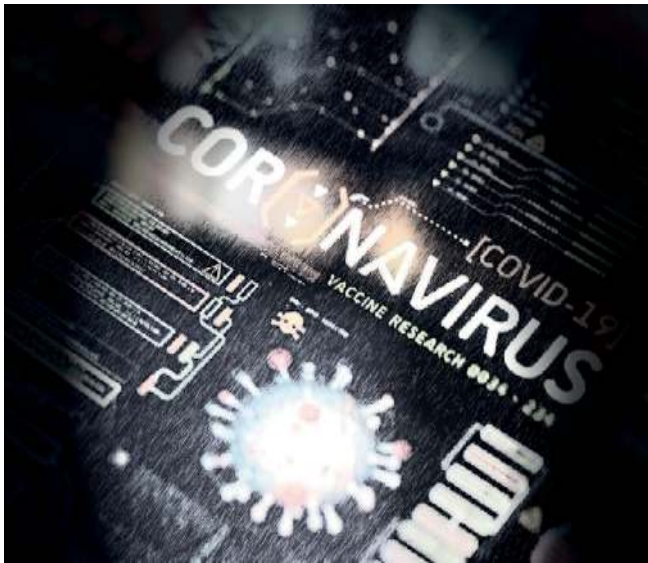
kematian.

Hingga Selasa (30/6) kemarin, Data Worldometers melaporkan, total pasien Covid-19 di dunia mencapai 10.402.897. Jumlah kematian tercatat 507.523 kasus. Data tentang pasien yang sembuh cukup mengembirakan dan memberi harapan. Dari total yang terinfeksi, 5.659.387 pasien dinyatakan pulih.

Di Indonesia pun jumlah pasien Covid-19 terus bertambah. Laju percepatannya yang tampak signifikan membuat semua kalangan prihatin. Karena terdeteksi 1.293 kasus baru per Selasa 30 Juni 2020, total pasien Covid-19 di dalam negeri menjadi 56.385 kasus; jumlah kematian 2.876, dan jumlah pasien sembuh 24.806. Kendati pertambahan jumlah pasien signifikan, masyarakat diharapkan tetap optimistis. Kesigapan sejumlah pemerintah daerah dalam upaya memutus rantai penularan Covid-19 diharapkan dapat segera mengurangi jumlah pasien baru.

Semakin jelas bahwa data global maupun data di dalam negeri tentang perkembangan pandemi Covid-19 itu menunjukkan ketidakberdayaan manusia melawan virus Corona. Alih-alih menghentikan laju penularannya, bahkan tak ada satu pun kekuatan atau teknologi kekinian yang mampu mengendalikan wabah ini. Jangankan mereka yang awam, para ahli medis dan ahli farmasi sekalipun nyaris tak berdaya. Akibatnya, sebagaimana sudah diketahui bersama, semua orang setiap harinya hanya bisa menyimak jumlah pertambahan kasus baru, jumlah pasien yang sembuh dan jumlah kematian. Amerika Serikat (AS), negeri adi daya dengan penguasaan teknologi kekinian yang mumpuni, bahkan menjadi negara yang tampak paling dan sangat lemah sepanjang durasi pandemi Covid-19 sekarang.

Bersama Brasil, AS tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus paling banyak, dengan rata-rata pertambahan kasus baru lebih dari 35.000 per hari. Hingga Senin (29/6), worldometers.info menyebutkan total kasus Covid-19 di AS sudah



mencapai jumlah 2.637.077 pasien, dengan total kematian 128.437. AS tidak berdaya karena gagal fokus, tidak antisipatif dan gagal menahan laju percepatan penularan. Seorang anggota gugus tugas penanganan Virus Corona di AS bahkan membuat perkiraan bahwa pertambahan kasus baru per hari bisa mencapai angka 100.000 dalam jangka dekat, jika tidak segera dilakukan koreksi kebijakan. Uni Eropa pun sudah menetapkan larangan bagi turis asal AS masuk wilayahnya.

Andalkan Akal Budi

Akibat ketidakberdayaan melawan virus Corona, para ahli mencari jalan pintas. Keluarlah rekomendasi penguncian, pembatasan sosial hingga karantina mandiri. Hanya itu alternatif yang tersedia. Dan, sebagaimana telah dipahami bersama, penguncian atau pembatasan sosial yang telah dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu itu menyebabkan hampir semua motor penggerak ekonomi dimatikan. Jalan pintas ini harus diambil karena komunitas global bersepakat untuk lebih memprioritaskan keselamatan dan kesehatan semua orang. Ketika kesepakatan tak tertulis ini dipraktikkan, semua orang tahu akan risiko teramat besar yang harus ditanggung bersama,

yakni memburuknya kinerja perekonomian dunia. Artinya, demi keselamatan semua orang, para perumus kebijakan di banyak negara dengan kesadaran penuh telah mengambil keputusan pahit yang menyebabkan perekonomian global terjerumus ke jurang resesi. Pandemi Covid-19 nyata-nyata memerangkap semua orang.

Baru-baru ini, Dana Moneter Internasional (IMF) membarui proyeksinya tentang pertumbuhan ekonomi dunia. IMF menghitung bahwa perekonomian global tahun ini berkontraksi atau tumbuh negatif 4,9%. IMF juga memperkirakan kerugian skala global akibat pandemi virus corona mencapai US\$ 12 triliun atau sekitar Rp 168.000 triliun. Perkiraan kerugian sebesar itu disebabkan perekonomian 95% negara di planet ini tumbuh negatif. Sebelumnya, atau pada April 2020, lembaga multilateral ini menyajikan perkiraan bahwa ekonomi dunia akan berkontraksi 3%.

Sedangkan Bank Dunia juga telah menyajikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini minus 5,2%. Tentang prospek Indonesia, gambarannya sudah dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Setelah masih bisa tumbuh positif di kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 bisa minus 3,1%. Proyeksi para ahli itu menghadirkan gambaran wajah dunia yang serba suram, dan tentu saja menakutkan bagi banyak orang. Apalagi sudah dimunculkan perkiraan tentang lonjakan jumlah warga miskin.

Dinamika kehidupan bersama tidak akan pernah bisa ideal lagi jika semua komunitas terus membiarkan ketidakberdayaan sekarang ini. Bukankah WHO sudah memastikan bahwa virus Corona masih akan ada dalam kehidupan manusia untuk jangka waktu yang belum bisa dihitung. Itu berarti kehidupan semua orang di hari-hari mendatang akan selalu berdampak dengan virus ini.

Maka, sebagai makhluk berakal budi, semua orang harus berusaha keluar dari cengkeraman perangkap pandemi Covid-19. Memang, pemulihan dalam skala global tidak akan mudah atau memakan waktu lama, karena dunia masih dibayangi gelombang kedua penularan Covid-19. Namun, inisiatif baru harus diambil dan dipraktikkan untuk merawat dan melanjutkan kehidupan bersama.

Pilihan yang tersedia adalah *new normal* atau pola hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Semua elemen masyarakat harus mengambil pilihan ini dan mempraktikkannya untuk mengakhiri ketidakberdayaan akibat perangkap pandemi Covid-19 sekarang ini. □

Kredit Tanpa Agunan untuk UMKM

Fadel Muhammad Usul Bunga 1%

Pemerintah harus berani mengambil langkah spektakuler untuk membuat likuiditas ekonomi. Kalau tidak berani, ekonomi kita bisa kolaps.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PANDEMI Covid-19 membuat ekonomi Indonesia stagnan. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga tak bisa bergerak. Untuk itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk UMKM dengan bunga 1% sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah harus menginjeksi bank-bank BUMN dan Swasta untuk merealisasikan bantuan stimulus kepada UMKM itu.

“Injeksi sekitar Rp 40 triliun ke bank-bank BUMN agar segera direalisasikan untuk memacu pergerakan ekonomi di sektor UMKM. Namun, Rp 40 triliun kami rasa tidak cukup. Kami usulkan paling tidak Rp 200 triliun,” kata Fadel Muhammad dalam diskusi *Media Expert Meeting* dengan tema “Bagaimana Menghadapi *New Normal* di Bidang Ekonomi, Apa yang Harus Dilakukan?” di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (14/7/2020). *Media Expert Meeting* ini dihadiri sekitar 20 jurnalis senior dari media cetak, online, radio, dan televisi.

Fadel Muhammad menjelaskan, pandemi Covid-19 berdampak pada ekonomi global dan

nasional. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2020 minus 5,2% dan pada 2021 diperkirakan 4,2%. Untuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini 0% dan pada 2021 naik menjadi 4,8%. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diprediksi antara 0,9% - 1,9%. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5% - 6%.

“Dengan pertumbuhan sebesar itu ekonomi Indonesia bisa dikatakan stagnan. Pertumbuhan kredit perbankan diprediksi tumbuh 1% pada 2020,” jelasnya.

Fadel menambahkan, semua sektor ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19, termasuk UMKM. Sebanyak 47% UMKM terkena dampak Covid-19. “Untuk itu, UMKM perlu disokong kelangsungannya dengan stimulan kredit,” ujarnya. Saat ini ada sekitar 60,6 juta UMKM yang telah terhubung ke lembaga pembiayaan formal dan sekitar 23 juta KUMKM (Koperasi – UMKM) yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Fadel yang pernah menjadi Ketua Komisi XI DPR ini menyebutkan, hampir semua

kegiatan ekonomi dalam keadaan sulit dan tidak likuid. Karena itu, perlu keberanian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah agar ekonomi menjadi likuid. “Kami dari Pimpinan MPR meminta kegiatan perbankan dan institusi keuangan mengambil langkah *new normal* sehingga ekonomi bergulir serta likuid,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Fadel, memang telah memberikan dana sekitar Rp 40 triliun untuk menginjeksi bank-bank BUMN. Namun, dana sebesar Rp 40 triliun tersebut belum cukup. “Saya hitung-hitung dengan tim, paling tidak kita membutuhkan Rp 200 triliun untuk likuid,” tuturnya.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu juga menghitung apabila pemerintah tidak berani mengambil langkah spektakuler untuk membuat likuiditas ekonomi maka bisa kolaps. “Saya hitung 90 hari, kalau kita tidak berani mengambil langkah membuat likuiditas ekonomi maka kita bisa kolaps,” katanya.

“Kita menunggu langkah berani Presiden Joko Widodo untuk membuat ekonomi menjadi likuid,” imbuhnya. □

BSC

Haul Ke-27 KH. Muhammad Almaghfur

Beri Perhatian Lebih Besar pada Pesantren

Selama pandemi berlangsung, pemerintah mewajibkan diberlakukan protokol kesehatan. Namun, pemerintah kerap lupa memberi bantuan, khususnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan di pondok pesantren.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEMERINTAH resmi melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Juni silam. Kabar baik ini direspon oleh pimpinan MPR RI, dengan memenuhi beberapa undangan dari masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Ketua MPR Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA., memenuhi undangan dari Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin dan Pondok Pesantren Al Ittihad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2020).

Acara Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di Cianjur ini dimulai dengan menghadiri Haul ke-27, KH. Muhamad Almaghfur, pendiri Ponpes Raudhatul Muta'allimin. Acara berlangsung di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin, Kampung Cijambe, Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Perjalan menuju Ponpes Raudhatul Muta'allimin terbilang cukup berat. Setelah melalui hamparan sawah, lalu keluar masuk kawasan hutan di mana kondisi jalan yang terjal. Dan, Ponpes yang dikunjungi oleh pimpinan MPR ini tampak sangat bersahaja.

Di depan para pengasuh pondok, para

santeri, dan warga masyarakat yang hadir, Gus Jazil—begitu sapaan Jazilul Fawaid—dalam sambutannya mengingatkan bahwa negara Indonesia lahir berkat peran besar para ulama. Selama perjuangan fisik, para ulama ikut berperang melawan penjajah. Begitu pula pula jelang Indonesia merdeka, ungkap Gus Jazil, para ulama berkontribusi dalam upaya persiapan kemerdekaan.

Karena itu, Jazilul mengajak umat Islam Indonesia melanjutkan cita-cita serta

perjuangan para ulama. Dengan cara memakmurkan pondok pesantren, mempelajari agama dengan bersungguh-sungguh, serta mencintai Alquran.

“Sekarang ini saingan dan gangguan untuk membaca Alquran semakin banyak. Mulai dari game online, drama Korea, hingga dunia hiburan lainnya. Karena itu, untuk bisa terus membaca Alquran butuh perjuangan dan pengorbanan”, kata Gus Jazil dalam acara Haul ke-27, KH. Muhamad Almaghfur tersebut.





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pada kesempatan tersebut, Jazil juga mengingatkan bahwa pandemi Corona telah menyebabkan kerugian sangat besar. Kerugian akibat Corona bukan hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di dunia. Serangan Corona membuat jumlah pengangguran bertambah, pertumbuhan ekonomi, serta penghasilan menurun. Karena itu, Gus Jazil mengajak seluruh masyarakat tetap sehat dan tersenyum agar penderitaan akibat Corona tidak bertambah semakin memberatkan.

“Bagi yang bertani, bertanilah dengan penuh semangat, jangan sampai stres akibat Corona. Percayalah, kalau petani kita makmur, makmur juga bangsa Indonesia,” ujar Gus Jazil seraya mengajak masyarakat untuk mendoakan dan mencontoh KH.

Muhamad Almaghfur yang selalu mencintai Alquran selama hidupnya.

Tak lupa pula Gus Jazil juga menitipkan Ponpes Raudhatul Muta'allimin kepada masyarakat, khususnya pemerintah daerah Cianjur. Jangan sampai Ponpes yang berada di daerah terpencil dan terlihat sederhana ini dilupakan dan tidak diperhatikan.

Minim Perhatian

Minimnya perhatian pemerintah kepada pesantren juga disampaikan H.Jazilul Fawaid saat mengikuti acara Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Al Ittihad Cianjur, Jawa Barat. Gus Jazil menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, khususnya selama pandemi Covid-19. Pesantren-pesantren kecil

di daerah terpencil nyaris tidak tersentuh bantuan apapun. Padahal, mereka ini tetap diharuskan memenuhi ketentuan protokol kesehatan, *social distancing*, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengecekan suhu, dan pemberian *hand sanitizer*.

Untuk melakukan protokol kesehatan, lanjut Gus Jazil, membutuhkan biaya tidak sedikit. Karena itu, seharusnya pemerintah bisa memberikan perhatian lebih besar bagi pesantren, khususnya yang berada di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu memberikan *rapid test* kepada penghuni pesantren untuk menghindari potensi penyebaran virus tersebut di kalangan para santri.

Gus Jazil menilai, selama ini pesantren dianggap tidak penting, dan bisa hidup sendiri dengan segala keterbatasannya, sehingga tidak perlu mendapat perhatian. Buktinya, dalam kaitan dengan penyebaran Corona, hampir belum ada pesantren yang sudah mendapat bantuan *rapid test*. “Semua baru tahap rencana, entah kapan akan dilaksanakan,” kata Gus Jazil usai menghadiri acara Temu Tokoh Kebangsaan.

Acara Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Al Ittihad Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (27/6/2020), ini juga dihadiri anggota MPR RI Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa, dan pengasuh Pompes Al Ittihad, KH. Kamali Abdul Ghani.

MBO



Sejarah Sepeda



Bermula Untuk Mengawasi Hutan Kini Menjadi Gaya Hidup

Kali pertama sepeda dibuat dengan tujuan sebagai kendaraan dalam mengawasi hutan. Namun, dalam perjalanan waktu, sekarang sepeda telah menjadi gaya hidup. Sepeda Merek Brompton seolah menjadi kebanggaan dan status hidup yang tinggi bagi pemiliknya.

Bersepeda merupakan olahraga yang populer di Indonesia. Sekarang di seluruh kota di Indonesia, apalagi Jakarta, setiap saat, apalagi hari-hari libur, terlihat banyak warga masyarakat gowes di jalan-jalan, baik sendiri maupun berkelompok.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KETIKA Gubernur Jakarta Sutiyoso menetapkan pada hari Ahad di ruas Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman, Jakarta, sebagai area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau *Car Free Day* (CFD), langsung direspon masyarakat dengan antusias. Mereka setiap Ahad pagi sekitar pukul 06.00 hingga pukul 11.00 WIB berduyun-duyun ke jalan protokol di Ibukota untuk melakukan berbagai macam aktivitas.

Masa-masa pertama CFD diterapkan oleh Sutiyoso, kondisinya tidak seperti saat-saat ini. Saat itu, Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman masih terbelah menjadi empat ruas. Ruas untuk CFD ada pada ruas yang di tengah (ruas 2 dan 3). Sementara ruas 1 dan 4 masih bisa dilalui kendaraan umum, bus bukan Transjakarta, serta kendaraan lain. Sehingga pada masa itu ketika masyarakat menikmati jalan yang ada masih terasa kurang nyaman. Perlu berhati-hati, karena ada bus umum dan kendaraan lain masih berlalu-lalang.

Seiring perjalanan waktu, peminat acara CFD semakin antusias. Tidak hanya individu yang menikmati suasana itu, tapi berbagai lembaga, baik swasta atau pemerintah, juga menggunakan CFD untuk memperingati ulang tahun atau meluncurkan produknya. Mereka pada hari itu, misalnya, menggelar acara jalan santai dengan *start* dan *finish* di Lapangan Monas. Dengan menyusuri Jalan Thamrin berbelok arah di Bundaran Hotel Indonesia.

Bila kita melihat suasana CFD selanjutnya, selain jalan sudah ditutup secara penuh sehingga benar-benar bebas kendaraan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bermotor, kecuali Transjakarta, sepanjang ruas jalan yang ada juga dipenuhi oleh para penunggang sepeda. Suasana itu semakin bertambah semarak saat berlakunya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Soalnya, untuk menjaga kesehatan selama masa PSBB, masyarakat melakukan olahraga dengan mengayuh sepeda. Antusias masyarakat untuk *gowes* semakin tinggi setelah ada sepeda model baru, yaitu sepeda lipat. Jenis sepeda lipat ini naik pamornya, karena selain praktis, dan mudah dibawa ke mana-mana. Juga, karena adanya 'iklan' dari tindakan yang disebut salah prosedur, yakni memasukkan sepeda merek Brompton ke bagasi pesawat plat merah. Akibatnya, membuat sepeda lipat itu diburu oleh masyarakat. Itulah sebabnya, pada Juni-Juli 2020, banyak orang *sambat*

bahwa susah mencari sepeda lipat. Dan, kalau ingin mendapatkan mereka harus menunggu.

Meski masih berlaku ketentuan PSBB dan transisi, masyarakat agaknya tak memedulikan larangan berkerumun. Hal demikian tentu menghawatirkan terjadinya penularan Covid-19 di area CFD. Agar kejadian buruk tidak terulang, Pemerintah DKI Jakarta yang awalnya memberi lampu hijau digelarnya kembali CFD setelah jeda karena PSBB, akhirnya pemerintah meniadakan lagi kegiatan itu. Walaupun kegiatan itu secara resmi ditiadakan, namun para penggemar sepeda tetap melakukan *gowes* kesukaannya di sepanjang Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Begitu juga di tempat-tempat lain, seperti di Kota Tua.

Bersepeda dari dulu hingga sekarang





merupakan kegiatan yang populer, meski juga ada musim-musimnya. Musim bersepeda meningkat apabila ada jenis atau model baru. Terlepas dari itu, apakah para penggemar sepeda tahu bagaimana kereta angin yang biasa mereka tunggangi itu ditemukan, berevolusi, hingga saat ini menjadi bentuk yang sempurna.

Dikutip dari Wikipedia, berdasarkan Ensiklopedia Columbia, asal muasal sepeda dari Perancis. Sejak Abad XVIII sudah ada bagan sepeda yang dinamakan *velocipede*. Sebagai bentuk awal, pastinya bentuknya masih jauh dari sempurna. Saat itu, belum ada pedal tongkat (*tatocipede*). Cara menggerakkan sepeda pada masa itu

dilakukan dua orang dengan cara memutar engkol di sisi kanan dan kiri.

Sumber lain menyebutkan bahwa penemu sepeda adalah Baron Karls Drais von Sauerbronn. Ia merupakan orang kaya di Baden, Jerman. Ia memiliki hutan yang luas. Untuk mengawasi hutan, ia ingin menggunakan sesuatu yang memudahkan pekerjaannya. Untuk itu, pada 1818, ia menciptakan suatu alat transportasi yang terdiri dari dua roda. Bentuknya masih berupa gabungan antara sepeda dan kereta kuda. Gabungan kedua unsur itu disebut *dandy horse*. Meski demikian, apa yang direkayasakan oleh Von Sauerbronn mampu membuat kerjanya, mengawasi hutan, lebih

efektif dan efisien. Ciptaan Von Sauerbronn itu disebut sebagai penyempurnaan *velocipede*.

Sementara sumber lain menyebut, pria kelahiran Karlsruhe, 29 April 1785, itu membuat sepeda dengan model roda tiga tanpa pedal. Von Sauerbronn sendiri menyebut temuannya itu dengan nama *Draisienne*. Sepeda itu diuji coba pertama kali pada 12 Juni 1817 dengan menempuh jarak dari Mannheim ke Schwetzingen Relaishaus. Uji coba dilakukan tidak sekali, dan dia kemudian melakukan hal yang sama dengan menempuh antara Gernsbach ke Baden. Dibandingkan berjalan, tentu menggunakan sepeda yang ditemukan itu, waktunya tempuh lebih efektif dan cepat.

Perjalanan yang dilakukan Von Sauerbronn viral setelah dimuat di harian lokal di Jerman. Temuan Von Sauerbronn merupakan babak yang sangat maju bagi perkembangan sepeda. Atas rekayasa, ide, dan inovasi yang dilakukan, pada 12 Januari 1818, dia dianugerah gelar *Duke* (gelar kebangsawanan). Tak hanya menerima gelar kebangsawanan dari Kastil, Von Sauerbronn juga diangkat sebagai profesor mekanika. Secara kesejahteraan, berkat temuan cikal-bakal sepeda itu, Von Sauerbronn mendapat gaji meski sudah pensiun dari pekerjaannya.

Inovasi sepeda tidak berhenti di Jerman. Tahun selanjutnya, 1839, seorang pandai besi asal Skotlandia, Kirkpatrick MacMillan, melengkapi sepeda yang sudah ada dengan pedal. Dalam Wikipedia disebutkan, pedal itu lebih mirip pendorong yang diaktifkan engkol lewat gerakan turun-naik kaki mengayuh pedal. Langkah maju berikutnya, MacMillan menghubungkan engkol tadi dengan tongkat kemudi (setang).

Dari waktu ke waktu, orang-orang Eropa menyempurnakan rupa sepeda. Pada 1855, Ernest Michaux merekayasa dengan memperberat engkol. Rekayasa ini membuat gerak sepeda menjadi lebih stabil. Untuk bagian roda, bentuk sepeda disempurnakan oleh Pierre Lallement, orang Perancis, pada 1865 dengan melingkari roda dengan besi. Dari sinilah muncul istilah *velg* atau pelek.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tak hanya itu, Lallement merekayasa bentuk sepeda dengan model, roda depan lebih besar daripada roda belakang.

Dunia sepeda menjadi suatu industri besar pada saat James Starley mendirikan pabrik sepeda di Coventry, Inggris, 1885. Itu adalah pabrik pertama sepeda. Dunia sepeda semakin membutuhkan unsur lain saat John Dunlop pada 1888 menemukan teknologi ban angin. Dengan ditemukan ban angin membuat naik sepeda menjadi nyaman. Tidak bergoncang saat berada di jalan. Bayangkan bila roda sepeda menggunakan besi atau kayu.

Di Indonesia sepeda seiring kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Orang-orang Belanda membawa sepeda untuk memudahkan

pekerjaan mereka. Pada masa itu, sepeda terbilang barang langka dan mahal. Tak semua orang bisa memiliki dan menggunakan. Pada masa itu sepeda bermerek Humber Cross, Raleigh, Hercules, Batavus, Gazelle, dan lain sebagainya berseliweran. Selanjutnya muncul pula sepeda dengan merek Phillips, Valuas, dan Master.

Bersepeda pun akhirnya menjadi kegiatan yang populer di Indonesia. Sebelum Perang Dunia II, pemerintah kolonialisme Belanda membangun *velodrome* di Semarang dengan diarsiteki oleh Ooiman dan Van Leeuwen. Pembangunan *velodrome* menunjukkan bahwa dunia persepedaan saat itu sudah berkembang. Sepeda tak

hanya untuk mempercepat pekerjaan, namun juga sudah digunakan untuk hobi, olahraga, dan ketangkasan. Bahkan, pada masa itu sudah banyak orang Indonesia yang jago mengayuh sepeda. Mereka adalah pembalap sepeda yang aktivitasnya didukung oleh perusahaan seperti Man-sonia, Triumph, dan Hima.

Dari waktu ke waktu, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin akrab dengan dunia sepeda. Buktinya, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) II pada 1951 di Jakarta, salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah balap sepeda. Naik sepeda pada masa itu juga berkembang di berbagai daerah. Buktinya, pada 20 Mei 1956, di Semarang dibentuk Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI). Mereka yang bergabung di organisasi ini adalah para penggemar sepeda yang datang dari Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, Manado, Bandung, dan kota lainnya.

Ketika kebijakan politik luar negeri Presiden Soekarno condong ke Blok Timur, negara-negara sosialis-komunis, juga ikut berpengaruh pada dunia persepedaan di Indonesia. Saat itu, Soekarno melarang masuknya impor produk-produk negara Barat, termasuk sepeda. Sebagai gantinya, sepeda-sepeda buatan Tiongkok atau Cina masuk ke Indonesia. Sepeda buatan Cina itu akrab di telinga kita hingga 1990-an, seperti Butterfly dan Phoenix. Dan, *dhelalah*, sepeda buatan negeri Tirai Bambu itu beratnya lebih ringan dan ukurannya lebih kecil sehingga lebih pas, fleksibel, dan mudah dikendarai oleh orang-orang Indonesia.

Sejak kali pertama hingga 1980-an sepeda bisa dikatakan masih barang mahal. Pada masa itu, tidak semua orang memiliki sepeda sehingga antar tetangga sering saling pinjam. Namun, seiring perjalanan waktu dan perekonomian meningkat, sepeda saat ini bisa dikatakan sebagai barang biasa. Setiap rumah rata-rata memiliki sepeda. Tidak hanya satu, namun dua atau tiga, atau sesuai jumlah penghuni rumah. □

AWG/dari berbagai sumber





Susahnya Membeli Sepeda

Pandemi Covid-19 menjadi penyebab tingginya permintaan sepeda. Konsumen, pemilik toko dan pabrik sepeda berkeluh kesah soal *supply and demand*. Fenomena ini terjadi di seluruh sudut dunia.

PADA suatu Ahad di awal Juli wartawan Majelis melintas di Jl. Sultan Agung, Pasar Manggis, Jakarta. Di jalan yang berhadapan dengan Kali Ciluwung itu berjejer toko-toko sepeda. Pada hari-hari sebelum Juni, di jalan itu kehidupan biasa berjalan normal. Ada beberapa orang yang melihat-lihat sepeda yang dipajang dan atau digantung.

Di awal Juli, suasana berbeda. Jalan yang terbilang tidak lebar menjadi tersendat. Masalahnya di depan toko-toko sepeda beberapa mobil berhenti. Mobil berhenti bukan karena mogok, tetapi pemiliknya mengunjungi toko sepeda untuk melihat, menawar, dan selanjutnya bisa jadi sepakat untuk membeli.

Toko-toko sepeda di Jl. Sultan Agung, rupanya juga terkena *booming* antusias masyarakat untuk *gowes*. Pandemi Covid-19 banyak disebut penyebab masyarakat jadi menggemari olahraga bersepeda atau *back to bike*. Akibat tingginya kebutuhan sepeda, apalagi pemesanan dan pembelian berlangsung secara serempak membuat munculnya keluhan, tidak hanya terjadi pada calon pembeli namun juga pemilik toko dan pemilik pabrik sepeda.

Ophan, seorang pria yang juga mulai gandrung pada kegiatan bersepeda, mengeluhkan sikap pelayan di sebuah toko sepeda. "Saat sibuk, dicolek pun tidak mau menoleh." keluhnya. Ia mengungkapkan itu, karena saat berada di sebuah toko sepeda, dia tidak dilayani dengan baik. Pelayan toko memperlakukan calon pembelinya seperti itu, pastinya bukan karena kesengajaan, tapi bisa saja saat itu dia harus menghadapi puluhan orang calon pembeli lainnya. Apa yang dikeluhkan Ophan juga dirasakan oleh calon pembeli lainnya. Di Kompas.com, 27 Juni 2020, ungkapan itu dikicaikan lewat Twitter dengan tulisan: "di Indonesia Bakul pit naik Haji". Ada juga yang berkicaikan, "masih aja ya toko masih tutup pada (padahal



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

calonnya pembelinya, *red*) berjejer kaya mau ambil BLT aja? Kicauan-kicauan itu menunjukkan banyak orang ingin membeli sepeda dan memberi keuntungan pada toko dan pabrik sepeda.

Benarkah penjualan sepeda benar-benar meningkat? Menurut AVP of Business Tokopedia, David Kartono, dikutip dari Kompas.com, pembelian sepeda di laman Tokopedia pada Mei 2020 melonjak hingga 40% dari bulan sebelumnya. Hal yang sama dikatakan VP of Sports Blibli, Elsa Maria

Pattie. Di laman itu disebut sepeda masuk daftar produk favorit yang dicari konsumen. "Trafik penjualan sepeda sejak Maret hingga pertengahan Juni 2020 meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19", ujar Elsa Maria. Lebih lanjut dituturkan, tingginya permintaan sepeda karena keinginan masyarakat untuk beraktivitas dan berolahraga di luar ruangan. "Tren pembelian sepeda meningkat sejak PSBB", ujarnya dalam media online tersebut.

Apa yang dialami Tokopedia dan Blibli juga



dirasakan Bukalapak. Bukalapak menyebutkan, ada peningkatan transaksi penjualan sepeda hingga 156% di Maret sampai Juni di Bukalapak. “Memasuki Juni, Bukalapak mencatat kategori *handphone*, sepeda, beserta hobi dan koleksi menjadi produk-produk yang paling banyak diminati,” ujar Kurnia Rosyada, *VP of Merchant* Bukalapak (Kompas.com, 27 Juni 2020). Menurut Kurnia, ada perubahan minat belanja pasca Ramadan dan Lebaran. Sebelumnya, *fashion* pria, *fashion* anak-anak, beserta kategori makanan seperti kurma, parcel Lebaran, dan kue lebaran paling banyak dicari.

Soal keinginan mendapat sepeda, lebih gila lagi bila kita membaca jogja.tribunnews.com, 25 Juni 2020. Di media online ini diceritakan, pemesanan sepeda merek Kreuz meningkat tajam. *Saking* banyaknya orang ingin memiliki sepeda merek ini membuat daftar *inden* (tunggu) pembelian sepeda menjadi memanjang dari sebelum Februari 2021 menjadi September 2021.

Pemilik Kreuz, Yudi Yudiantara, merasa kewalahan menanggapi permintaan konsumen. Menurut Yudi, *handphone*-nya terus ada pesan masuk yang menanyakan dan memesan Kreuz. “Bahkan ada chat Whatsapp sampai 300 pesan dalam sekali waktu,” ujarnya. Menurut Yudi, pemesannya itu datang dari berbagai umur, jenis kelamin, dan berasal dari Sabang dan Merauke. Akibatnya, karena tsunami pemesanan membuat dia menutup pemesanan Kreuz lewat online.

Meningkatnya pesanan sepeda tidak



Rudiyo

hanya terjadi di Indonesia. Di Inggris Raya, juga terjadi. Diberitakan oleh BBC, *Broadribb Cycles* di Bicester biasanya menjual sepeda 20 hingga 30 sepeda per minggu. Namun, saat ini menjual 50 sepeda setiap hari, begitu kata Manajer Toko, Stuart Taylor. Tak hanya penjualan yang dirasakan *Broadribb Cycles*. Servis sepeda juga mengalami hal yang sama, meningkat.

Apa yang dialami *Broadribb Cycles* juga dialami *Lunar Cycles*. *Lunar Cycles* yang berada di London Utara itu menyebutkan, ada peningkatan penjualan dan *services* sepeda. Fenomena yang terjadi di Inggris Raya tidak hanya soal meningkatnya penjualan dan *servis* sepeda, namun juga membuat orang yang telah lama tidak bersepeda kembali bersepeda. Hal demikian diungkapkan Andrew Hassard yang tinggal di Ballyclare, Irlandia Utara. “Saya kembali

bersepeda, terakhir saya bersepeda 15 atau 20 tahun lalu”, ungkapnya.

Apa yang dirasakan oleh orang-orang Inggris Raya terkait sepeda juga dialami oleh orang Amerika Serikat. Pemilik toko sepeda di El Camino, Rainer Zaechlin, mencurahkan perasaannya selama 25 tahun mengelola toko sepeda bahwa dia tidak pernah sesibuk saat-saat ini. Sebagai pelayan masyarakat untuk *servis* sepeda, biasanya ia memberi layanan daftar tunggu *services* tidak lebih dari satu atau dua hari, namun di saat *booming* bersepeda, tokonya harus mengatakan kepada pelanggan bahwa daftar tunggunya lebih dari empat minggu. Tak hanya itu yang dia alami, dua juga merasa kekurangan pasokan sepeda yang siap dijual.

Terkait melonjaknya pesanan sepeda, Ketua AIPI (Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia) Rudiyo, dalam *CNBC*, 16 Juni 2020, mengatakan, momentum ini bersifat situasional atau hanya bertahan beberapa bulan. “Ibaratnya hanya sesaat aja nanti kembali ke normal lagi”, ujarnya. Anggota asosiasi itu, menurut Rudiyo, tidak menyangka permintaan sepeda melonjak. “Soalnya, masa pandemi di mana kesulitan ekonomi sedang banyak melanda masyarakat,” ungkapnya. Tahun sebelumnya, penjualan sepeda dalam negeri mencapai 2 juta hingga 2,5 juta unit, dan bila meningkat sampai 3 juta maka dia menyebutnya situasional. “Mungkin satu atau dua bulan aja. Ke depan saya tidak tahu”, ujarnya. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Masyarakat Menolak Plombir

Wacana sepeda kena pajak buru-buru dicabut setelah ada penolakan dari masyarakat. Sejak 1930 hingga 1997, pemilik sepeda memang dikenai pajak yang disebut plombir. Di Eropa, pesepeda malah diberi insentif.



BILA kita *googling* harga sepeda di Juli 2020, perasaan kita bisa jadi campur aduk antara senang dan kaget. Peralnya, sepeda dari berbagai merek, ukuran, dan jenis, kita temukan hanya harganya berada pada kisaran Rp1.000.000 hingga Rp102.000.000. Dengan kisaran harga tersebut, calon pembeli bisa memilih mana sepeda yang disukai dan bisa didapat dengan harga sesuai isi dompet. Meski

demikian, ada saja yang berani merogoh isi dompet dalam-dalam dan ditambahi dengan duit dari sumber yang lain, demi mendapatkan sepeda yang bisa mengangkat citra dirinya di samping sepeda yang diinginkan itu memang enak dinaiki.

Bisnis sepeda saat pandemi Covid-19 menyimpang dari teori bisnis lainnya. Ketika sektor lain bangkrut, bahkan menutup diri, bisnis sepeda malah sebaliknya. Ia melejit

bahkan menjanjikan bila tren bisnis terjaga dalam jangka lama.

Melihat tingginya geliat bisnis tersebut, sempat tersiar kabar bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan hendak memungut pajak dari kereta angin. Kabar ini langsung menimbulkan respon yang tidak sejalan dari banyak orang, terutama penggemar sepeda. Dari Twitter yang bernama *@ossydermawan*, bunyi kicauannya, "lama-lama jalan kaki juga harus bayar pajak". Politisi Gerindra, Ketua HKTI, dan mantan Ketua DPR, Fadli Zon juga tidak kalah kencengnya berkicau dalam Twitter. Dalam *@fadlizon*, tertulis, "kalau benar nantinya sepeda akan dipajaki, itu tanda-tanda nyata negara akan bangkrut".

Reaksi yang sama juga dikicaukan *@aalborneva*. Ia mengatakan, "satu pihak beranggapan menghilangkan premium dan pertalite karena alasan lingkungan. Pihak lain malah mungut pajak dari kendaraan yang go green. Keder gua". Senada juga dikicaukan oleh kata *@Zul87985855*, "betul, kalau sampai bener sepeda dipungut pajak, parah, kembali ke tahun 70an. Trend sepedaan paling 1-3 bulan tok ramainya, nanti kalau tempat rekreasi sudah dibuka paling selesai tren-nya. Orang Indonesia itu bosenan".

Banyaknya respon penolakan membuat kementerian yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, itu melalui juru bicaranya, Adita Irawati, di awal Juli 2020, buru-buru menegaskan: Tidak benar Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda (sepeda kena pajak). Kementerian itu, katanya, hanya menggodok aturan yang memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda. Di tengah pandemi Covid-19 masyarakat banyak yang bersepeda untuk itu perlu aturan khusus agar menciptakan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

rasa aman.

Selanjutnya, Adita menjelaskan, aturan mengenai sepeda, antara lain kewajiban alat pemantul cahaya untuk meningkatkan keamanan pengguna sepeda di jalan, karena berbaur dengan kendaraan bermotor. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor sehingga pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk itu, dalam berita yang termuat di Kompas.com pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan selain menyiapkan regulasi, juga meminta pemerintah daerah turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda. Kementerian Perhubungan akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda, minimal menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing.

Sepeda kena pajak, aturan ini bukan aturan yang tiba-tiba muncul. Pada masa lalu, sejak pemerintah kolonialisme Belanda bercokol di Nusantara hingga masa Orde Baru, sepeda dikenai pajak. Masa lalu yang dialami oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, itulah yang memunculkan isu terkait sepeda dikenai pajak. Di akhir Juni 2020, ia



mengatakan, “kalau waktu saya kecil, saya mengalami sepeda disuruh bayar pajak dan sebagainya. Mungkin bisa ke sana”.

Penulis rubrik ini juga pernah merasakan masa-masa itu. Semasa kecil, 1970-an, melihat petugas pemerintah berdiri di pinggir jalan. Mereka memberhentikan tidak hanya sepeda, namun juga *cikar* (alat tradisional yang ditarik sapi). Bila di sepeda itu belum ada *plombir* (meterai yang berasal dari timah, kertas, sejenis bahan plastik, dan semacamnya yang digunakan sebagai tanda sudah membayar pajak kendaraan) maka ia

wajib di tempat untuk membayar pajak sepeda.

Dalam Wikipedia diceritakan, pada era 1980-an, *plombir* sangat dikenal oleh masyarakat, terutama di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, karena setiap warga yang memiliki sepeda diwajibkan membeli *plombir* sebagai bagian dari kewajiban membayar pajak. *Plombir* sebagai bukti bahwa sang pemilik sepeda telah membayar pajak. Di mana sepeda harus memiliki *plombir* sebagaimana keberadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pada kendaraan bermotor. Perbedaan antara *plombir* dan STNK adalah bila STNK berwujud surat atau lembaran kertas yang bisa dimasukkan dalam tas atau dompet, sedang *plombir* harus ditempelkan pada badan sepeda.

Dalam Kompas.com, 30 Juli 2020, diuraikan pajak sepeda sudah diterapkan sejak 1930 oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Pada masa itu *plombir* dikenakan tidak hanya untuk sepeda, namun juga untuk becak dan andong (delman, cikar, pedati). Hasil yang didapat oleh pemerintah kolonial digunakan untuk merawat jalan. *Plombir* dipertahankan pada masa pendudukan Jepang, namun hasil pungutan yang diperoleh dari masyarakat itu dipergunakan untuk membiayai perang. Masa berlakunya *plombir* dan berapa besarnya pajak diumumkan lewat surat kabar.

Dalam soal *plombir*, pemerintah Indonesia tidak main-main. Di media online dikatakan, mereka yang tidak mau membayar pajak sepeda atau melanggar aturan akan diganjar hukuman berupa penjara, denda, dan penghentian operasional sepeda. “Semua sepeda yang tidak memakai *peneng* (*plombir*) pada 1950 di jalanan umum akan ditahan,” ucap R. Soewirjo, mantan Walikota Jakarta seperti dikutip dalam *Java Bode*.

Ketika tren naik sepeda turun karena sepeda motor semakin ngetren, pajak sepeda mulai longgar hingga akhirnya pemerintah tidak lagi memungut pajak dari sepeda. Peraturan itu ditegaskan dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari undang-undang itu, pajak sepeda tidak lagi berlaku. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Prof. Dr. Dwidja Priyatno, SH, MH, Sp.N

Rektor Universitas Suryakencana

Serap Aspirasi Masyarakat Harus Ditingkatkan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BANGSA Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai negara besar, apalagi negara yang memiliki keberagaman yang besar, tentu saja banyak tantangan dan permasalahan. Tentu sebagai negara demokratis, berbagai persoalan bangsa yang ada pasti mendapatkan perhatian juga berbagai pendapat yang sepaham atau tidak sepaham di tengah-tengah masyarakat.

Hal tersebut lumrah dan wajar, namun menjadi berbahaya jika ada satu permasalahan menjadi potensi perpecahan buat bangsa Indonesia, itu yang harus dijaga. Akhir-akhir ini sering bermunculan isu-isu luar biasa yang mendapatkan perhatian public, bahkan hingga terjadi pro kontra yang tajam. Hal tersebut mesti mendapatkan perhatian negara, negara harus hadir.

Saya apresiasi lembaga negara seperti MPR RI yang kerap melakukan kegiatan serap aspirasi untuk kepentingan membahas berbagai permasalahan bangsa yang sedang ramai, seperti permasalahan pemilu, amandemen UUD, dan sekarang yang sedang panas soal RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Kehadiran negara bersama rakyat mendengarkan aspirasi rakyat merupakan hal yang sangat baik. Rakyat sangat paham betul permasalahan yang ada, sehingga mendengarkan suara rakyat untuk membahas, mengkaji, kemudian memutuskan satu kebijakan, saya rasa hal yang sangat bijak. Hal seperti itu mesti dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar permasalahan bangsa segera dicarikan solusinya dan tidak berkembamng menjadi serius. □

DER

Dr. Munawar Rois, M.Pd

Dekan FKIP Universitas Suryakencana

Pancasila Tidak Bisa Ditawar Lagi

INDONESIA memiliki Pancasila sebagai ideologi sudah sangat jelas, bahkan di konstitusi, terutama dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 jelas ada sila-sila Pancasila. Pancasila juga adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Intinya, Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Mengapa demikian? Pancasila selama ini mampu menjaga bangsa ini dari perpecahan, mampu menyatukan bangsa yang sangat beragam ini. Jika tidak ada Pancasila maka mustahil ada Indonesia. Untuk itu segala kontroversi negatif tentang Pancasila mesti ditiadakan. Pancasila saat ini mesti harus diperkuat dengan pembinaan yang baik dari sisi pemahaman dan implementasi.

Saya berharap, semua elemen masyarakat Indonesia mesti bijak menyikapi soal Pancasila. Pancasila yang sudah sangat berjasa buat keutuhan bangsa ini harus dijaga betul jangan sampai berubah, apalagi hilang. Kalau Pancasila sampai hilang maka berbahaya buat bangsa ini, karena tidak ada pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. □



DER

Membuka Tempat Wisata, Perlu Standar Ketat

Destinasi wisata yang terdapat di seluruh pelosok negeri ini merupakan salah satu kekayaan alam dan budaya Indonesia. Selama ini sektor pariwisata merupakan sektor andalan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan. Nah, ketika pandemi Covid-19, semua tempat yang dinilai menjadi tempat kerumunan massa, termasuk obyek wisata, ditutup. Dampak ditutupnya tempat-tempat wisata, pendapatan pemerintah dan masyarakat menjadi nol. Sekarang pemerintah mulai membuka kembali tempat-tempat wisata. Tujuannya agar perekonomian menggeliat kembali, namun permasalahannya angka penularan Covid-19 masih tinggi. Bagaimana menyiasati atau mempertemukan kedua hal tersebut? Berikut pendapat anggota MPR yang membidangi masalah terkait.

Zainuddin Maliki, Anggota MPR Fraksi PAN

Menparekraf Harus Punya Peta Penyebaran Covid-19



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

LAIN ladang lain belalang. Beginilah cara Indonesia menghadapi Covid-19. Di Australia ada 67 kasus baru, langsung diterapkan lockdown. Di kita ada lebih seribu kasus baru, tetapi sudah berani mencabut PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan menerapkan kebijakan *new normal*. Pertimbangan pemulihan ekonomi lebih mengedepan ketimbang pemulihan kesehatan. Pasalnya, jika menerapkan kebijakan *lockdown*, PSBB, atau apalah namanya, pemerintah harus memikirkan kompensasi biaya hidupnya. Sedang masyarakat tidak mungkin mengisolasi diri di rumah tanpa penghasilan. Oleh karena itu, meski kurva Covid-19 belum kunjung

melandai, pemerintah berani mencabut PSBB dan memilih membuka *new normal*, termasuk membuka tempat wisata untuk umum.

Kebijakan pemerintah membuka destinasi wisata diharapkan didasarkan pada kondisi masing-masing daerah. Jadi bersifat kontekstual. Artinya, tidak diberlakukan untuk semua destinasi wisata dan juga tidak diberlakukan untuk semua jenis wisata. Dengan demikian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) harus benar-benar memperoleh peta penyebaran Covid-19.

Bagi destinasi wisata yang berada di zona hijau dengan jenis wisata alam, seperti taman hutan raya, taman nasional, geopark, kebun

raya atau desa wisata bisa dipersilahkan buka untuk umum, dengan tetap memerhatikan prosedur dan protokol kesehatan. Sedangkan yang berada di zona kuning, apalagi merah, disarankan untuk bersabar terlebih dahulu.

Dalam pemetaan zonasi mungkin bisa dibuat lebih sempit, misalnya ada destinasi wisata di tingkat kecamatan yang masuk zona hijau meskipun berada di provinsi atau kabupaten yang masuk kategori zona merah. Destinasi wisata seperti ini dimungkinkan untuk dibuka dan dikunjungi umum.

Sebut saja misalnya Kabupaten Gresik—yang notabene ini adalah Dapil saya—masuk kategori zona merah, tetapi memiliki objek wisata alam desa yang selama ini tidak ada kasus Covid-19. Obyek wisata alam ini cukup menarik, tidak hanya menarik minat wisnus (wisatawan nusantara), tetapi juga wisman (wisatawan mancanegara). Wisata alam Setigi di Desa Ujungpangkah dan Gosari di Desa Sekapuk itu layak dibuka untuk umum. Tentu tetap dengan kewajiban menjaga protokol kesehatan dengan mewajibkan petugas maupun pengunjung menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Di tempat wisata yang dibuka kembali, di zona hijau sekalipun, diminta untuk bisa menerapkan CHSE, yakni *clean* (bersih), *health* (sehat), *safety* (aman) dan *environment*, yang baik. Semprotkan disinfektan di tempat-tempat yang memerlukan secara

berkala dan memberi kemudahan mendapatkan fasilitas *sanitizer* atau tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun.

Melihat tingkat disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang masih memerlukan penguatan dan pengawasan maka perlu dipersiapkan petugas atau relawan. Mereka perlu dilatih agar bisa melakukan pengawasan dengan tetap menunjukkan sikap santun dan ramah.

Pengawasan harus memerhatikan titik kritis. Yakni, titik yang dinilai berpotensi terjadi penularan Covid-19. Tidak mudah menentukan titik kritis itu, tetapi bisa menggunakan ukuran besar kecilnya kegiatan. Lokasi kegiatannya *outdoor* atau *indoor*. Berapa lama kegiatan berlangsung. Di samping itu juga bisa diukur dari berapa banyak jumlah orang yang terlibat.

Jangan lupa petugas pengawasan juga harus memerhatikan kemungkinan hadirnya kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita atau penyandang disabilitas dan lain sebagainya.

Apakah tidak rentan tempat wisata dibuka terkait di sana ada pertemuan banyak orang seperti pasar dan mal? Tentu tempat wisata

yang ramai dikunjungi banyak wisatawan adalah tempat yang rentan. Oleh karena itu jika tidak bisa menjamin bisa menerapkan prinsip CHS (*clean, health dan save*), lebih baik untuk bersabar terlebih dahulu. Disarankan untuk tidak keburu membuka untuk umum, terutama untuk jenis wisata yang bukan kawasan wisata alam dan apalagi yang masih berada di zona merah.

Tidak semua daerah memiliki sumber pendapatan unggulan dari sektor pariwisata, namun bagi daerah yang sumber pendapatan unggulannya diperoleh dari sektor pariwisata, umumnya mereka berharap untuk segera dapat membuka kembali. Mereka berharap segera diizinkan menerima kunjungan wisnus, bahkan juga wisman. Namun tetap disarankan untuk tidak keburu buka kunjungan untuk umum. Utamakan menjamin kesehatan daripada pertimbangan ekonomi.

Selama PSBB, apakah pelaku wisata, terutama UMKM, mendapat bantuan dari pemerintah? Komisi X sudah menyetujui anggaran 2020, antara lain untuk memberikan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga menyetujui anggaran di

Kemenparekraf untuk berbagai kegiatan yang bersifat padat karya. Kita minta sedapat mungkin menghindari program kegiatan yang bersifat padat modal.

Kita minta Kemenparekraf juga memberikan stimulus untuk peningkatan omzet, melakukan promosi dan penjualan serta melakukan pendampingan UMKM dalam bentuk *training, consulting, dan reskilling* maupun *upskilling*. Di samping juga anggaran untuk pemberian BLT dan berbagai skema dukungan modal kepada UMKM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bahkan program pemasaran yang diberi alokasi anggaran Tahun Anggaran 2020 paling besar dibanding deputi bidang lain, kita minta agar program pemasaran ke luar negeri dikurangi. Kita desak agar menggunakan penguatan *pull factor* dalam menjalankan strategi pemasaran, seperti halnya ikut mempersiapkan destinasi wisata, mendanai berbagai *event*, menyelenggarakan MICE atau pertemuan di zona yang diyakini aman dari Covid-19 sehingga memiliki *multiplier effect* kepada pelaku wisata terutama UMKM. □

AWG

Dede Yusuf Macan Effendi, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

Prosedur dan Juklak Perlu Dipersiapkan

UNTUK beberapa yang zonanya tidak lagi merah memang dimungkinkan untuk kembali membuka tempat wisata. Tetapi bagi daerah yang masih zona merah jangan tergesa-gesa membuka tempat wisata. Prosedurnya atau juklaknya dulu dipersiapkan lalu disosialisasikan secara masif kepada publik, barulah kemudian tempat wisata dibuka. Kemenparekraf harus detail membuat juklaknya agar tempat wisata tidak jadi *cluster* baru penyebaran Covid-19. Jadi bukan sekadar pakai masker dan sedia *hand sanitizer* saja.

Prosedur keamanan Covid-19 di tempat wisata tidak akan jalan kalau tidak ada pengawasan pelaksanaan. Maka dari itu harus masa uji coba dulu. Personel tim pengawas lapangan harus disiapkan pula. Harus tersedia fasilitas kesehatan juga.



Apakah tidak rentan kalau tempat wisata dibuka mengingat di sana ada pertemuan banyak orang, seperti pasar dan mal?

Sangat rentan, apalagi di daerah yang sebelumnya zona merah. Makanya harus uji coba dulu, lalu evaluasi lagi dan apabila aman

baru dibuka lagi secara permanen. Bahkan di daerah yang bukan zona merah pun tetap rentan.

Bagi beberapa provinsi atau kabupaten/kota sektor pariwisata memang jadi unggulan sehingga dengan ditutupnya tempat wisata otomatis berdampak pada kelesuan ekonomi masyarakat, PAD

menurun drastis. Dampak turunannya adalah daya beli masyarakat melemah dan kemiskinan akan bertambah.

Selama PSBB, apakah pelaku wisata terutama UMKM mendapat bantuan dari pemerintah? Jujur saja pemerintah agak kurang tanggap terhadap UMKM. Tidak ada subsidi, khusus kepada mereka di

masa krisis Covid-19 ini. Para pelaku UMKM berjuang bertahan hidup sendiri. Misalnya, *home industry* kerupuk, cilok, somay, dan lain-lain itu bayar listriknya normal tidak dapat diskon. Bantuan kredit juga minim, tidak ada subsidi khusus selama pandemi. □

AWG

Arya Wedakarna, Anggota MPR Dari Kelompok DPD (Bali)

Keputusan Tepat Walaupun Krusial



SAYA mendukung keputusan pemerintah untuk *new normal*, membuka kembali tempat pariwisata. Masyarakat Bali sudah cukup merasakan dampak perekonomian yang benar-benar terpuruk. Bali yang bertitik tumpu pada industri pariwisata mengalami dampak yang paling disebabkan *lockdown* dari negara-negara yang sebelumnya telah menjadi pengunjung utama ke Pulau Bali karena pandemi Covid-19. Untuk itu, keputusan membuka kembali wisata umum menjadi keputusan yang tepat, walaupun krusial. Maka dari itu perlu beberapa aturan dan pengawasan protokol kesehatan yang diperketat untuk wisata umum agar dapat beroperasi dengan tetap mematuhi kebijak-

an yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur No. 305/GUGASCOVID19/VI/2020. Karena pulau Bali harus mulai belajar untuk bisa hidup di tengah pandemi.

Untuk Provinsi Bali sesuai dengan isi Surat Edaran Gubernur No. 305/GUGASCOVID19/VI/2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali dalam Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* (Covid-19) telah dijabarkan secara jelas terkait prosedur dan syarat

yang harus dipenuhi untuk pembukaan tempat wisata di masa pandemi. Singkatnya, syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola destinasi wisata sebelum dapat membuka kembali tempat wisata tersebut, salah satunya yaitu pariwisata alam yang diizinkan dibuka berada di Kabupaten/Kota yang berada di wilayah zona hijau dan kuning. Sedangkan untuk zona lain akan diatur dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan.

Adapun kawasan pariwisata alam yang dimaksud meliputi kawasan wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya, dan suaka margasatwa. Selanjutnya, *geopark*, pariwisata nonkawasan konservasi seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Kawasan pariwisata tersebut dapat dibuka secara bertahap sampai dengan batasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal. Dan, pada intinya tetap berpegangan pada Protokol Kesehatan.

Kesadaran dari pihak masyarakat juga memiliki peranan yang tidak kalah penting untuk membantu kebijakan pemerintah terkait pembukaan tempat wisata. Sadar dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak aman, menggunakan masker, dan rutin mencuci tangan. Salah satu keuntungan Bali yang telah memiliki Desa Adat maka koordinasi di lapangan akan

menjadi sangat mudah dan tingkat kepatuhan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dan sebagai bagian dari desa adat sangat memuaskan. Tidak heran, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memuji penanganan covid di Bali yang dinilai terbaik di Indonesia.

Semua pertimbangan dan permasalahan menjadi perhatian khusus pemerintah, kini hanya tinggal dilempar kembali ke masyarakat, apakah mau situasi perekonomian tetap seperti ini tanpa tahu sampai kapan atau

berusaha bertahan dengan beradaptasi dengan kondisi sekarang? Pilihan yang terbaik adalah mencoba untuk beradaptasi dengan situasi pandemi agar tetap produktif demi membangkitkan pariwisata dan perekonomian rakyat. Kita juga yakin bahwa ada kekuatan spiritual di Bali yang menjaga rakyat Bali. Kami harus percaya dengan kekuatan *niskala* (gaib). Ini pernah dibahas oleh media internasional tentang imunitas ini. Ini untuk motivasi.

Pariwisata di Provinsi Bali adalah sektor

unggulan yang menjadi mata pencaharian penduduk di Bali. Semenjak Covid 19, sektor pariwisata di Bali mengalami penurunan drastis. Untuk itu, di Bali memang sudah harus menerapkan sesuai kebijakan dan surat edaran pemerintah setempat untuk mengusahakan berjalannya kembali pariwisata walupun tergolong riskan. Setidaknya adanya pergerakan untuk mulai membangkitkan perekonomian masyarakat. □

AWG

Abdul Fikri Faqih, Anggota MPR Fraksi PKS

Sebaiknya Sektor Ekonomi Kreatif Digenjot

SEBAIKNYA pemerintah membuat kajian komprehensif dan melibatkan beberapa kementerian agar ada prioritas destinasi mana yang boleh mulai dibuka dan mana yang belum saatnya dibuka. Kalau di sektor pendidikan saja bisa dibuat SKB 4 Menteri sehingga baru 6% daerah yang boleh buka, itupun SMA/K lebih dulu baru SMP dan terakhir baru TK. Sembilan puluh empat persen yang lain belum boleh. Nah, sektor pariwisata sebaiknya bisa dianalogikan seperti itu sehingga tidak dibuka sembarangan.

Kalau pun sudah mulai dibuka maka sebaiknya konsep CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety and Enviroment*) yang sudah di-*launching* harus sudah didetailkan. *Cleanliness, Healthy, Safety and Enviroment*. Kalau sudah jadi segera disosialisasikan secara masif dan dilaksanakan disiplin.

Kebijakan membuka destinasi wisata harus diambil bersama masyarakat sehingga mereka merasa memiliki dan komitmen dengan kesepakatan yang sudah diambil. Pengawasan bisa sangat efektif bila dilakukan oleh mereka sendiri.

Penyebaran Covid-19 terjadi bila terjadi kerumunan, padahal destinasi wisata tempat berkerumun orang maka sudah selayaknya dibuat konsep penyebarannya. Sehingga pusat yang menarik dalam satu destinasi



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

tidak boleh hanya satu/tunggal. Andai karena dianggap daerah hijau sehingga sudah boleh dilaksanakan MICE maka harus dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sebelum pandemi Covid-19 ini memang devisa kita sangat terbantu dari sektor pariwisata. Menduduki peringkat ketiga nasional setelah CPO, *Oil and Gas*. Hanya saat pandemi ini sektor yang paling terdampak sehingga sebaiknya harus digenjot adalah ekonomi kreatifnya (ekraf), karena 17 subsektor ekraf ini melekat dengan pariwisata bahkan bisa mendongkrak hingga

1000% potensinya awalnya. Karena sekarang ada dalam satu kementerian maka koordinasinya menjadi semakin mudah.

Keluhan mereka pelaku Parekraf belum dapat bantuan dan fasilitas dari pemerintah untuk membangkitkan UMKM yang mereka geluti. Bantuan BLS pun dapatnya dari desa/kelurahan, bukan dari kementerian. Sebaiknya pemerintah pusat yang memfasilitasi pelaku ekraf didesak untuk segera terbit agar ada fasilitasi riil bagi pelaku ekraf untuk bangkit. □

AWG

Kota Sukabumi

Syarief Hasan Minta Presiden Menolak RUU HIP

RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) telah menimbulkan polarisasi di masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mengakhiri kontroversi RUU HIP ini.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RANCANGAN Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah menggelar demo untuk menolak RUU ini. Melihat kondisi itu, Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dengan penolakan secara tegas itu maka RUU HIP tidak lagi dibahas bersama DPR.

“Saya menyarankan dan minta kepada bapak Presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Jadi, bukan mengganti nama RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), tetapi secara tegas menolak RUU itu,” kata Syarief Hasan usai bertemu Walikota Sukabumi Achmad Fahmi di Rumah Dinas Walikota, Sukabumi, Rabu malam (8/

7/2020). RUU HIP menjadi salah satu topik pembicaraan antara Wakil Ketua MPR dengan Walikota Sukabumi.

Syarief Hasan mengungkapkan, Walikota Sukabumi melaporkan bahwa setiap hari selalu ada demo dari berbagai unsur di masyarakat yang menolak RUU HIP. Untuk itu dalam pertemuan silaturahmi, Syarief Hasan menjelaskan kepada Walikota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta.

“Saya menjelaskan kepada Walikota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta. Saya juga menjelaskan sedikit tentang pertemuan Pimpinan MPR hari ini (Rabu, 8 Juli 2020-*red*) dengan Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan dengan presiden juga disinggung soal RUU HIP ini,” tutur Syarief Hasan.

Menurut Syarief Hasan, RUU HIP telah

menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak kalangan masyarakat menolak RUU HIP. “Saya melihat RUU HIP ini justru menimbulkan polarisasi di masyarakat. Tentu kondisi seperti ini tidak baik. Karena itu, pemerintah harus mengakhiri kontroversi RUU HIP ini. Lebih baik perhatian kita curahkan pada persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” katanya.

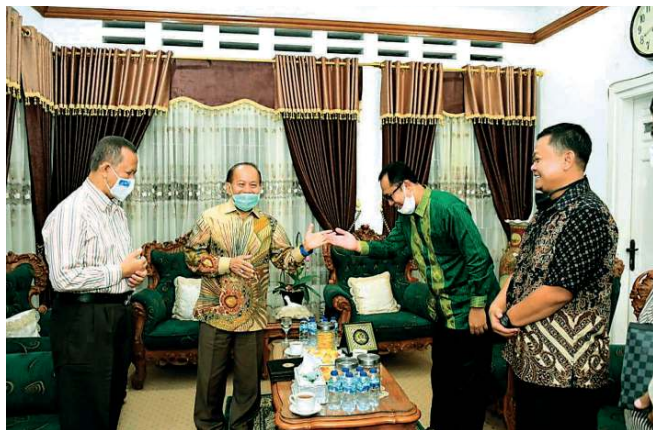
Syarief Hasan juga sudah menyampaikan persoalan RUU HIP ini kepada Presiden dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020). “Pada dasarnya kita mendorong RUU HIP ini ditolak saja. Saya minta presiden untuk menyuarakan penolakan itu. Tetapi Presiden menjawab masih akan mengkaji dan akan mengumumkan keputusan pemerintah pada 22 Juli,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli

2020 untuk merespons RUU HIP. Pilihan sikap pemerintah bisa dalam bentuk tidak mengeluarkan Surpres untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli (60 hari), mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, atau menyusun DIM yang mencoret semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat.

“Tetapi saya menyarankan dan minta kepada presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Kita menunggu respons dari presiden sampai 22 Juli. Kalau tidak ada respons dari pemerintah, artinya RUU HIP itu gugur,” ucap Syarief.

Selain RUU HIP, pertemuan silaturahmi Wakil Ketua MPR dengan Walikota Sukabumi juga membahas topik-topik lainnya, seperti



Istana Bogor. Syarief Hasan mengungkapkan, MPR akan menggelar Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2020. Sidang Tahunan MPR ini digelar secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meski digelar secara virtual, Sidang Tahunan MPR akan dihadiri presiden dan wakil presiden secara fisik.

“Kesepakatan dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden, Sidang Tahunan MPR akan dilakukan pada 14 Agustus 2020. Sidang Tahunan MPR dilakukan secara virtual dan memberlakukan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Presiden dan Wakil Presiden hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR ini,” katanya.

Menurut Syarief Hasan, secara substansi penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR pada

Lebih lanjut Syarief Hasan menjelaskan, Sidang Tahunan MPR kali ini hanya dihadiri beberapa orang dari perwakilan fraksi-fraksi. Anggota MPR lainnya (anggota DPR dan anggota DPD) akan mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR secara virtual. “Jadi, mereka yang hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR hanya beberapa orang perwakilan dari fraksi-fraksi dan DPD,” jelasnya.

Sidang Tahunan MPR sudah menjadi konvensi ketatanegaraan Indonesia sejak 2015. Sidang yang digelar setiap tahun ini merupakan sidang paripurna MPR yang diikuti seluruh anggota MPR dan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Agenda Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang



soal perkembangan Kota Sukabumi, wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan prestasi Kota Sukabumi sebagai zona hijau di era pandemi Covid-19.

Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menyebutkan, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin baru saja (Rabu pagi, 8/7/2020) melakukan kunjungan kerja di Sukabumi memberikan apresiasi kepada Kota Sukabumi sebagai zona hijau di masa pandemi Covid-19 ini. Syarief Hasan juga memberikan apresiasi kepada Walikota Sukabumi. “Status Kota Sukabumi sebagai zona biru ini luar biasa,” ujarnya.

Sidang Tahunan MPR

Usai bertemu Walikota Sukabumi, Syarief Hasan juga menjelaskan tentang Sidang Tahunan MPR yang dibahas dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden di

Agustus 2020 tidak ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maksud dan tujuan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tetap sama seperti tahun-tahun lalu. Namun, ada persoalan, yaitu Sidang Tahunan MPR ini digelar di masa pandemi Covid-19. “Tetapi, persoalan ini sebenarnya hanya masalah teknis dalam penyelenggaraannya saja,” ujarnya.

Syarief Hasan menyebutkan, sebelum ada pandemi Covid-19, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dilakukan secara normal. Tetapi untuk penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR kali ini harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. “Intinya, walaupun kita sekarang berada dalam masa pandemi Covid-19, penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dengan agenda penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara kepada rakyat tetap berjalan,” ujarnya.

mendapat mandat dari UUD NRI Tahun 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, lembaga kepresidenan, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. Pada Sidang Tahunan MPR sebelumnya, laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu disampaikan oleh presiden selaku kepala negara.

Syarief Hasan menambahkan, Sidang Tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan yang baik. Baik untuk lembaga-lembaga negara karena diberi kesempatan untuk menyampaikan kinerjanya kepada rakyat dan juga baik untuk rakyat yang secara langsung menerima laporan kinerja lembaga-lembaga Negara, dan mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara selama ini. “Saya lihat penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR efektif untuk lembaga-lembaga negara dan juga untuk rakyat,” ucapnya. □

BSC

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kolong

Dunia Literasi di Bawah Kolong Flyover



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

VIRUS corona Covid-19 masih terus mengancam keselamatan umat manusia. Wabah yang pertama kali berjangkit di Wuhan, Tiongkok, ini belum terlihat bakal menurun intensitas serangannya. Apalagi, obat dan vaksin yang diyakini benar bisa menghentikan serangan Virus Corona belum ditemukan.

Pada saat yang sama korban akibat serangan Virus Corona terus bertambah. Bukan hanya jumlah korban meninggal Corona telah berhasil memaksa umat manusia untuk berlama-lama tinggal di rumah. Dan, hanya boleh keluar untuk urusan yang memaksa.

Di Indonesia, dengan berlakunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan berbagai kegiatan seperti “mati suri.” Di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, misalnya, PSBB sangat terlihat dampaknya, termasuk bidang pendidikan. Tengoklah, di bawah kolong flyover Ciputat terdapat Taman Baca Masyarakat yang biasanya ramai dikunjungi para pecinta buku, kini terlihat kosong. Bahkan sudah sejak enam bulan silam atau saat anjuran *physical distancing* dikeluarkan, TBM Kolong ini sudah tak beraktivitas lagi.

“Semua kegiatan di TBM Kolong Ciputat, Tangerang Selatan, dihentikan hingga waktu belum ditentukan. Ini dilakukan untuk merespon anjuran pemerintah agar tetap tinggal di rumah, tidak berkerumun, dan *physical distancing*,” kata Victoria (21),

Ketua TBM Kolong saat dihubungi *Majalah Majelis* beberapa waktu lalu.

Tak heran kalau pada saat *Majalah Majelis* menyambangi TBM yang berada di bawah flyover Ciputat keadaan tampak sepi-sepi saja. Hanya ada beberapa bocah belasan tahun tengah bermain futsal. Sedangkan lokasi TBM yang berada di samping lapangan futsal tampak kosong. Hanya ada buku-buku yang berserakan dan berdebu.

Pemandangan itu diperjelas oleh pengumuman yang terpasang di pagar TBM Kolong yang berbunyi: TBM Kolong ditutup selama pandemi Corona, dan dalam waktu

yang belum ditentukan. Padahal, pada saat normal, siang menjelang sore, menurut Ria – begitu Victoria biasa disapa – situasi di tempat tersebut selalu ramai.

TBM Kolong biasanya buka setiap hari. Jadi, setiap hari pengunjung bisa datang untuk membaca buku. Tetapi, kegiatan di sini dibuka empat hari dalam satu pekan. Pada hari Selasa dan Kamis, pukul 16.00, ada kegiatan Bimbel. Pada hari Sabtu ada latihan Angklung. Sedangkan hari Ahad, diadakan kelas kreasi. “Kelas kreasi biasa diisi berbagai kegiatan, termasuk kerjasama dengan komunitas lain untuk memberi bekal keterampilan pada anak-anak,” kata anak





kedua dari empat bersaudara pasangan Suyadi dan Yohana Nila Sari A.

Fisip Mengajar

Taman Bacaan Masyarakat Kolong berdiri sejak 4 Juni 2016. TMB Kolong merupakan sub kegiatan FISIP Mengajar. Ceritanya, saat itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah memiliki aktivitas literasi hingga di berbagai tempat. Namun, dari sekian yang sekian banyak itu, malah tidak ada satu kegiatan pun yang menyentuh wilayah di sekitar kampus UIN itu berada.

Berbekal pemikiran tersebut maka di-



upayakanlah mendirikan taman bacaan di Ciputat bekerja sama dengan Orang Indonesia (OI) Fans Club Iwan Fals Cabang Tangsel. Tidak butuh waktu lama, TBM di Ciputat itu pun berdiri dengan memanfaatkan posko Satpol PP yang memang jarang digunakan.

“Setelah TBM ini berdiri kami tidak langsung bisa mengajak anak-anak membaca di sini. Butuh perjuangan, karena saat itu masyarakat antipati terhadap tempat tersebut. Maklum, sebelum ada TBM, di tempat tersebut lebih sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang kerap berulah, sehingga menimbulkan kerawanan sosial,” cerita Ria.

Melihat kondisi tersebut para relawan bergerak keluar masuk kampung, mengajak anak-anak untuk membaca dan berkegiatan di TBM Kolong. Namun, niat tersebut bukan

tanpa halangan. Suatu saat, ketika mengajak anak-anak bermain, ada beberapa orangtua yang mengira bahwa anak-anaknya diculik. Beruntung peristiwa tersebut bisa diatasi dan tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.

Agar hubungan dengan para orangtua terjalin baik, pengurus TBM Kolong lalu menyertakan mereka (orangtua) dalam berkegiatan. Di antaranya kegiatan pemberian pendidikan seputar keterampilan membuat kerajinan. Dengan cara itu hubungan dengan masyarakat pun semakin baik. Apalagi, pengurus TBM juga banyak berhubungan dengan aparat setempat, mulai dari RT, RW hingga kelurahan.

“Saat ini kami relatif mudah dalam berhubungan dengan masyarakat. Apalagi pemerintah Tangsel mendukung kegiatan ini. Pemerintah Tangsel ikut menjaga dan merawat, serta membantu TBM, salah satunya dalam bentuk tenaga kebersihan. Mereka ikut merawat dan menjaga kebersihan di sekitar TBM,” kata Ria lagi.

Selama tutup karena pandemi Corona, menurut Ria, pihaknya mencoba tetap berhubungan dengan masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, sejak beberapa waktu lalu sudah dibikin grup *WhatsApp*. Dengan harapan aktivitas dan perkembangan anak-anak bisa dipantau dengan baik.

Tanpa mengendurkan semangat, TBM Kolong berharap bisa terus menebarkan semangat literasi di seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai kawasan. Karena itu, dalam waktu dekat, mereka akan membuka tempat-tempat bacaan lain di lokasi yang berbeda. □

MBO



MPR RI dan APKASI Tandatangan MoU Sosialisasi Empat Pilar MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat penandatanganan MoU antara MPR RI dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk meluaskan cakupan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI hingga ke berbagai pelosok daerah. Kehadiran kepala daerah untuk menyemarakkan Empat Pilar MPR RI akan menjadi tambahan daya dorong MPR RI dalam membumikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Para kepala daerah merupakan ujung tombak dalam mengelola tata kehidupan bermasyarakat. Semangat membangun daerah harus diselaraskan dengan semangat membangun ikatan kebangsaan. Di sinilah letak urgensi perlunya para kepala daerah terlibat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sehingga bisa bersama-sama menguatkan narasi kebangsaan yang berisikan nilai-nilai luhur bangsa, baik kepada perangkat pemerintah daerah maupun kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bamsoet usai mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Penandatanganan MoU antara MPR RI dengan APKASI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (8/7/20).

Dari pengurus APKASI hadir, antara lain Ketua Umum Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Sekretaris Jenderal Najmul Akhyar (Bupati Lombok Utara), serta anggota para anggota seperti Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Bogor Ade Yasin, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, serta Direktur Eksekutif Sarman Simanjourang.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, Pasal 18 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang. Frasa “dibagi atas” (dan bukan “terdiri atas”) menegaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di Pusat. Sedangkan frasa “terdiri atas” merujuk pada konsep federalisme, di mana kedaulatan berada di tangan masing-masing negara bagian.

“Para pendiri bangsa menyadari, karena kemajemukan bangsa, formulasi organisasi bernegara tidak bisa dikelola dengan menerapkan paham sentralistik. Kebijakan sentralistik hanya akan



menjadikan daerah sebagai obyek, dan mengesampingkan hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerahnya

sesuai karakteristik, kondisi obyektif, serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” papar Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini meyakini, dengan melibatkan para kepala daerah, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI akan berjalan semakin efektif dengan diwarnai kearifan dan budaya lokal setempat. Sekaligus menguatkan dinamika kehidupan masyarakat di 416 Kabupaten di seluruh Indonesia tetap memiliki keterkaitan dengan kehidupan nasional.

“Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Empat Pilar MPR RI akan semakin meneguhkan prinsip demokrasi pemerintahan daerah, tidak menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkask Bamsuet. □

Sosialisasi Empat Pilar Virtual

Generasi Milenial Jangan Abai Nilai Luhur Pancasila



KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menggugah kembali kesadaran kolektif bangsa, khususnya generasi milenial, tentang betapa besarnya sumbangan Indonesia terhadap dunia. Khususnya, dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan beradab. Memperkenalkan Pancasila dalam pidato di depan Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956 dilanjutkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XV 30 September 1960, Presiden Soekarno berhasil membuat dunia menggelegar.

Melalui Pancasila, kata Bamsoet, Indonesia menjadi ujung tombak dalam menstabilkan dunia yang tengah diguncang residu akibat Perang Dunia II yang mengakibatkan terbelahnya dunia menjadi Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat. Konsepsi Pancasila yang ditawarkan Indonesia disambut baik oleh berbagai negara di Asia dan Afrika, hingga akhirnya berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 - 24 April 1955 di Bandung.

“Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antarnegara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya,” ujar Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada kader Yayasan Pelangi Nusantara

Abadi, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/20).

Hadir dalam acara itu, Ketua Yayasan Pelangi Nusantara Abadi Eric Yansen Sihotang, Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Idham Kholik, Anggota DPRD Kota Bekasi Yogi Kurniawan, Founder Bekasi Bersedekah Jimmy Reinold, Ketua





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

HMI Cabang Bekasi Mustofa Kamal dan aktivis GMNI Patra. Dan, ratusan peserta lainnya mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini tak menginginkan konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia, justru menjadi mundur ke belakang akibat abainya generasi muda memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan pemersatu bangsa telah memberikan inspirasi dan landasan moral bagi bangsa Indonesia membuktikan diri sebagai bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, memegang teguh persatuan, mengutamakan musyawarah, dan adil dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Kini di masa pandemi Covid-19, saya

telah menyaksikan sendiri bagaimana laku Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap insan umat beragama, misalnya, semakin khushuk dan taat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana setiap rumah juga menjadi rumah ibadah, sebagai dampak penutupan sementara rumah-rumah ibadah yang masih berlangsung di beberapa daerah,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menambahkan, setiap insan manusia Indonesia saat ini benar-benar belajar bagaimana menajamkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab ketika melihat saudara-saudara sebangsanya mengalami kondisi yang berat. Rakyat bahu-membahu bergotong royong membantu apa yang mereka bisa dan memberi apa yang mereka punya. Kondisi ini jugalah yang semakin menguatkan

semangat persatuan Indonesia.

“Kondisi ini bertolak belakang dengan para pemangku kebijakan yang lebih banyak mementingkan ego sektoral. Bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo marah besar lantaran tidak ada progres signifikan. Dengan tegas Presiden Joko Widodo sudah meminta para pembantunya agar memiliki perasaan *sense of crisis* yang sama sehingga bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah berada satu barisan dalam bertukar pikiran, berdiskusi, dan bermusyawarah merumuskan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat. Pandemi Covid-19 harus menjadi pembuktian bahwa para elite pemangku kebijakan berada di garis depan menegakan Pancasila, khususnya dalam melaksanakan sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Jangan sampai krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 membawa berbagai krisis lainnya, seperti krisis ekonomi, sosial, politik, bahkan krisis kepemimpinan. Para elite dan pejabat publik harus hadir dalam kehidupan rakyat. Masa pandemi harus dijadikan momentum yang tepat dalam meneladankan nilai-nilai Pancasila secara kolektif, sehingga menjadi kekuatan besar yang dapat membawa Indonesia bangkit melawan pandemi Covid-19,” pungkas Bamsoet. □



Diskusi Empat Pilar

Sidang Tahunan MPR pada Masa Pandemi Corona

DISKUSI Empat Pilar yang berlangsung Jum'at (17/7/2020) di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, memilih tema: 'Sidang Tahunan MPR RI, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara.' Tiga orang narasumber hadir dalam diskusi ini, yaitu: Wakil Ketua MPR H. Arsul Sani, S.H., M.Si., dan Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A., dan pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana Jakarta, Dr. Syaifuddin, M.Si.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang tampil sebagai pembicara pertama

sebelumnya," jelas Hidayat.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, sebelumnya MPR sudah mewacanakan agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR kali ini berbeda dengan sebelumnya. Direncanakan, laporan kinerja lembaga-lembaga negara itu tidak disampaikan oleh presiden, tetapi langsung oleh pimpinan lembaga-lembaga negara. Namun, rencana itu urung karena pandemi Corona.

"Akan sangat menarik kalau satu hari, sebelum HUT Kemerdekaan, bangsa Indonesia menyimak laporan kinerja lembaga-

daerah," kata Arsul lagi.

Pengaturan MPR dengan UU tersendiri, menurut Arsul, akan membuat pelaksanaan Sidang Tahunan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dibanding memakai Tatib MPR. Karena pengaturan dengan Tatib tidak memiliki sifat memaksa, sebagaimana jika diatur menggunakan UU.

Sidang Tahunan MPR yang akan dihelat 14 Agustus itu diapresiasi oleh pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta, Dr. Syaifuddin M.Si. Menurut Syarifuddin, Sidang Tahunan MPR me-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR pertama kali dilaksanakan pada periode 2014-2019. Selama lima tahun itu Sidang Tahunan MPR berjalan dengan baik. Terlaksananya Sidang Tahunan MPR pada 2020, kata Hidayat Nur Wahid, merupakan sebuah keniscayaan sebagai perwujudan amanat dari Tata Tertib MPR RI.

Dalam Sidang Tahunan MPR itu, menurut Hidayat, MPR sebagai penyelenggara hanya memfasilitasi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat Indonesia. Tahun ini, karena masih Pandemi Corona pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dilakukan secara langsung dan terbatas. Dipimpin oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD. "Sidang tak bisa berlama-lama seperti tahun-tahun

lembaga negara. Seluruh program yang akan, sedang, dan sudah dilakukan dibahas secara terbuka, disampaikan kepada masyarakat. Dan, itu bisa menjadi kado terindah bagi perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia," kata Arsul.

Penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh masing-masing pimpinan lembaga negara, kata Arsul, akan lebih menarik. Karena laporan yang disampaikan bisa lebih bervariasi dan lengkap, meliputi kekurangan dan kelebihan masing-masing lembaga negara. Termasuk juga menyoal undang-undang yang mengatur lembaga negara tersebut.

"MPR misalnya, akan lebih baik jika diatur oleh UU MPR tersendiri, bukan menggunakan UU MD3. Apalagi, saat ini, DPRD sudah diatur tersendiri bersama dengan pemerintahan

rupakan sebuah kebijakan publik yang sangat bagus dalam membangun demokrasi. Karena itu, keberadaan Sidang Tahunan harus bisa berkembang secara baik.

Selain itu, Syaifuddin juga menyebut bahwa Sidang Tahunan MPR merupakan sebuah kebijakan politik yang sangat cantik. Karena memberi ruang kepada lembaga-lembaga negara untuk tampil menyampaikan laporan kerjanya secara mandiri. Dan, tidak sentralistik disampaikan oleh Presiden.

"Sidang Tahunan adalah Kado terbaik bagi bangsa Indonesia, karena memberikan keterbukaan soal laporan kinerja. Sehingga ada terjadi pertukaran pesan dari lembaga negara kepada masyarakat," kata Syaifuddin yang juga menjadi salah satu narasumber pada diskusi tersebut. □

MBO

Bamsoet Ajak Kaum Milenial Membumikan Pancasila

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Di rentang waktu tahun 2020 hingga 2035, jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia.

“Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran. Nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat. *Pertama*, jumlah usia produktif tersebut merupakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. *Kedua*, ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech pada acara Milenial Talk Conference 2020 yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Ahad (5/7/20).

Turut hadir Direktur Eksekutif Milenial Talk Institute Indonesia Hasan Basri, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Agus Mulyono Herlambang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yacut Cholil Qoumas, Walikota Bogor Bima Arya, Jubir Menhan RI Dahnil Anzar, Penulis Buku Pancasila Ideologi Dunia Saddam Al Jihad, serta ratusan milenial



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mengarahkan industri rumah tangga membuat komponen *hand-phone*. Tiongkok dengan cara mengarahkan industri rumahan memproduksi komponen elektronik. Sedangkan Jepang berhasil mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif sehingga tingkat penganggurannya sangat kecil, kurang dari 3%.

“Tidak semua negara sukses. Misalnya Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang

berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal karena kurangnya perhatian pada kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja serta rendahnya tingkat pertumbuhan lapangan perkerjaan, sehingga sekitar 53% generasi milenial Afrika menjadi pengangguran,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia selain harus berdampak positif terhadap perekonomian juga harus membawa dampak



besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila. Mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman, tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.

“Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita. Misalnya, pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita,” tandas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, jika budaya asing seperti LGBT dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa kita, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia. Keprihatinan ini bukan mengada-ada, terutama bila kita merujuk pada beberapa publikasi hasil survei.

Survei LSI tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10%. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro-Pancasila mencapai 85,2%, dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3%.

Survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020

oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61% responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

“Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekedar hafalan luar kepala,” pungkas Bamsuet. □

PSB Kota Bogor

Gelar Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal



Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz



Siti Fauziah

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

MASIH dalam suasana kenormalan baru (*New Normal*), sebagai dampak dari pandemi Covid-19, Pagelaran Seni Budaya Nasional sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berlangsung. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, Pagelaran Seni Budaya ini digelar di Aula Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) di Jalan Padjadjaran, Kota Bogor, Ahad siang (5/7/2020).

Peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Bogor ini adalah warga masyarakat

dari berbagai kalangan dengan jumlah yang dibatasi. Namun, warga masyarakat yang tidak hadir di tempat berlangsungnya acara, bisa menyaksikan Pagelaran Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal Kota Bogor ini di rumah atau di mana saja melalui saluran Youtube dan media sosial lain lewat program *live streaming*.

“Sayang, sekarang ini kita masih dalam suasana menghadapi pandemi corona sehingga jumlah peserta harus dibatasi. Namun, untuk mereka yang tidak hadir di

tempat acara bisa mengikuti acara ini lewat siaran *live streaming* di Youtube dan media sosial lainnya,” ujar Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., dalam laporannya selaku penyelenggara kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR, menurut Siti Fauziah, memang punya komitmen untuk terus mengangkat dan ikut melestarikan seni budaya daerah yang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ada di berbagai daerah di Indonesia. “Tekad itu ditunjukkan oleh MPR dengan memasukkan pagelaran seni budaya sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR,” ungkap Bu Titi, sapaan akrab Siti Fauziah.

Nah, untuk penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya di Kota “hujan” Bogor ini, MPR bekerjasama dengan Komunitas Iket Tatar Pakuan (Kitapak) — sebuah komunitas seni Sunda yang hidup dan berkembang di Kota Bogor. Kesenian yang ditampilkan kali ini adalah *Karinding* dan *Celepung*, merupakan jenis kesenian Sunda yang oleh Siti Fauziah dikatakan, kalau tak boleh disebut hampir punah, ya paling tidak sudah jarang diperlihatkan atau diperdengarkan di muka umum.

“Alhamdulillah atas inisiasi anggota MPR

RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., MM., kesenian Sunda ini bisa ditampilkan di Kota Bogor. Neng Eem memang sangat konsen terhadap pelestarian seni budaya daerah,” puji Siti Fauziah. Bahkan, bukan hanya seni budaya, dalam kesempatan ini Neng Eem juga memperkenalkan kuliner lokal Kota Bogor yang punya historis, antara lain: laksa, toge goreng, tutut tumis (keong sawah), talas kukus, es bir kotjok, dan es pala.

Acara yang didahului pembacaan ayat-ayat suci Al quran ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mewakili Pimpinan MPR RI. Pembukaan ini ditandai dengan membunyikan alat-alat musik oleh Neng Eem, Siti Fauziah, Budi Muliawan

(Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Biro Humas MPR), Lusiana (anggota DPRD Kota Bogor), Abah Ukar Sukandi (Ketua Kitapak), dan tamu-tamu kehormatan lainnya.

Selaku narasumber materi Empat Pilar MPR, Neng Eem menguraikan pentingnya seni budaya daerah dan kuliner lokal dalam memperkuat identitas bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Bogor bersama kota-kota lainnya termasuk kota penyangga Ibukota Jakarta. Karena Jakarta dikenal sebagai Kota Metropolitan maka secara otomatis kota-kota penyangga juga ikut menjadi metropolis, dan akibatnya budaya pun semakin heterogen.

“Oleh karena itu, kalau budaya lokal dan makanan lokal tidak dirawat maka akan punah,” ungkap Neng Eem. Untuk merawat dan menjaga agar budaya dan kuliner lokal ini agar tidak punah, menurut Neng Eem, adalah menjadi tugas kita semua, terutama dia sebagai anggota MPR. Salah satu bentuk kegiatan untuk merawat budaya dan makanan lokal adalah melalui kegiatan pagelaran seni budaya dan kuliner lokal Kota Bogor ini. Tujuan kegiatan ini, jelas Neng Eem, agar kita tetap mencintai seni budaya lokal dan kuliner lokal, khusus untuk Kota Bogor adalah seni budaya Sunda dan kuliner lokal Kota Bogor.

Lebih lanjut Neng Eem menyatakan, mencintai budaya Sunda dan mencintai makanan Sunda adalah merupakan bentuk upaya mempertahankan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya bangsa, tentu saja budaya Sunda yang ada di Kota Bogor ini menunjukkan bagian dari kebhinnekaan itu sendiri.

“Jadi, kalau kita mencintai budaya lokal dan mencintai makanan lokal maka kita tak akan tercerabut dari akar budaya kita, tak akan tercerabut dari identitas kita, dan sudah barang tentu akan memperkuat identitas bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Neng Eem. Dan karena budaya pula, tandas Neng Eem, membuat Indonesia menjadi kuat dan kokoh. □

SCH



Forum Birokrat Masyarakat Indonesia (FBMI)

Isyarat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Makin Mendesak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengingatkan pentingnya memahami Pancasila secara utuh, baik dan benar. Pemahaman Pancasila dengan baik, itu penting agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kekacauan dalam bernegara. Seperti pada peristiwa munculnya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menciptakan kegaduhan di masyarakat Indonesia. Yang memprihatinkan, kegaduhan itu muncul di saat bangsa Indonesia sedang dilanda darurat kesehatan Covid-19 dengan segala dampaknya: sosial, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain-lain.

“RUU HIP menggambarkan bahwa apabila kita tidak memahami Pancasila secara utuh, baik dan benar, akan menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari masyarakat yang sangat luas. Bukan hanya dari dalam DPR, MPR, dan DPD, juga masyarakat lintas ormas Agama. Juga dari kalangan Legiun Veteran RI, Pemuda Pancasila, dan lain-lain,” ujarnya saat Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta II dengan Forum Birokrat Masyarakat Indonesia (FBMI) di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Munculnya RUU HIP, kata Hidayat, menjadi isyarat semakin mendesaknya Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Karena sesungguhnya, yang harus memahami dan melaksanakan Pancasila adalah Pimpinan Negara di berbagai tingkatan, dan disemua cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif).

HNW menegaskan, segenap anggota Forum Birokrat Masyarakat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, terlebih ketika melaksanakan amanah sebagai birokrat, dan berinteraksi dengan masyarakat.

“Ketika tidak memahami Pancasila maka tidak akan amanah, tidak produktif, bahkan bisa kacau seperti hadirnya RUU HIP. Melalui sosialisasi, bapak-bapak atau generasi muda, diharapkan bisa fokus dalam memahami Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana menjadi Birokrat Indonesia yang amanah. Supaya bisa mengelola masyarakat dan negara dengan baik dan benar, tidak menimbulkan kontroversi yang kontraproduktif,” tukasnya.

Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa RUU HIP bisa menjadi bahan pelajaran bahwa Pancasila sebagai filosofi dan dasar negara tidak bisa di-*down grade* menjadi setara

dengan UU, atau bisa diperas menjadi Trisila, apalagi Ekasila. Selain itu, Pancasila juga tidak bisa dihadirkan tanpa mementingkan sila pertama secara penuh, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, “Bukan hanya Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan sebagaimana yang ada dalam RUU HIP yang ditolak itu,” tegasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahaya yang muncul apabila tidak memahami Pancasila secara benar. Yaitu, tidak bisa memahami siapa saja yang telah berjasa dan berkorban mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara.

“Kalau kita tidak paham bahwa dasar negara adalah Pancasila maka akan terjadi *Islamophobia*, juga *Indonesiaphobia*. Seolah-olah tidak ada jasa umat Islam dalam pembuatan Pancasila. Dan atau sebaliknya seolah-olah Indonesia merdeka tidak ada keterkaitan dan kontribusi tokoh-tokoh Umat Islam, baik dari Ormas maupun Orpol Islam,” katanya.

Karena itu, kata Hidayat Nur Wahid, para birokrat perlu memahami Pancasila dengan baik. Termasuk memahami, bagaimana keterlibatan umat Islam dalam menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Riwayat dari Nahdlatul Ulama (NU) bahkan menuturkan bagaimana K.H. Hasyim Asyari sampai puasa dan sholat malam khusus untuk meminta petunjuk Indonesia merdeka.

Pada peristiwa itu juga terdapat peran besar dari Ki Bagus Hadikoesoemo (Muhammadiyah) maupun M. Natsir (Masyumi). Peristiwa Ini harus selalu diingat dalam membangun masyarakat maupun dalam menyelamatkan Indonesia, termasuk menyelamatkan bangsa Indonesia apabila ada pihak yang ingin menyelewengkan Pancasila. Juga menyelamatkan Indonesia dari separatisme yang ingin merongrong NKRI. Para birokrat penting memahami sejarah seperti ini, agar mereka bisa berkiprah maksimal, membangun dan menyelamatkan Indonesia tanpa ragu-ragu. □

Delegasi Pengurus KAHMI

Bamsoet Ajak Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI



KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, sikap Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sejalan dengan MPR RI serta Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Pumawirawan Angkatan Darat (PPAD), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang menilai Pancasila sebagai ideologi negara tak tepat diatur dalam undang-undang. Atas dasar itu, RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak perlu dilanjutkan pembahasannya, karena hanya akan mendatangkan banyak polemik dalam kehidupan kebangsaan.

“Yang perlu diatur adalah teknis pengelolaan pembinaan Pancasila yang dijalankan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jadi, yang diperlukan adalah payung undang-undang untuk BPIP, bukan RUU HIP. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI beberapa waktu lalu juga telah menyatakan bahwa pemerintah sudah menugaskan Menkopulhukam Mahfud, MD., untuk mengkaji pengusulan payung undang-undang untuk BPIP,” ujar Bamsoet saat menerima Pengurus KAHMI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (14/7/20).

Mantan Ketua DPR RI ini juga mengajak KAHMI yang memiliki kader tersebar ke berbagai daerah, bisa membangun kerjasama dengan MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Dukungan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KAHMI akan semakin mewarnai dukungan kalangan organisasi keagamaan dalam menguatkan solidaritas kebangsaan yang dirangkai dalam Empat Pilar MPR RI.

“Dimensi amal usaha yang kini sedang dibangun KAHMI melalui *Universitas Digital*, *TV Channel*, dan *website online commercial*, merupakan wujud nyata KAHMI dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar MPR RI. Sinergi lebih jauh antara MPR RI dan KAHMI harus banyak melahirkan terobosan dalam implementasi Empat Pilar MPR RI. Tak boleh hanya sebatas dalam pelaksanaan seminar ataupun simposium saja, melainkan harus ada kreatifitas lainnya yang *out of the box*,” tutur Bamsoet.

Mantan Presidium KAHMI dan Anggota Dewan Pakar KAHMI ini menuturkan, Pre-

siden Soekarno sebagai *founding father* sekaligus proklamator telah mengingatkan bahwa ‘Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Indonesia negara semua buat semua. Itu menunjukkan semangat gotongroyong adalah bagian penting dalam membangun bangsa dan negara.

“Empat Pilar MPR RI yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan titik temu, titik pijak, dan titik tuju bangsa Indonesia. Semakin banyak elemen bangsa yang terlibat di dalamnya akan semakin membuat masa depan Indonesia cerah. Sebagai sebuah bangsa maupun sebuah negara, Indonesia akan tetap terjamin ada sampai kapanpun, tak terpecah belah, tak hilang ditelan zaman,” pungkas Bamsoet. □

Sosialisasi Empat Pilar

MPR Tempuh Langkah Kreatif

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tak seperti menara gading yang kaku terhadap perubahan zaman.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo memainkan cara baru dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yakni dengan menggandeng para selebritis dan *youtuber* melalui kanal akun youtube *Bamsuet Channel*. Setelah sebelumnya berkolaborasi dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kini Bamsuet ngevlog bareng Jessica Iskandar di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/20).

“Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui kanal youtube *Rans Entertainment* memiliki 16,5 juta subscriber dengan *follower* Instagram 42,4 juta. Sedangkan Jessica Iskandar memiliki 1,8 juta *subscriber* dengan *follower* 23,2 juta. Kolaborasi dengan mereka dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI ditujukan untuk menasar generasi muda maupun kalangan masyarakat yang aktif bersosial media melalui youtube. MPR RI tak boleh ketinggalan zaman, harus selalu kreatif agar penanaman Empat Pilar MPR RI semakin membumi dan yang tak kalah penting, selalu *up to date*,” ujar Bamsuet.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, kolaborasi bersama artis dan *Youtuber* tak hanya akan berhenti pada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, maupun Jessica Iskandar saja. Sudah ada beberapa daftarnya-nama lainnya yang akan diajak. Sehingga bisa semakin meramaikan dunia media sosial dengan konten bermanfaat seperti Empat Pilar MPR RI.

“Riset terbaru *We Are Social* bersama Hootsuite melaporkan ada peningkatan 25 juta jumlah pengguna internet di Indonesia dari 2019 ke 2020, yakni menjadi sebesar 175,4 juta pengguna internet. 160 juta diantaranya aktif di media sosial seperti youtube, instagram, twitter, maupun facebook. Youtube menempati peringkat pertama sebagai platform yang sering dikunjungi, yakni sebesar 88%,” papar Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menilai, memanfaatkan media sosial untuk Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan cara yang segar merupakan salah satu langkah kreatif MPR RI agar bisa tetap lebih dekat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan rakyat. Mengingat saat ini masyarakat Indonesia, khususnya generasi Z dan milenial lebih senang menyaksikan video dibanding membaca.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menggunakan platform media sosial akan melengkapi cara konvensional yang sudah dilakukan berupa seminar, diskusi publik, maupun

lomba. Ke depan akan banyak lagi cara-cara baru yang dilakukan MPR RI agar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tak seperti menara gading yang kaku terhadap perubahan zaman. Pergerakan zaman adalah keniscayaan, perubahan *mindset* MPR RI dalam menghadapinya adalah keharusan,” pungkas Bamsuet. □



Sosialisasi Empat Pilar di Bali

Bamsoet Ajak Pemuka Agama Jaga Kebhinekaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan peran para pemuka agama sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain sebagai sistem pendingin hati masyarakat dan pengayom, para pemuka agama mempunyai posisi penting dalam menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa.

“Para pemuka agama kini mempunyai tantangan yang tidak ringan. Selain merekatkan ikatan kebangsaan, pemuka agama juga harus menjadi bagian dari penyejuk masyarakat, bangsa dan negara,” ujar Bamsoet dalam Bincang Santai Sosialisasi Empat Pilar Antar Umat Beragama di Depansar Bali, Rabu malam (15/6/20)

Acara yang digelar oleh Gerakan Membangun Solidaritas (Gerak BS) Bali itu menghadirkan pembicara utama Gus Nuril Arifin Husein dan para tokoh lintas agama di Bali.

Mantan Ketua DPR RI ini menandakan, kerukunan antarumat beragama menjadi pondasi utama bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jangan

sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti di Timur Tengah yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi, konflik yang mengatasnamakan agama.

“Kedamaian dan kelangsungan negara harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai kita terjebak dalam konflik horizontal berkepanjangan yang tidak akan ada habisnya. Konflik di berbagai negara Timur Tengah telah menjadi pelajaran penting bagi kita. Agama seharusnya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia, bukan sebagai alat adu domba,” terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menuturkan, pada dasarnya tidak ada satu agama apapun mengajarkan radikalisme ataupun terorisme. Tindakan teror yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sama sekali bukan karena adanya pengaruh ajaran agama tertentu. Tetapi, karena ulah manusia, baik individu maupun golongan, yang bersifat radikal dan tak

menginginkan adanya kedamaian.

“Tidak ada ajaran agama manapun yang mengajarkan radikalisme, kebencian serta permusuhan. Namun yang ada adalah orang radikal yang memeluk agama tertentu. Jadi, bukan salah agamanya, melainkan salah orangnya,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, masih ada orang-orang radikal yang ingin mengacaukan NKRI. Karena itu, semua pihak harus waspada. Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum maupun pemimpin lingkungan setempat jika melihat orang atau kelompok yang mencurigakan dan mengganggu ketenangan masyarakat.

“Kita perkuat solidaritas sampai ke lingkup terkecil di RT dan RW. Masyarakat jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum maupun pemimpin lingkungan setempat jika ditemukan adanya orang atau kelompok yang meresahkan. Dengan demikian kita akan tutup pergerakan orang-orang berhaluan radikal sampai ke lingkup yang terkecil,” pungkas Bamsoet. □

Nge-Vlog Bareng Irfan Hakim

Bamsoet Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo nge-vlog bareng selebritis sekaligus pecinta hewan, Irfan Hakim, yang memiliki *subscribers youtube* 4,9 juta. Ini adalah kolaborasi keempat Bamsoet bersama selebritis dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada kawula muda melalui konten Youtube *Bamsoet Channel*. Sebelumnya, Bamsoet sudah berkolaborasi dengan artis dan presenter Raffi Ahmad, Jessica Iskandar (Jedar), dan Baim Wong. "Kolaborasi bersama selebritis yang sudah memiliki banyak subscriber adalah cara terbaru dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui video di youtube, *subscriber* selebritis dengan jumlah jutaan bisa turut menyaksikan konten tentang Empat Pilar MPR RI," ungkap Bamsoet di Jakarta, Ahad (12/7/2020).

Kolaborasi ini sekaligus menunjukkan kepedulian para selebritis terhadap kondisi bangsa dan negara. "Di balik kehidupan mereka yang disorot lampu popularitas dan dunia glamor keartisan, mereka masih mau menyiapkan waktu membuat konten Empat Pilar MPR RI dengan pesan persatuan untuk seluruh anak bangsa," ujar mantan Ketua DPR RI ini.

Melalui konten Youtube, Bamsoet menyatakan, tak perlu mengumpulkan banyak orang di sebuah ruangan untuk memberikan edukasi tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Sosialisasi Empat Pilar MPR RI melalui youtube termasuk yang efektif, sekaligus bisa

menjangkau siapapun dari tempat manapun.

Memahami Empat Pilar MPR RI tak lagi dengan suasana yang serius, seperti seminar ataupun simposium. Cukup klik video konten di Bamsoet Channel, nonton sambil rebahan pun jadi. "Tentunya, kontennya dibuat menarik dan beragam. Misalnya, dengan Raffi Ahmad sambil membahas mobil listrik, dengan Jessica Iskandar sambil adu gombal, dengan Baim Wong sambil ngobrol santai, dengan Irfan Hakim sambil merawat hewan peliharaan," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini mengungkapkan, MPR RI memahami tak

semua segmen masyarakat bisa menyukai seminar atau simposium. Tak semuanya juga suka Youtube. Karena itu, berbagai media dimasuki. Dari mulai seminar, simposium, media sosial seperti youtube, pagelaran lomba, nongkrong bareng komunitas, hingga melalui pendekatan seni dan budaya.

"Apapun medianya, terpenting pesannya sampai. Bahwa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika adalah kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Patut dijaga dan diamalkan oleh seluruh anak bangsa," pungkas Bamsoet. □



Setjen MPR dan BSSN Teken MoU Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menandatangani MoU Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, Jumat (10/7/2020). Acara yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, dihadiri beberapa pejabat eselon II dan eselon III Setjen MPR, Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak dan pejabat teras BSSN.

Usai penandatanganan MoU, di tempat yang sama juga dilaksanakan penandatanganan secara elektronik Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem

Lebih jauh, Ma'ruf Cahyono menjelaskan, cakupan tugas-tugas Setjen MPR tersebut tentu menghasilkan banyak sekali dokumen-dokumen negara yang harus dilindungi. Ditambah lagi dokumen-dokumen lembaga MPR RI yang memiliki nilai strategis dan sejarah sangat tinggi, seperti Ketetapan-Ketetapan MPR dan komposisi Pimpinan serta anggota MPR berbagai periode.

Sistem aplikasi di Setjen MPR untuk mendukung kinerja, lanjut Ma'ruf, juga cukup banyak dan butuh perlindungan keamanan, antara lain sistem tata kelola keuangan, tata kelola sosialisasi, tata kelola barang milik Negara. Serta yang terbaru dan sudah selesai sistemnya adalah sistem tata kelola aspirasi masyarakat juga daerah berbasis



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Elektronik di Setjen MPR oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, dan Kepala Balai Sertifikat Elektronik BSSN, Rinaldy.

Dalam keterangan kepada media, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan bahwa kerjasama antara Setjen MPR dan BSSN bertujuan untuk mewujudkan arah kebijakan pemerintah sekarang, yakni mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini merupakan momentum baik bagi Setjen MPR dan BSSN. Setjen MPR membutuhkan kepastian keamanan seluruh lalu lintas informasi, komunikasi, apalagi transaksi elektronik.

"Realisasi keamanan tersebut sangat vital, mengingat cakupan tugas Setjen MPR sebagai unsur pendukung MPR cukup luas, meliputi tugas-tugas konstitusional MPR dan tugas-tugas yang diamanahkan Pasal 5 UU MD3/ UU No.17 tahun 2014, antara lain memasyarakatkan Ketetapan MPR, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta melakukan pengkajian sistem ketatanegaraan. Sedangkan BSSN memiliki tugas luar biasa, yaitu bagaimana memastikan sistem berbasis elektronik itu aman, terutama di ruang siber. Inilah pentingnya kerjasama ini dilakukan," katanya.

TI, di mana seluruh rakyat Indonesia termasuk di luar negeri bisa menyalurkan aspirasinya secara *real time*.

"Saya berharap, dari cakupan tugas-tugas Setjen MPR tersebut, BSSN akan bisa melihat dan menganalisa sejauh mana BSSN bisa melindungi dengan sangat aman. Tentu dari MoU ini, kita semua berharap akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kita semua," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Hinsa Siburian memberikan apresiasinya kepada Setjen MPR yang sangat peduli terhadap keamanan dokumen-dokumen pentingnya. Hinsa juga menegaskan dengan terjalannya kerjasama antara Setjen MPR dan BSSN, BSSN akan mendukung kepastian keamanan informasi dan transaksi elektronik Setjen MPR di ruang siber.

"Saya sepakat melihat bahwa penandatanganan MoU ini adalah perwujudan dari kebijakan yang dicanangkan pemerintah yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saya berharap juga kerjasama ini akan berlangsung baik dan berdampak bagus buat Setjen MPR dan BSSN," ujarnya. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Saleh Partaonan Daulay, Anggota MPR Fraksi PAN

Pancasila Jangan Ditafsirkan dalam UU

SEJUMLAH menteri Kabinet Indonesia Maju bertandang ke DPR. Para menteri mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Menko Polhukam Mahfud MD., mewakili pemerintah menyerahkan konsep baru RUU BPIP kepada Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/7/2020).

Penyerahan disaksikan Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan MenPan-RB Tjahjo Kumolo. Juga disaksikan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU BPIP. Pemerintah secara resmi menarik pembahasan RUU HIP, sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU BPIP tidak sama dengan RUU HIP yang memuat "pasal-pasal kontroversial," seperti penafsiran Pancasila. RUU BPIP hanya memuat tentang tugas, fungsi,

wewenang, dan struktur BPIP.

Sebelumnya berbagai Ormas Islam melancarkan protes terhadap pembahasan RUU HIP karena mereduksi lima sila Pancasila menjadi satu sila (tercantum dalam Pasal 7 RUU HIP) dan tidak memasukkan Tap MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Bagaimana tanggapan anggota MPR terhadap perubahan pembahasan RUU HIP menjadi RUU BPIP, Majelis mewawancarai anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Berikut petikan wawancara dengan pimpinan Fraksi PAN di MPR.

Pada pertengahan Juli 2020, Pemerintah telah menyerahkan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai pengganti RUU HIP. Menko Polhukam Mahfud MD., mewakili Pemerintah menyerahkan konsep RUU BPIP itu kepada Ketua DPR

Puan Maharani. Bagaimana tanggapan Bapak dengan perubahan dari RUU HIP menjadi RUU BPIP?

Begitu. Rancangan RUU HIP sudah masuk ke Badan Legislasi DPR dan menjadi RUU dalam Prolegnas DPR, serta telah coba dibahas di DPR. Artinya, RUU HIP itu sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di DPR. RUU HIP ini juga sudah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna. Tetapi, RUU HIP mendapat penolakan luar biasa dari masyarakat. Banyak elemen masyarakat yang menolak RUU ini. Bahkan mereka datang ke DPR menggelar demo dan unjukrasa menolak RUU ini.

Karena itu, menurut saya, RUU HIP ini telah menimbulkan perdebatan, kontroversi dan juga polemik yang sampai hari ini tidak selesai. Saya dan Fraksi PAN dengan tegas meminta agar RUU HIP dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Presiden sudah mengirim wakilnya ke DPR melalui Menko Polkam Mahfud MD. Dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR, Menko Polhukam menjelaskan, akan ada pembahasan lanjutan. Tetapi disebutkan dalam pertemuan itu, pembahasan lanjutan tetap

dilakukan dengan mengubah RUU HIP menjadi RUU BPIP. Kurang lebih seperti itu. RUU BPIP adalah UU tentang pembinaan ideologi Pancasila dan mengatur tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.

Jadi, dalam pandangan saya, kalau perubahan dari RUU HIP menjadi RUU BPIP yang dilakukan maka tidak akan menyelesaikan perdebatan dan polemik di masyarakat. Kenapa? Karena bagi masyarakat RUU itu akan tetap menjadi persoalan karena substansi yang diprotes masyarakat tidak lepas dari soal Pancasila yang mau diatur dalam UU. Walaupun sebenarnya, dari apa yang saya baca dan pahami, bahwa keinginan Menko Polhukam dan Ketua DPR pada pertemuan itu adalah bagaimana agar UU itu berubah menjadi aturan main atau aturan pelaksanaan teknis terhadap BPIP.

Nah, tetapi karena RUU HIP sudah menjadi persoalan maka saya kira tidak mudah bagi masyarakat memahami perubahan dari RUU HIP menjadi RUU BPIP. Maka, saya rasa pembahasan RUU HIP ini harus dihentikan dulu. Jadi, pemerintah dan DPR perlu mengadakan satu kali rapat kerja. Dalam rapat itu pemerintah dan DPR perlu menetapkan dan memutuskan RUU HIP tidak dilanjutkan. Lalu hasil keputusan rapat itu dikirimkan ke Badan Musyawarah DPR. Kemudian Badan Musyawarah DPR ini memutuskan untuk membawa ke sidang paripurna DPR untuk menghentikan pembahasan RUU HIP.

Kenapa kelihatan ada pihak-pihak

yang menginginkan untuk membuat RUU semacam itu. Setelah RUU HIP mendapat protes dari masyarakat, pemerintah malah mengajukan perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP. Apa yang menjadi latar belakang pemerintah mengajukan RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP?

Saya tidak tahu jika ada pihak-pihak yang menginginkan atau memaksakan RUU semacam RUU HIP. Karena sebetulnya RUU HIP ini adalah hak inisiatif dari DPR. Jadi, kalau menjadi inisiatif DPR, artinya titik tolaknya bukan dari pemerintah. Tapi titik tolaknya adalah dari DPR. Karena itu, saya kira fraksi-fraksi yang ada di DPR harus duduk bersama lagi untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan RUU seperti ini sehingga tidak menyisakan kontroversi dan perdebatan yang tidak baik di tengah masyarakat. Sebaiknya pemerintah dan kita semua fokus saja untuk menangani pandemi Covid-19 sekarang ini.

Kalau pun nanti ada usulan membuat RUU yang baru, katakanlah RUU BPIP yang konsepnya sudah diserahkan ke DPR seperti sekarang ini, ya sudah kita terima. Yang penting RUU HIP harus dihentikan dulu. Kalau nanti ada, misalnya RUU BPIP, RUU itu bisa diusulkan dan dibahas di DPR sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.

Bagaimana dengan substansi RUU BPIP, apakah mirip dengan RUU HIP?

Substansinya tentu harus diubah. Kalau substansi UU BPIP sama dengan RUU HIP pasti tetap akan mengundang kontroversi. Jadi tidak ada gunanya. Untuk apa diusulkan sesuatu yang sama. Jadi, RUU HIP ini sudah dihentikan dulu. Kalau nanti mau mengajukan RUU yang berbeda, silakan. Kita harus buka RUU yang diajukan semisal RUU BPIP ke ruang publik. Berikan kesempatan kepada publik untuk menilai. Publik silakan untuk memberikan masukan dan catatan. Setelah itu baru nanti kita bicara pada hal-hal yang lain.

Artinya, dalam RUU BPIP sebagai pengganti RUU HIP, Pancasila jangan diutak-utik lagi?

Menurut saya, Pancasila tidak perlu ditafsirkan dalam bentuk UU. Sebab, Pancasila sudah final. Pancasila adalah ideologi yang mengikat kita semua. Dan, terbukti ideologi Pancasila telah menyatu-



kan kita sebagai anak bangsa. Jadi, tidak perlu lagi ditambah-tambah atau ditafsirkan lagi dalam UU.

Bagaimana dengan Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham/ajaran komunisme – Leninisme. Tap MPRS No. XXV/1966 ini tidak menjadi konsideran dalam RUU HIP. Apakah dalam RUU BPIP, Tap MPRS ini perlu menjadi konsideran?

Begini, pokoknya sekarang ini, apakah Tap MPRS itu mau masuk atau tidak dalam RUU, masyarakat ingin RUU HIP itu dicabut dulu. Apakah Tap MPRS itu masuk atau tidak dalam RUU pengganti RUU HIP, bukan lagi menjadi persoalan. Sebab, ini persoalan RUU HIP ini sudah meluas dan melebar. Jadi, masyarakat ingin RUU HIP itu dicabut dulu. RUU inilah yang menjadi persoalan di masyarakat. Karena itu RUU HIP harus dicabut dari Prolegnas.

Pemerintah sudah menyiapkan penggantinya, yaitu RUU BPIP?

Kalau nanti RUU BPIP yang diusulkan, ya silakan. Nanti kita akan bahas lagi di DPR.

Apakah Tap MPRS No. XXV/1966 harus masuk dalam RUU BPIP?

Iya, nanti kalau RUU BPIP diusulkan pemerintah. Sampai sekarang belum diusulkan secara resmi, baru konsep RUU itu diserahkan kepada DPR. Artinya, belum melalui mekanisme resmi pengusulan RUU di DPR. Kita akan lihat nanti kalau sudah diusulkan resmi pemerintah. Sebab belum tentu masyarakat mau menerima. □



Ngobrol Bareng Bersama Ketua MPR



Jessica Iskandar

ARTIS sinetron, model, presenter dan komedian cantik **Jessica Iskandar** atau akrab disapa 'Jedar' mengaku, sangat antusias mendapat kesempatan bertemu Ketua MPR, Bambang Soesatyo, di lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, akhir Juni 2020.

Artis yang memulai debut keartisannya berperan sebagai 'Kara' di film Dealova tahun 2005 ini tampil sangat elegan. Mengenakan balutan kemeja *oversized* putih beraksen *ruffles* di bagian lengan atas, dipadukan celana *palazzo* bermotif kotak-kotak krem, Jedar menampilkan kesan *casual* tapi tidak meninggalkan kesan formal.

"Iyalah..bertemu pejabat negara mesti disesuaikanlah, tapi aku agak *deg-degan* nih," ujarnya. Namun, begitu dipersilahkan masuk dan bertemu dengan Bamsuet, spontan artis yang memiliki akun Instagram dengan 23,7 juta *followers* ini berucap: "Aduuh, senang bisa ketemu Ketua MPR di sini." Mendengar komentar Jedar itu, Ketua MPR pun tersenyum.

Dalam pertemuan, Jedar banyak mengorek perjalanan karier Bamsuet hingga menjadi orang nomor satu di lembaga terhormat, MPR. Dan, di akhir pertemuan, pemeran lebih dari 40 judul FTV dan 6 film layar lebar ini mengaku, pertemuannya dengan Bamsuet banyak menerima pelajaran berharga, terutama soal terjun ke dunia politik. □

DER

Ketemu Presiden *Bicarakan* Industri Kreatif

ARTIS penyanyi pop-rock **Oppie Andaresta**, termasuk salah seorang artis yang diundang Presiden Joko Widodo ke Istana, 17 Juni 2020 lalu. Undangan Presiden itu dianggap artis yang melejit lewat 'Cuma Khayalan' di era 1993 itu sebagai *surprise* luar biasa.

"Dalam pertemuan itu, Bapak Jokowi menyebutkan akan memaksimalkan industri kreatif. Dan, di periode kedua ini beliau berjanji akan makin *all out* bekerja. Komitmen lainnya, mendukung lebih banyak bidang pendidikan, kebudayaan dan ekonomi kreatif," kata pemilik nama Ovie Ariesta ini.

Artis penyanyi yang telah menelurkan 8 album dan 2 *single* lagu dalam kurun waktu 1990-2012 ini menyatakan, dalam pertemuan itu, Presiden juga meminta para pekerja kreatif agar di masa pandemi ini menyuarakan kampanye tentang protokol kesehatan kepada masyarakat, dan itu baik dan patut didukung," ujarnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Oppie Andaresta



KH. Abdullah Gymnastiar

Patuhi Protokol Kesehatan Sebagai Amal Soleh

MUBALIGH kondang KH. Abdullah Gymnastiar atau AA Gym sangat *concern* tentang wabah Virus Corona atau Covid-19 yang masih menghantui dunia, termasuk Indonesia. Saat melakukan berbincang-bincang secara virtual dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, pertengahan Juni 2020 lalu, kekhawatirannya pun disampaikan.

"Yang saya khawatirkan adalah mereka, Orang Tanpa Gejala (OTG), karena mereka sebagai penular tapi tidak sakit. Mereka mestinya menyadari itu dengan selalu berhati-hati, waspada, dan patuhi protokol kesehatan biarpun merasa sehat-sehat saja," katanya.

AA Gym juga mengkritik sebagian orang yang terlalu sederhana memahami takdir Allah SWT. "Ada yang mengatakan, saya *mah* gak takut sama virus, kalau takdirnya kena ya kena, kalau takdirnya tidak ya tidak. Padahal ada sejarah Islam mengajarkan bahwa menghindari wabah juga adalah takdir Allah," ujar Aa Gym.

Aa Gym mengajak kita untuk mematuhi secara benar dan sempurnakan protokol kesehatan sebagai amal saleh, jangan ragu-ragu. "Nah, perkara kena atau tidak itu urusan Allah," jelasnya. □

DER



Mal Hewan Qurban H. Doni Konsep Pasar Modern Hewan Kurban

BARAT jamur di musim penghujan, jelang Idul Adha 2020 lalu, bermunculan lapak-lapak penyedia hewan kurban. Pemandangan seperti ini terjadi di mana-mana, mulai dari ibukota hingga ke desa-desa. Dari sekian banyak lapak penyedia hewan kurban itu terdapat satu yang cukup menarik. Lapak itu diberi nama 'Mal Hewan Kurban H. Doni,' terletak di bilangan Kelapa Dua Depok atau persisnya di samping Mako Brimob (Markas Komando Brigade Mobil) Depok, Jawa Barat.

Wartawan *Majelis* sempat mengunjungi dan melihat dari dekat Mal Hewan Kurban H. Doni ini. Kesan yang diperoleh *Majelis* bahwasanya lapak hewan kurban yang satu ini memang berbeda dengan kebanyakan lapak tempat penjualan hewan kurban pada umumnya. Salah satu yang membedakan, lapak hewan kurban milik H. Doni ini bukannya menempati tanah kosong, melainkan menggunakan bangunan permanen yang sangat representatif.

Mal Hewan Kurban H. Doni menempati sebuah bangunan yang sehari-harinya biasa digunakan sebagai *showroom* mobil. Tidak tanggung-tanggung, luas keseluruhan tempat tersebut lebih dari 1000 meter persegi. Agaknya memang layak menggunakan

istilah mal, karena selain tempat memajang hewan-hewan kurban, di sana juga terdapat ruangan kaca yang berfungsi sebagai kantor yang dilengkapi dengan mesin pendingin suhu ruangan.

Juga yang membedakan dengan lapak hewan kurban pada umumnya, para pembeli yang datang ke sana dilayani oleh beberapa

pegawai berpakaian rapi, masing-masing dilengkapi komputer. Kalau kebanyakan lapak hewan kurban menempati lahan kosong dan dilayani oleh penjual yang berpakaian seadanya, tapi di Mal Hewan Kurban H. Doni ini hewan-hewan kurban menempati bangunan yang atapnya terbuat dari bahan yang kokoh, ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh pula, bahkan sebagian terbuat dari tiang cor.

Perbedaan mencolok juga terasa dalam hal pelayanan terhadap para konsumen. Di Mal Hewan Kurban H. Doni terdapat beberapa tenaga *sales* perempuan yang siap melayani para konsumen dengan ramah. Begitulah ketika *Majelis* berkunjung ke sana, disambut ramah oleh dua perempuan belia. Seorang di antaranya bernama Junica, mengenakan *flannel* biru tua dipadu padan dengan *blue jeans*. Sedangkan sales yang satu lagi, Vivi, memakai *flannel* merah bermotif kotak dengan *jeans* hitam. Keduanya sama-sama mengenakan *middle boots* beserta masker dan *face shield*.

Sebagai *sales* perempuan, baik Junica maupun Vivi, terlihat tenang berada di sekitar hewan kurban. Keduanya juga terlihat cekatan, termasuk ketika harus mengantar



Junica (kiri) dan Vivi (kanan)



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

calon pembeli berkeliling mencari hewan kurban yang diinginkan.

Menurut Junica, pekerjaan yang dijalani-nya itu cukup menantang. Bahkan, ia bisa menikmatinya meski tak dipungkiri kadang ada rasa khawatir dan was-was, terutama ketika ada hewan kurban yang berusaha berontak.

“Syukur semua berjalan baik, tak pernah menemukan ada persoalan. Satu-satunya pengalaman cukup menggelitik adalah ketika dulu saya pernah dijilat sapi. Hanya terasa geli saja sih,” cerita Junica kepada *Majalah Majelis*.

Sepi Pembeli

Keberadaan *sales promotion girl* diakui oleh H. Doni, selaku pemilik Mal Hewan Kurban, cukup menarik perhatian masyarakat, khususnya awak media. Kerap kali para fotografer lebih memilih menampilkan sosok SPG dibanding hewan kurban yang ditawarkan. Namun, Doni menolak jika keberadaan

SPG itu sebagai daya tarik konsumen untuk datang dan membeli hewan kurban.

“Saya bukan menjual SPG, tapi saya mengandalkan pada hewan kurban yang sehat, kuat, bersih, dan memenuhi syarat untuk dikurbankan. Itulah sebagai bahan promosi mal hewan qurban ini, bukan keberadaan para SPG. Keberadaan SPG itu menjadi mencolok karena kawan-kawan wartawan kerap menjadikan mereka sebagai bumbu agar beritanya lebih menarik,” kata Doni.

Menurut Doni, sebagai penjual, dia sudah mempersiapkan hewan-hewan kurban itu jauh-jauh hari sebelumnya. Empat hingga enam bulan sebelum dijual, hewan kurban tersebut didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu digemukkan untuk kemudian dijual pada waktu yang tepat.

Sayangnya, tahun 2020 ini bertepatan dengan pandemi Corona, sehingga membuat penjualan hewan kurban cenderung meng-

alami penurunan sangat signifikan. Menurut Doni, penjualan hewan kurban tahun ini, dibanding tahun-tahun sebelumnya, terjadi penurunan mencapai 70%.

“Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana berkurban pada masa pandemi Corona. Apakah pemerintah memberikan izin untuk berkurban. Semua ini membuat sebagian masyarakat raga-ragu,” ungkap Doni.

Selain itu, faktor pandemi Corona berdampak pula kemampuan daya beli masyarakat yang menurun. Dan, itu terasa sekali pada hasil penjualan di Mal Hewan Kurban miliknya. Doni mengaku, tidak memiliki kiat apapun untuk mengusahakan agar penjualannya meningkat, meski ada corona. Ia hanya bisa pasrah, sembari berharap Corona segera sirna, sehingga gairah berkurban bisa kembali bergairah seperti sediakala. Dan, Doni rela harus menunggu hingga Idul Adha di tahun yang akan datang tiba. □

MBO



DUA orang ini tidak memiliki hubungan darah maupun kesamaan daerah asal. Namun, nama keduanya nyaris sama. Yang satu lahir di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, satunya lagi berasal dari Rao, suatu daerah di sebelah utara Sumatra Barat. Yang satu bernama Arsul Sani, yang lain Asrul Sani. Nama yang disebut pertama adalah Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024, Anggota Komisi III DPR-RI dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016 -2021. Sedangkan nama yang

disebut kedua adalah seorang pujangga, penyair, penulis juga sastrawan pelopor Angkatan '45.

Meski bukan saudara dan tidak memiliki riwayat asal usul yang sama, namun penamaan Arsul Sani tidak bisa dipisahkan dari ketokohan, kepeloporan, kiprah, serta prestasi sang pujangga. Peralnya, diberi nama Arsul Sani tak lepas dari kekaguman orang tuanya terhadap sastrawan pelopor Angkatan '45 itu. "Ayah saya adalah kenalan dan pengagum Asrul Sani, seorang seniman,

H. Arsul Sani, SH., M.Si., Pr.M

Jangan Gantungkan Kehidupan Pribadi di Lembaga Politik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sutradara dan sastrawan yang juga tokoh Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) Nahdlatul Ulama (NU), ungkap Arsul Sani.

Arsul menceritakan, ayahnya, H. Abdullah Fadjar (almarhum) waktu mudanya di 1950-an sudah aktif di lingkungan organisasi NU di Jakarta. Karenanya, dia sering bertemu Asrul Sani. "Karena keakraban dan kekaguman itu, ayah ingin memberikan nama tersebut kepada saya," kata Arsul Sani kepada Majalah *Majelis* di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun, nama Asrul dalam kosa-kata bahasa Arab tidak ditemukan, yang ada adalah Arsul. Berasal dari akar kata *arsala*, *yursilu* dan seterusnya, yang berarti utusan. Khawatir dicemooh, karena orang NU, tapi paham "nahwu-shorof" bahasa Arab, lalu sang ayah pun memberi nama anaknya Arsul Sani.

Meski diambil dari nama seorang sastrawan, dalam perkembangannya Arsul lebih tertarik mendalami ilmu hukum serta kepengacaraan. Ketika diterima masuk kuliah di Universitas Indonesia, pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 8 Januari 1964, ini memilih Fakultas Hukum. Dari sejak kuliah dia memiliki komitmen kuat dalam pembelaan kepentingan publik. Oleh karena itu, lembaga hukum pertama yang dimasukinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sejak di LBH Jakarta ini Arsul berkawan dengan Benny K. Harman, politisi senior Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI. Ia senang bertemu beberapa kawannya di lingkungan LBH Jakarta dan organisasi bantuan hukum lainnya, seperti Trimedy Panjaitan (PDI Perjuangan), Desmond Mahesa (Gerindra) dan Syarifudin Suding (PAN) sebagai sesama politisi dan anggota DPR.

"Kami punya banyak persamaan kalau mengkritisi soal-soal

penegakan hukum", ujar Arsul. Namun, yang membedakan dengan mereka adalah Arsul lebih baru terjun ke dunia politik. Selepas dari LBH Jakarta, ia memilih bekerja sebagai advokat konsultan hukum di *professional law firm*. Ketika terpilih menjadi anggota DPR RI pada pileg 2014, Arsul memilih berada di Komisi III DPR, membidangi masalah hukum, keamanan dan HAM.

Pengalamannya sebagai advokat membentuk kecakapannya dalam berbicara dan membahas masalah hukum. Pada saat memimpin Komisi III DPR, Bambang Soesatyo yang saat ini menjabat Ketua MPR RI menggelarkannya "Kamus Hukum Berjalan di DPR". Ini karena penguasaan substansi hukumnya mumpuni.

Karena itu, layaklah jika di kalangan pimpinan MPR, Arsul kerap mendapat porsi yang lebih besar jika membahas persoalan-persoalan terkait masalah hukum. Kepercayaan tersebut tak berlebihan, karena dia selalu memiliki pandangan dan pemikiran yang konstruktif terkait masalah perundang-undangan, tak terkecuali RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menjadi kontroversi.

Pasal Kontroversi

Polemik terkait RUU HIP, menurut Arsul, muncul selain karena substansinya ada yang bermasalah, juga karena ada politik identitas sisa Pilpres yang belum sepenuhnya rampung. Masih ada ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dukungan dalam Pilpres. Keadaan ini tidak berbeda dengan anggota lembaga legislatif maupun elit parpol yang menyisakan perbedaan sikap politik.

Namun, Arsul Sani menekankan bahwa terkait penolakan RUU HIP ini tidak semata sebagai keterbelahan masyarakat sisa Pilpres 2019, karena yang menolaknya jauh lebih luas dari mereka yang selama ini memang anti terhadap Pemerintahan Jokowi.



“Begitu banyak kelompok masyarakat yang menolak hadirnya RUU HIP dengan substansi seperti yang ada di dalamnya. Gelombang penolakan dari berbagai kelompok itu bertemu dengan aspirasi mereka yang selama ini berada sebagai pihak oposisi. Tapi, dalam kehidupan demokrasi kita, itu adalah hal yang biasa dan wajar, tidak usah disikapi dengan pendekatan penegakan hukum, kecuali berbuat anarkis dengan merusak atau melakukan tindak pidana lainnya secara kasat mata” jelas Arsul Sani.

Arsul mengakui ada sejumlah persoalan yang membuat RUU HIP menuai kritik. Antara lain, karena memuat pasal-pasal kontroversi, seperti halnya Pasal 7 terkait Trisila dan Ekasila. Arsul percaya, kritik terhadap RUU HIP tidak akan terjadi jika fokus utama RUU tersebut untuk memberikan legal standing dan mengatur tupoksi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penolakan terhadap RUU HIP dari masyarakat perlu disikapi dengan bijak dan ditindak lanjuti oleh DPR dengan menarik dan membatalkan dulu RUU HIP ini. Namun, tentu harus sesuai dengan prosedur dan proses yang diatur dalam UU MD3 dan UU No. 12 Tahun 2011, terlebih karena RUU ini merupakan usulan inisiatif DPR. Posisi formal saat ini, DPR menunggu sikap resmi Pemerintah melalui surat tentunya kepada DPR. Jadi, DPR juga tidak bisa menyikapi hanya berdasarkan pada pernyataan sikap Pemerintah di media.

Arsul Sani mempersilakan masyarakat terus mengawal kelanjutan sikap baik Pemerintah maupun DPR RI terkait dengan RUU HIP ini, namun ia meminta semua elemen masyarakat mau menahan diri. Tidak larut dalam su’udhon (prasangka), apalagi memprovokasi atau terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya.

Menurut Arsul, semua fraksi di DPR pasti sepakat bahwa posisi Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara tidak usah ditafsir dengan tafsir yang dahulunya sudah selesai diperdebatkan, dan bukan merupakan hal yang menjadi kesepakatan per tanggal 18 Agustus 1945. “Kalau tafsir Pancasila ditarik mundur, kembali pada hal-hal yang menjadi materi perdebatan sebelum 18 Agustus 1945 maka akan memunculkan kelompok lainnya dengan tafsirnya yang lain lagi. Misalnya kembali kepada piagam Jakarta. Dan itu, menurut saya, akan menyebabkan keterbelahan baru,” kata Arsul.

Menyangkut tugas BPIP ke depan, jika diperkuat dengan undang-

undang, Arsul berharap, tidak ada yang “overlapping” dengan tugas dan wewenang MPR yang diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR sebagai turunannya. Baik BPIP sebagai lembaga pemerintahan dan MPR sebagai lembaga negara harus bersinergi dalam memasyarakatkan dan membumikan Pancasila.

Masuk Politik

Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitulah perumpamaan yang pas untuk menggambarkan keikutsertaan Arsul Sani dalam percaturan politik nasional. Meski belum lama aktif di PPP, namun suami dari Sukma Violetta, ini tak bisa lepas dari garis tangannya sebagai anak dari tokoh NU dan Ketua PPP Kabupaten Pekalongan. Bedanya, kalau sang ayah, H. Abdullah Fadjari, hanya sekali menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, tetapi Arsul melampauinya. Ia sukses menjadi pimpinan MPR RI, sekaligus Sekjen DPP PPP. Isterinya juga seorang pejabat negara, menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) RI.

Sebelum terpilih menjadi anggota legislatif pada Pileg 2014 dan 2019, Arsul pernah gagal masuk DPR pada Pileg 2009. Setelah itu, Arsul berinisiatif melanjutkan pendidikan doktoralnya di Glasgow School for Business and Society, GCU - Skotlandia pada 2011. Studi itu berbarengan dengan anaknya yang juga ambil tahun terakhir SMA-nya di Oxford Internasional College, Kota Oxford, Inggris, dan kemudian kuliah *undergraduate* di London School of Economics and Political Science (LSE). Arsul pun tinggal dan bolak-balik ke negeri Ratu Elizabeth menemani putrinya.

Pada 2011, ketika masih getol belajar, datang telepon dari petinggi PPP, yang tak lain adalah Wakil Ketua MPR kala itu Lukman Hakim Saifuddin. Singkat cerita, Arsul diminta membantu PPP. Karena memang takdirnya berjodoh, Arsul meyanggupi menjadi bagian dari



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



PPP, untuk memberi masukan kebijakan dan bantuan hukum, memberi input dalam kaitan legislasi.

Selanjutnya pada 2012 ketika proses pencalegan Pileg 2014 dimulai, Arsul didaulat sebagai caleg PPP. Dan, itu membuatnya harus makin sering bolak-balik Indonesia - Inggris.

Sempat ragu, karena tidak dikenal masyarakat, Arsul akhirnya mendapat sambutan hangat setelah menjelaskan bahwa dirinya anak dari H. Abdullah Fadjar. Sejak itu, ia mendapat simpati serta dukungan dari kader dan warga partai berlambang Ka'bah, karena ayahnya sangat dikenal oleh warga masyarakat dan kalangan PPP di Dapil Jateng X.

"Ketika ditawari ikut pileg, saya teringat kembali pesan ayah yang wafat pada akhir 2004. Beliau bilang, kalau mau masuk politik maka urusan dapur harus sudah selesai. Kalau dapur belum selesai maka kamu akan mencari makan di politik dan partai. Kalau sampai cari makan di partai maka potensi penyalahgunaan wewenang untuk korupsi sangat besar. Kamu tidak boleh menggantungkan hidupmu di jalur politik, bukan memikirkan dan membantu orang lain melalui politik," ungkap Arsul.

Namun, Arsul merasa dirinya sudah berkecukupan. Penghasilannya selama 14 tahun menjadi Direktur di sebuah perusahaan multinasional dan juga sebagai *lawyer* dan arbiter yang terdaftar sebagai anggota SIAC di Singapura dan CI Arb London membuat dia siap terjun ke dunia politik dengan penghasilan lebih kecil. "Kalau niat saya cari duit di politik, saya tidak masuk politik. Penghasilan sebagai *corporate lawyer* dan arbiter jauh lebih besar dari pada jadi anggota DPR", ujar Arsul.

Jalan Pikir

Keberhasilan yang dinikmati Arsul Sani tak lepas dari peran orangtua yang begitu besar. Sejak kecil, Arsul sudah keluar dari mainstream, arus kehidupan yang ada di sekitarnya. Ayahnya adalah tokoh NU, tapi Arsul malah menyelesaikan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah, bukan madrasah ibtidayah atau pondok pesantren. Setamat sekolah dasar, ia meneruskan pendidikan di SMP dan SLTA Negeri, sebelum akhirnya ke Jakarta mengambil pendidikan hukum di UI.

Selama menjalani kuliah, sesekali Arsul menyempatkan berdagang batik di Pasar Tanah Abang. Atau memberi privat kepada siswa-siswi yang ingin belajar lebih. Selesai kuliah, Arsul tidak langsung bekerja dan mengejar penghasilan semata, ia aktif di organisasi kemahasiswaan. Pernah jadi Sekretaris Senat Mahasiswa FH UI dan Ketua Komisariat HMI FH UI. Ia memilih bekerja sebagai Asisten Pembela Umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta untuk membantu

orang-orang lemah dan buta hukum mulai tahun terakhir kuliah. Apalagi, ketika itu Jakarta tengah marak dengan pelanggaran HAM, akibat berlangsungnya pembangunan dan kesewenangan aparat pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1980-an.

"Ayah saya berfikir, kalau semua orang NU jadi kiai, bagaimana masa depan PPP. Makanya, harus ada orang NU yang mengambil jalan lain. Beliau memilih tidak mengirim anaknya ke pesantren, karena sudah banyak warga NU yang jadi kiai," kata Arsul lagi.

Kini Arsul tengah menikmati rahasia di balik nasihat yang diberikan orangtuanya. Membantu sesama melalui jalur politik, setelah kebutuhan dapurnya terpenuhi. Apalagi anak pertamanya sudah bekerja. □

MBO

profil

Nama : **H. Arsul Sani SH, M. Si, Pr. M**
 Lahir : Pekalongan, Jawa Tengah 8 Januari 1964
 Orang Tua : Abdullah Fadjar dan Rodhiyah
 Istri : Sukma Violetta
 Anak : 3 orang

PENDIDIKAN

- SD Muhammadiyah Pekajangan II (1976)
- SMPN I Pekalongan (1979)
- SMAN Pekalongan (1982)
- Hukum, Universitas Indonesia (1982-1987)
- Postgraduate Diploma Comparative Law, University of Technology, Sydney (1993)
- Ilmu Komunikasi, STIKOM, The London Scholl of Public Relations, Jakarta (2005-2007)
- Justice & Policy Doctorate Program, Glasgow Caledonian University (GCU)(2011)

KARIER

- Pengacara Publik di Lembaga Bantuan Hukum (1986-1988)
- Editor Journal Hukum & Pembangunan UI (1986-1988)
- Senior Lawyer Gani Djemat & Partners (1989-1997)
- Visiting lawyer, Dunhill Madden Butler, Sydney - Australia (1994)
- Founding Partner Karim Sani Lawfirm (1997-2004)
- Direktur, PT. Tupperware Indonesia (1997-2011)
- Founding Partner SAP Advocates (2004)
- Chairman Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) (2006-2008)

Membumikan (kembali) Pancasila di Era 4.0.

DEWASA ini kita memasuki sebuah zaman yang disebut oleh banyak kalangan sebagai era revolusi industri 4.0. Era ini secara fundamental berdampak terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi antarmanusia. Fenomena revolusi industri 4.0. yang diperkenalkan pertama kali oleh sekelompok ahli asal Jerman pada acara *Hannover Trade Fair* 2011 ini juga telah mendisrupsi berbagai aktivitas manusia di berbagai bidang, tak hanya pada skop ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tapi juga ekonomi, politik, hingga aspek sosial dan budaya masyarakat.

Implikasi perubahan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam potret kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Banyak perusahaan mengaplikasikan teknologi otomatisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Para politisi lebih cenderung menggunakan media sosial semisal *Twitter* dan *Instagram* yang memiliki daya jangkauan luas untuk menyapa konstituennya. Masyarakat lebih mudah mengakses beragam informasi hanya melalui telepon genggam di tangan tanpa harus bersusah payah membuang tenaga untuk membeli media cetak di kios surat kabar.

Revolusi industri 4.0. sekilas memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat dampak negatif yang berpotensi menggerus ketahanan nasional. Teknologi otomatisasi, meskipun mendukung efektivitas dan efisiensi perusahaan, namun berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, bahkan kriminalitas. Penggunaan media sosial secara masif dan intens dalam berinteraksi secara perlahan telah mengikis sikap *guyub (gemeinschaft)* masyarakat. Tingginya aksesibilitas terhadap informasi namun tanpa filter yang kuat menimbulkan kerentanan sosial akibat maraknya hoax dan ujaran kebencian.

Realitas tersebut tentu saja harus direspons secara cepat dan tepat oleh pemerintah dan segenap masyarakat agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat direduksi, bahkan dinihalkan. Respons yang diberikan bisa bersifat regulatif melalui berbagai kebijakan publik atau perundang-undangan, bisa juga bersifat teknis dengan melibatkan peran serta masyarakat yang peduli (*civil society*). Namun demikian, piranti filosofis yang pertama dan utama untuk digunakan, baik oleh pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan



negara, maupun masyarakat itu sendiri sebagai subjek dan objek pembangunan adalah penguatan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai konsensus dasar nasional.

Solusi penggunaan Pancasila untuk mengatasi implikasi negatif revolusi industri 4.0. mungkin terkesan abstrak bagi mereka yang berfikir terlalu teknokratis dalam menyikapi fenomena sosial di masyarakat. Namun sejarah membuktikan bahwa inilah piranti yang paling mendasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menjamin tegak dan kokohnya republik hingga hari ini. Kita bisa berkaca pada fenomena yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Pada masa itu menguat sentimen primordial di kalangan anak

Oleh:
Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.
Wakil Ketua MPR RI



bangsa, hidupnya ideologi komunisme yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, hingga upaya-upaya separatisme di berbagai daerah sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Akan tetapi semua ancaman tersebut dapat diatasi karena strategi dan langkah penanganan yang diambil oleh pemerintah berkhidmat pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa tersebut, tak dipungkiri bahwa kesadaran akan luhurnya Pancasila sebagai nilai filosofis bangsa sangatlah kuat. Perasaan senasib sepenanggungan serta solidaritas kemanusiaan yang kuat karena pernah sama-sama dijajah oleh bangsa kolonial selama tiga setengah abad lamanya memudahkan bangsa Indonesia untuk berkontemplasi dan kembali ke titik sadar tatkala mereka dibebat oleh berbagai ancaman dan tantangan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

Kondisi pada hari ini sungguh berbeda apabila dibandingkan dengan situasi pada masa pasca kemerdekaan. Tatkala begitu banyak ancaman dan tantangan kebangsaan yang muncul, upaya untuk kembali menggunakan Pancasila sebagai respons filosofis menjadi terkendala. Kendalanya terletak pada adanya “jarak” antara fungsionalitas Pancasila dengan pemahaman masyarakat, terlebih lagi generasi milenial yang lahir empat dekade lebih setelah kelahiran Pancasila. Jarak ini tercipta karena masyarakat menganggap bahwa Pancasila adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Sebagai konsekuensinya, alih-alih mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat justru tidak paham akan hal yang paling mendasar dalam Pancasila itu sendiri, yakni genealogi dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya.

Oleh sebab itu, upaya untuk membunikan Pancasila sebagai dasar negara ke segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali adalah suatu keharusan. Pemilihan kata ‘membunikan’ di sini menjadi kunci dan bermakna dua hal. Pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada

masyarakat agar Pancasila bukan merupakan suatu hal yang absurd untuk dipahami. Kedua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap sumber daya nasional yang dimiliki. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kita seyogyanya bersikap bijak dalam menilai revolusi 4.0., di satu sisi menyaring dampak negatifnya melalui Pancasila, di sisi lain menggunakan kelebihanannya untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri di masyarakat. Upaya membunikan Pancasila haruslah bersifat multi jalur agar prosesnya lebih cepat.

Dalam konteks eksekutif, upaya membunikan Pancasila dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, nilai keadilan sebagai nafas atau ruh dalam setiap perumusan kebijakan publik. Dalam konteks legislatif, anggota parlemen harus secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya legislasi dan pengawasan. Para legislator juga harus secara konsisten menyosialisasikan Pancasila dalam kerangka empat pilar kepada masyarakat. Sedangkan di sisi yudikatif, upaya membunikan Pancasila dapat dikontekstualisasikan dalam bentuk menjalankan proses peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti yang termaktub dalam Pancasila.

Revolusi industri 4.0. yang menjadi “anak kandung” globalisasi merupakan fenomena yang tak bisa kita bendung. Ia menjelma menjadi sebuah keniscayaan yang tak bisa dielakkan. Oleh sebab itu, penggunaan Pancasila sebagai sarana penyaring dan panduan gerak langkah ke depan menjadi penting dan relevan. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila yang konsisten, hal-hal positif dalam revolusi industri 4.0. dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan hal-hal negatifnya dapat direduksi agar tidak berdampak buruk terhadap ketahanan nasional. □

Satu Buku Seribu Habibie

Kisah perjalanan hidup Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie tertuang dalam banyak buku, film, youtube, dan berbagai media lainnya. Ada satu buku yang mengupas sosok Habibie dalam berbagai sisi. Buku berjudul *The Power Ideas* ini menyingkap gagasan, pencerahan, kiat inspiratif tentang cinta, keislaman, keIndonesiaan, dan teknologi dari pria asal Parepare itu.

SOSOK pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, ini memiliki banyak sisi. Bacharuddin Jusuf Habibie, begitu nama panjangnya, kali pertama menapaki hidupnya sebagai remaja yang tekun belajar tentang teknik di Universitas Teknologi Rhein Westfalen Aachen, Jerman, selanjutnya bekerja dalam bidang kedirgantaraan di Jerman, menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden. Tak berhenti di situ cerita perjalanan hidupnya. Masa lalunya dalam mengarungi kehidupan bersama istrinya, Ainun Habibie, diangkat ke layar lebar beberapa kali sehingga membuat kisah hidupnya lebih dari kisah *Siti Nurbaya* dan *Romeo-Juliet*. Dalam kisah *Siti Nurbaya* dan *Romeo-Juliet* ada cerita dua orang saling mencintai, namun mereka tidak pernah bersatu. Sedang Habibie dan Ainun saling mencintai, bersatu, dan berakhir dengan kebahagiaan.

Banyaknya sisi yang terungkap dalam perjalanan hidup pria yang akrab disapa Eyang Habibie itu, selain bisa di-googling, juga bisa disimak dalam banyak buku yang menulis tentang riwayat hidup sosok yang pernah menjadi Asisten Riset Ilmu Pengetahuan Institut Kontruksi Ringan Rheinsich Westfaelische Technische Hochschule, Aachen. Satu di antara buku dan bisa jadi merupakan satu-satunya buku yang mengupas dari banyak sisi seorang Habibie adalah buku berjudul *BJ Habibie The Power Ideas, Gagasan, Pencerahan, Kiat Inspiratif tentang Cinta, Keislaman, KeIndonesiaan, dan Teknologi*.

Penyunting buku, A. Makmur Makka, dalam pengantar menyebutkan, buku ini berisi gagasan dan pencerahan B.J. Habibie mengenai Tuhan, teknologi, kepemimpinan, agama, SDM, keislaman, keIndonesiaan, industrialisasi, nilai tambah, strategi pembangunan, sistem pemerintah, Pancasila, dan masih banyak lainnya. Dalam pengantar itu ditegaskan, Habibie menekankan perlunya nilai tambah bagi manusia, sebab proses perekonomian, penemuan manusia, pendidikan adalah nilai tambah. Nilai tambah itu akan membuat manusia memiliki mentalitas, kemampuan berpikir, membuat analisa dan kebijakan, melahirkan inovasi.

Buku bersampul foto diri Habibie ini mendapat respon yang antusias dari masyarakat. Cetak I pada Agustus 2018, dicetak ulang hingga Cetakan IV pada Oktober 2019. Dalam buku ini Habibie melontarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban yang

diberikan ada yang dilakukan secara spontan. Meski spontan, namun maknanya sangat dalam. Contohnya, pada halaman 7 ada pertanyaan: “Ibarat produksi teknologi tinggi, Anda ini apa?”. Pertanyaan itu dijawab: “Saya? kapal terbang ha... ha...”

Dari jawaban yang spontan, namun penuh makna tersebut membuat buku ini menjadi sesuatu yang ringan, enak dibaca, perlu, sehingga selepas membaca, kita menjadi termotivasi untuk berbuat produktif, bermanfaat, serta bersikap arif dan bijaksana.

Semua ungkapan dalam kehidupan Habibie di buku ini tercurah dalam Bab *Gaya Hidup & Teknologi, Keislaman; Iptek, SDM, Industrialisasi; Nilai Tambah dan Biaya Tambah, KeIndonesiaan, Cinta, dan Kiat Inspiratif BJ Habibie Pandangan Orang Lain*.

Di akhir 1990, masyarakat dikejutkan dengan sikap Habibie. Di tengah kesibukannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dia terpilih menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Masyarakat terkejut sebab sebelumnya ia jauh dari dunia ormas-ormasan. Habibie sudi bergabung dengan organisasi itu terungkap di halaman 54. Alasannya, di ICMI bukan untuk mengantarkan bangsa ini menjadi juara MTQ internasional, namun untuk memberantas buta huruf iptek sedemikian rupa hingga anak cucu kita di masa yang akan datang ikut berperan aktif dalam proses nilai tambah dalam pembangunan seluruh Indonesia. Alasan inilah yang membuat Guru Besar ITB itu mengatakan: “*I am going to do that*”.

Sosok Habibie di mata generasi milenial lebih luwes dibanding pemahaman generasi sebelumnya. Keluwesan dalam memandang

pria berdarah Gorontalo-Jawa itu terbentuk, sebab film *Habibie & Ainun* dalam 3 sekuel membuat dirinya juga tercitra sebagai layaknya anak-anak muda yang tidak bisa terlepas dalam masalah percintaan.

Dalam masalah cinta, dalam buku ini tersingkap di halaman 195. Habibie membagi cinta dalam lima wujud. Cinta yang dikemukakan oleh pria yang pernah menjadi Direktur Utama PT. Pelayaran Armada Laut (PAL), Surabaya, itu dalam makna yang luas, bukan sekadar mengatakan “*i love you*”. Luasnya makna cinta yang diungkapkan oleh Habibie seperti, “cinta kepada yang tidak mencintaimu”. Dari ungkapkan inilah membuat Habibie diterima oleh semua golongan, sehingga dia mendapat sebutan negarawan. □

AWG

